

PERKAWINAN BERBEDA AGAMA

Wacana dan Pemikiran

HUKUM ISLAM INDONESIA

Dr. Pagar, M.Ag



PERKAWINAN BERBEDA AGAMA

Di. Pagar, M.Ag.

Kolapustaka Media

Pandang, 2006

PERKAWINAN BERBEDA AGAMA

*Wacana & Pemikiran
Hukum Islam Indonesia*

Dr. Pagar, M.Ag.

Citapustaka Media
Bandung, 2006

PERKAWINAN BERBEDA AGAMA
Wacana & Pemikiran Hukum Islam Indonesia

Penulis
Dr. Pagar, MAg

Setting layout
Muhammad Yunus Nasution

Desain Cover
Auliart & Desain Grafis (ADG)

Penerbit
Citapustaka Media
Jl. Cisitu Lama III No. 2A Bandung 40135
Telp. (022) 2504587
E-mail : citapustaka@gmail.com
Contact person : 08126516306 - 08562102089

Cetakan pertama : Desember 2006

ISBN 979-3216-67-0

© All Right Reserved

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini ke dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setinggi puji dan syukur dipersembahkan ke hadirat Allah SWT. yang telah mencurahkan rahmat-Nya kepada sekalian alam, khususnya kepada penulis, sehingga buku kecil ini dapat terselesaikan. Selanjutnya salawat berangkai salam disampaikan kepada Rasulullah SAW. yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran-Nya sehingga kebenaran dan keadilan dapat tersampaikan di alam jagat raya ini.

Di tengah kehidupan bangsa yang pluralitas agama, ditambah dengan kehadiran dasar negara yang nasionalis, kita menginginkan baik agama demikian juga dasar negara tersebut akan menjadi asset dan sarana bagi seluruh komponen Bangsa untuk menjadi pemacu dan pemicu kerukunan beragama yang serasi kompak dan bersama. Prinsip-prinsip kebersamaan, seperti; egalitarianisme, musyawarah, kebebasan menjalankan ajaran agama, tasamuh, dan demokrasi harus dikedepankan. Perbedaan mesti bisa dijadikan sebagai memperkaya, saling melengkapi, dan sarana berpacu untuk membangun Bangsa. Dengan demikian

pola hubungan anak bangsa akan tetap sinergis dan harmonis.

Kenyataan sosial menunjukkan bahwa perkawinan adalah suatu aspek yang sering berhadapan dengan persoalan pluralitas agama tersebut. Di saat adanya kesepakatan pihak mempelai untuk membangun rumah tangga di atas pilar perbedaan agama maka sakralitas masing-masing agama sering dikedepankan, bahkan dijadikan sebagai kajian strategis untuk memboboti pemahaman terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan. Kesempurnaan pemahaman ini, jelas akan sangat bermanfaat bagi mempelai, demikian juga pihak terkait untuk mengatur langkah dan startegi perkawinan yang akan dilangsungkan. Sekecil apa pun pemikiran yang disumbangkan akan turut melengkapi perbendaharaan kajian dimaksud. Dengan demikian penelaahan akan hal ini masih sangat diperlukan.

Dinamika masyarakat ternyata secara serta merta turut juga menjadi stimulus untuk memperkaya kajian perkawinan berbeda agama tersebut. Khusus mengenai pola hubungan Islam dengan non muslim dalam kaitannya dengan perkawinan berbeda agama, dalam KHI ternyata dilarang, namun dimungkinkan adanya, karena perbedaan agama tidak secara otomatis dijadikan sebagai alat untuk terjadinya perceraian. Pada awalnya hal ini masih sulit untuk dapat diterima oleh umat Islam, ternyata realitas kehidupan menunjukkan lain, perkawinan berbeda agama senantiasa dilangsungkan, wacana keilmuan bergulir terus, JIL mendengungkan semangat kebolehan perkawinan tersebut, bahkan

Counter Legal Draf sempat sudah mengakomodasinya kendatipun sampai sekarang ini belum leading ke DPR karena banyak kritikan dan masukan. Semua ini memperlihatkan tentang betapa kayanya khazanah budaya dan kajian anak bangsa.

Potret mini, dan secuil wacana & pemikiran hukum Islam Indonesia tentang perkawinan berbeda agama tersebut, penulis coba tuangkan dalam warqah yang sederhana ini. Ada lima aspek pendekatan yang dipahami bagian dari kajian sentral dalam hal ini, yaitu, kajian perkawinan berbeda agama dari aspek pandangan agama-agama pada umumnya, KHI, peraturan dan perundang-undangan, JIL, dan wacana hukum Islam ke depan. Penyajian akan hal ini akan menjadi unsur penting terpenuhinya perangkat realitas sosial yang ada.

Penulis yakin tentang kelemahan buku ini. Aspek kealpaan dan keterbatasan penulis sesungguhnya membuat buku ini masih jauh dari target ideal yang semestinya. Semua itu penulis sadari sepenuhnya, namun dengan berbagai upaya dan pertimbangan, akhirnya buku kecil ini di celah-celah kesederhanaannya diterbitkan juga.

Untuk itulah, penulis mengharapkan kritikan dan saran membangun dari segenap pihak dalam rangka perbaikan selanjutnya, insya Allah tahap demi tahap ke arah yang lebih sempurna akan dapat ditemukan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi demi terbitnya buku ini, dengan tanpa memperinci satu

persatu, diucapkan terimakasih, semoga jasa dan pengabdianya diberi ganjaran yang berlipat ganda oleh Yang Mahakuasa.

Akhirnya, kepada Allah kita berserah, semoga upaya ini diberkatinya, Amin. *Wallah al-Muwaffiq ila Aqwa al-Thariq.*

Medan, 7 September 2006

Penulis,

Dr. Pagar, M.Ag.

DAFTAR ISI

| | |
|------------------|----|
| PRAKATA | v |
| DAFTAR ISI | ix |

BAB I

| | |
|---|----|
| PERKAWINAN BERBEDA AGAMA | 1 |
| A. Pengertian Perkawinan Berbeda Agama .. | 1 |
| B. Sejarah Perkawinan Berbeda Agama | 32 |
| C. Ketentuan Perkawinan Berbeda Agama Sebelum Tahun 1974 | 47 |

BAB II

| | |
|--|----|
| PERKAWINAN BERBEDA AGAMA MENURUT BEBERAPA AGAMA | 56 |
| A. Perkawinan Berbeda Agama Menurut Islam | 56 |
| B. Perkawinan Berbeda Agama Menurut Katolik | 67 |
| C. Perkawinan Berbeda Agama Menurut Protestan | 73 |
| D. Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hindu | 77 |

| | |
|---|----|
| E. Perkawinan Berbeda Agama menurut Budha | 79 |
|---|----|

BAB III

PERKAWINAN BERBEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM

| | |
|---|-----|
| ISLAM | 81 |
| A. Sejarah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam | 81 |
| B. Perkawinan Berbeda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam | 93 |
| C. Analisis Terhadap Perkawinan Berbeda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam ... | 107 |

BAB IV

PERKAWINAN BERBEDA AGAMA MENURUT JARINGAN ISLAM LIBERAL

| | |
|---|-----|
| (JIL) INDONESIA | 121 |
| A. Jaringan Islam Liberal Indonesia | 121 |
| 1. Keorganisasian | 121 |
| 2. Pemikiran | 124 |
| 3. Program | 131 |
| B. Perkawinan Berbeda Agama Menurut JIL. | 134 |

BAB V

PERKAWINAN BERBEDA AGAMA MENURUT COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM 159 |

| | |
|---|--|
| A. Latarbelakang Lahirnya Counter Legal | |
|---|--|

| | |
|-------------|-----|
| Draft | 159 |
|-------------|-----|

| | |
|---|-----|
| B. Perkawinan Beda Agama Menurut Counter Legal Draft | 164 |
| C. Tanggapan Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Agama Counter Legal Draft..... | 175 |

| | |
|----------------------------|-----|
| DAFTAR BACAAN | 190 |
|----------------------------|-----|

BAB I

PERKAWINAN BERBEDA AGAMA

A. PENGERTIAN PERKAWINAN BERBEDA AGAMA

Sebelum menjelaskan pengertian perkawinan berbeda agama terlebih dahulu dijelaskan pengertian perkawinan sebagai berikut;

Perkawinan adalah kata berimbuhan yang berasal dari kata dasar kawin. Dalam bahasa Inggris disebut dengan "marry", dan "marriage". Selanjutnya dalam bahasa Belanda disebut dengan "trouwen", dan "hoewelijk".¹

Secara terminologis, banyak pengertian perkawinan di Indonesia, apalagi dihubungkan dengan agama-agama yang ada. Secara umum pengertian perkawinan itu dapat dikemukakan sebagai berikut:

¹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, (Semarang, Indonesia: Aneka Ilmu, 1977 M.), hlm. 433, 505-507.

1. Pengertian perkawinan menurut Islam

Dalam pemaknaan yang dikemukakan oleh Jumhur ulama, terutama Syafi'iyah dalam kesempatan ini dikemukakan definisi perkawinan menurut Jalaluddin sebagai akad yang terkandung di dalamnya pembolehan senggama dengan lafaz nikah atau kawin maka dianya (nikah) adalah *milik al-intifa'* bukan *milik al-manfaat*, hakikat nikah adalah akad, sedang wati adalah majaz.²

Ada dua stresing aspek yang menjadi penekanan dalam kajian ini, yaitu;

- a). Pencantuman kata senggama atau persetubuhan dalam definisi mengindikasikan bahwa dilangsungkannya perkawinan karena adanya motivasi diri yang kuat dari seseorang untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk melakukan senggama, karena tanpa melalui perkawinan yang sah hal itu tidak boleh dilangsungkan. Demikian banyak hal-hal yang dapat dicapai lewat perkawinan itu, mulai dari sesuatu yang bersifat fisik, maupun psikhis, bahkan sampai kepada sesuatu yang bersifat konsekwensi dari perkawinan itu sendiri, tapi semua itu tidak disebut kecuali pembolehan senggama, maka seolah-olah senggama itu merupakan aspek dominan dalam perkawinan itu. Bila hal ini ditelusuri secara seksama ternyata ada benarnya bahwa senggama itu adalah hal yang penting di dalam perkawinan,

² Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli, *Hasyiyatani*, Juz.3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 206. Dia adalah tergolong seorang dari fuqaha Syafi'iyah.

tetapi sikap eksklusifisme senggama dalam definisi nikah itu sendiri terasa telah membuat eksistensinya berlebihan dalam perkawinan. Senggama harus ditafsir hanya sebagai motivasi dalam melangsungkan dan melanggengkan perkawinan, tidak boleh ditempatkan sebagai tujuan perkawinan, karena bisa saja orang diberi kesempatan untuk melangsungkan perkawinan padahal mereka tidak melakukan senggama sama sekali, misalnya perkawinan kakek dan nenek karena sudah tua tidak memungkinkan mereka lagi untuk melangsungkannya, atau perkawinan lelaki yang impotensi dengan kesadaran dan persetujuan perempuan calon mempelai, maka hal itu tetap dapat dilaksanakan bila dengan hal itu mereka dapat bahagia.

- b). Perkawinan itu bukanlah pemilikan suami bagi isteri atau sebaliknya pemilikan isteri terhadap suami, tetapi hanya sekedar adanya pemilikan kesempatan untuk dapat menikmati senggama dan yang lainnya sesuatu dengan aturan agama, bukan pemilikan terhadap sesuatu yang dapat bersenggama dengannya (suami atau isteri) itu sendiri, karena kedua hal ini sangat jauh bedanya. Untuk yang pertama berarti kita hanya diberi kesempatan untuk menikmati senggama padanya, sedang untuk yang kedua ada kemungkinan di samping kita dapat menikmati senggama padanya, juga dapat memberi izin bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama atau yang lainnya sesuai tawar menawar yang disepakati, misalnya dengan melakukan transaksi sewa menyewa atau jual beli, atau pinjam meminjam, gadai, dan

lain sebagainya, lantas suami memberi kesempatan bagi orang lain untuk melakukan senggama dengan isterinya setelah memperoleh imbalan tersebut, karena memang hak transaksi itu ada pada dia karena dia ditempatkan sebagai pemilik isteri atau sebaliknya pemilik suami. Sungguh bijak Islam dalam kesempatan ini, lewat definisi tersebut, nikah hanya dimaknai dengan adanya pemilikan kesempatan bagi calon mempelai untuk dapat menikmati senggama saja.

Di sinilah letak perbedaan yang ada antara apa yang ada pada nikah dan perbudakan. Kalau pada nikah hanya pemilikan kesempatan senggama, tetapi pada perbudakan adalah melahirkan pemilikan terhadap budak itu sendiri, konsekwensinya, di samping dapat melakukan senggama dengan budaknya meskipun tanpa menikahnya terlebih dahulu sesuai dengan aturan pernikahan dengan orang lain yang merdeka, juga dapat menjualnya untuk mendapatkan uang, atau juga dapat mempekerjakannya pada tempat orang lain dengan mengambil gajinya, bahkan dapat menjanjikannya merdeka dengan tebusan, atau dengan perjanjian dengan mencantumkan syarat-syarat tertentu, atau waktu yang dijanjikan, dan lain sebagainya. Di samping hal ini dapat mengaktualisasikan ketinggian harkat dan martabat manusia itu dalam perkawinan, juga dapat menjamin kesucian perkawinan itu sendiri.

Berangkat dari hal ini terlihat bahwa dengan menempatkan makna nikah itu adalah akad, maka

nikah dipahami telah sempurna meskipun belum melakukan senggama. Segala konsekwensi logis dari nikah yang baru hanya diakadkan itu akan dicapai sepenuhnya sesuai aturan-aturan yang ada padanya. Misalnya; perkawinan melahirkan konsekwensi hukum waris, antara suami dan isteri saling mewarisi. Pernikahan melahirkan konsekwensi pembayaran mahar bila ternyata suami menceraikannya, atau suami meninggal dunia sebelum melakukan senggama. Hal ini sejalan dengan Firman Allah sebagai berikut;

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema`afkan atau dima`afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema`afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan".³ (QS. Al-Baqarah 237).

Selain dari nikah didefinisikan sebagai akad, juga dijumpai pendapat yang berbeda di kalangan fuqaha, terutama dari kalangan Hanafiah yang mendefinisikan nikah itu dengan makna *wathi* (senggama). Pendapat ini mempertegas bahwa hakikat nikah itu adalah

³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 1989), hlm. 58.

senggama, sedang wati hanya ditempatkan sebagai *majaz* (kiasan).

Pemaknaan nikah dengan senggama ini membuat kedua makna ini menjadi identik. Orang yang hanya akad nikah semata sesungguhnya belum nikah sungguhan, sebaliknya yang tidak lewat upacara akad nikah terlebih dahulu tetapi ternyata sudah melakukan senggama maka dia sudah dinyatakan dengan nikah. Nikah dalam makna ini menempatkan aplikasi perilaku pernikahan itu lebih utama ketimbang ucapan belaka dengan tanpa menghubungkannya terhadap makna nikah yang sesungguhnya.

Bila makna nikah dalam arti senggama ini dikedepankan, dengan mengabaikan makna nikah dalam arti akad maka akan dapat melahirkan berbagai kajian, di antaranya;

Hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berakibat hamil, dan melahirkannya si perempuan tersebut, maka anak yang lahir tersebut memiliki nasab yang secara tegas dapat dihubungkan kepada kedua orang tuanya, yaitu si laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan suami isteri itu. Mengingat nikah dimaknai dengan senggama, berhubungan mereka ternyata telah melakukan senggama lalu mereka telah dipahami melakukan pernikahan, maka bila ternyata mereka memperoleh keturunan dari hal itu maka si anak tersebut adalah anak mereka berdua, dan nasab anak itu dihubungkan kepada mereka berdua. Hubungan nasab dalam hal ini memiliki konsekuensi hukum bermuhrim, artinya haram dinikahi, karena

menikahi anak sendiri haram hukumnya dalam Islam. Hal ini sejalan dengan Firman Allah sebagai berikut;

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,"⁴ (QS an-Nisa` ayat 23).

Berbeda halnya dengan pendapat Jumhur ulama, terutama Syafi'iyah seperti dikemukakan di atas, mereka berpendapat bahwa anak yang lahir dari akibat hubungan seksualitas di luar akad nikah yang sah maka anak itu dihukumkan dengan anak zina. Menyangkut ketentuan hukum nasab anak zina hanya dihubungkan kepada ibunya, sedangkan ayahnya tidak sama sekali,

⁴ Ibid., hlm. 120.

karena memang anak zina itu tidak mempunyai ayah, meskipun diketahui siapa sebenarnya yang menjadi pemilik dari benih yang mengakibatkan si anak tersebut lahir, benih yang ditaburnya itu tidak dihargai, karena ditaburnya di tempat yang tidak boleh untuk ditaburkannya (belum nikah), dengan demikian anak tersebut bukanlah anaknya. Karena anak zina itu bukan anak dari seseorang laki-laki sama sekali, termasuk pemilik benih itu sendiri, maka dia tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki. Konsekwensi logisnya tidak ada laki-laki yang dilarang baginya untuk menikah selain dari orang yang terkait dengan nasab ibunya, termasuk bapaknya dalam arti pemilik benih yang mengakibatkan kelahirannya, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seorang bapak boleh menikahi anak zinanya sendiri sebagaimana halnya boleh bagi orang lain. Demikianlah pendapat yang dikembangkan dalam hal ini.

Demikian juga dengan konsekwensi hukum lain terhadap pernikahan yang dimaknai oleh kedua kelompok seperti dikemukakan di atas, dihubungkan kepada hukum menikahi perempuan yang pernah dinikahi ayah sendiri (menikahi ibu tiri). Prilaku menikahi perempuan yang sudah pernah dinikahi bapak sendiri adalah haram hukumnya, karena ini merupakan larangan nash yang secara tegas difirmankan oleh Allah SWT. sebagai berikut;

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan

*dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."*⁵ (QS. Al-Baqarah ayat 22).

Mengingat makna nikah itu menurut Jumhur ulama, termasuk Syafi'iyah adalah akad, maka setiap perempuan yang sudah pernah dinikahkan dalam arti diadakan kepada bapak sendiri, kemudian ternyata perempuan itu telah pisah dengan bapak tersebut maka haram hukumnya menikahi perempuan tersebut bagi si anak (haram hukumnya menikahi ibu tiri), meskipun si ayah sama sekali belum pernah menggaulinya, karena makna nikah itu telah sempurna dengan akad semata.

Berbeda halnya dengan pendapat Hanafiyah terhadap ibu tiri yang hanya pernah nikah dengan bapak dalam arti akad nikah semata, sedang mereka belum pernah melakukan hubungan senggama, maka hal itu dipahami belum nikah, karena hakikat nikah itu adalah senggama, konsekwensinya, bagi anak tiri tetap terbuka hukum boleh menikahi ibu tirinya tersebut, karena ibu tirinya tersebut belum dipahami sebagai ibu tiri, tetapi masih tetap sebagai orang lain. Hal ini dapat dikiaskan kepada aspek lainnya dari rentetan hukum perkawinan yang ada, misalnya penentuan hukum kewarisan, perwalian, penentuan nasab, dan lain sebagainya.

Hal krusial dari pengertian perkawinan menurut Hanafiah ini terlihat pada pemaknaannya terhadap senggama. Mengidentikkan senggama dengan nikah

⁵ Ibid.

itu terkadang dipahami terlalu berlebihan, di samping banyaknya hal-hal lain yang lebih penting dalam perkawinan itu selain dari sekedar senggama semata, juga memiliki kelemahan pada pernikahan orang yang tidak menempatkan senggama sebagai hal utama, baik karena tujuannya tidak dibuat seperti itu, atau pun karena memang mereka tidak bisa melakukannya, misalnya perkawinan kakek dan nenek, dan contoh lain sepereti telah dikemukakan, di mana aspek senggama dalam perkawinan itu tidak mungkin lagi dilaksanakan, lantas apakah kita dapat mengatakan bahwa mereka itu tidak boleh nikah, atau kalau mereka tetap melangsungkannya, lalu kita tetap bertahan dengan mengatakan bahwa mereka itu bukan nikah. Pertanyaan seperti ini tentu akan agak sulit dijawab oleh kelompok Hanafiah, dan dipahami berupa kelemahan dari pengertian yang dikembangkan, karena dalam Islam tidak pernah ada larangan perkawinan orang-orang seperti dikemukakan tadi.

2. Pengertian perkawinan menurut Kristen Katolik

Menurut Kristen Katolik perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali.⁶

Agama Katolik menganggap nikah sebagai satu

⁶ Al-Budyapranata pr., *Membangun Keluarga Kristiani*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986 M.), hlm. 14.

sakramen. Gereja Katolik menandakan ajarannya itu pada Efesus 5:25-33.⁷

Dalam Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Paulus mengumpamakan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita itu sebagai hubungan antara Kristus dengan Jemaatnya. Gereja Katolik Roma menafsirkan ayat-ayat tersebut sedemikian rupa, sehingga kesatuan nikah menurut gereja "diangkat secara mistik menjadi satu lambang perhubungan antara Kristus dengan gereja". Menurut Gereja Katolik, jika nikah itu diteguhkan oleh gereja maka nikah akan masuk ke "tata tertib alam atas". Nikah yang diteguhkan oleh gereja "termasuk perbuatan-perbuatan gerejani, dengan perbuatan-perbuatan itu kita memperoleh anugrah Kristus yang menyelamatkan". Dengan demikian ikatan cinta kasih suami isteri diangkat ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu ke dalam cinta kasih ilahi. Artinya Kristus sendiri membuat perkawinan itu menjadi sarana bagi penyaluran cinta kasih ilahi.

Dari pandangan tersebut di atas maka wajarlah bila gereja Katolik merumuskan perkawinan sebagai : ikatan cinta mesra dan hidup bersama yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dilindungi oleh hukum-hukumNya (Gadium et Spes, 48).

Hukum Gereja katolik merumuskan perkawinan sebagai; Perjanjian perkawinan, dengan mana pria dan

⁷ J.Verkuyl, *Etika Kristen (Seksuil)*, (Jakarta : Gunung Mulia, Cet. Ke-8, 1984), hlm. 56.

wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami isteri serta pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen (Kan 1055:1). Dari hal tersebut terlihat bahwa perkawinan menurut agama Katolik bersifat monogami, dan sakramental.

Jadi perkawinan menurut agama Kristen Katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami isteri, tetapi juga merupakan sarana memperoleh dan berkesinambungannya cinta dan kasih Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Karenanya perkawinan menurut mereka ini adalah untuk selamanya.

Perkawinan dalam pengertian ini terlihat memberikan penekanan yang lebih tinggi pada kesakralannya ketimbang perdatanya. Adanya cinta kasih yang total dalam perkawinan itu, tercermin dari calon suami, dan isteri, ditambah dengan keikutsertaan Tuhan di dalamnya, ternyata telah membuat perkawinan itu dalam bentuk yang sangat ideal, bahkan mungkin dapat dikatakan utopis, karena sangat sulit untuk diaplikasikan, dan diwujudkan.

Bagaimana mungkin bisa tercapai adanya cinta kasih yang total bagi mempelai dengan melibatkan aspek agama sebagai kesakralan yang tidak dapat diukur lagi batas akhirnya, sementara kita ini hidup di dunia, di mana kita masih memiliki cinta dan kasih terhadap lingkungan dan alam sekitar sebagai tempat berbagi rasa dalam dunia dan alam yang plural dan multi

dimensional ini. Dengan demikian dipahami pen-
definisian perkawinan dalam bentuk ini sangat muluk-
muluk.

Adanya keikutsertaan Tuhan di dalam perkawinan itu, di mana dipahami dia menjadi sesuatu yang sangat sakral, juga sekaligus kesakralan itu telah bergulir menjadi sempurna menelan habis hak keperdataan pihak mempelai untuk tidak dapat lagi menggunakan hak cerai sampai kapan pun di belakang hari, karena hak Tuhan dalam mempersatukan keduanya telah mendominasi di dalamnya. Meskipun pada mulanya pihak mempelai memiliki hak keperdataan yang kokoh pada dirinya untuk melaksanakan perkawinan itu lebih dari pada hak yang dimiliki Tuhan sama sekali, karena terkait erat dengan kesediaan mereka berdua untuk menikah atau tidak menikah dengan seorang yang menjadi idamannya dengan tanpa ada yang dapat memak-sanya sama sekali, namun ternyata setelah perkawinan itu dilangsungkan, masing-masing mempelai telah menyerahkan hak keperdataannya itu sepenuhnya kepada Tuhan, lalu agama mendominasinya, hak keperdataan mempelai pun hilang, dan sempurna kesakralannya. Dengan demikian tidak ada lagi jalan bagi mereka untuk melakukan perceraian, karena keinginan agama demikian.

Terlihat ada keinginan mencantumkan bentuk per-
kawinan itu dalam bentuk yang sangat ideal kendatipun
sulit untuk diwujudkan, namun karena sudah dipahami
sebelumnya tentang hal itu maka walaupun tidak dapat
dijangkau sama sekali seperti yang direncanakan, men-

dekati sajapun telah memadai, atau mungkin ini hanya dijadikan sebagai harapan, sehingga masing-masing dari manusia itu senantiasa berupaya berbuat yang terbaik secara maksimal untuk tercapainya perkawinan yang ideal seperti yang diinginkan dalam pengertian perkawinan tersebut.

Salah satu kelemahan dari definisi perkawinan ini adalah terlihat pada tidak bolehnya memisahkan pasangan suami isteri yang sudah dipertemukan Tuhan. Akan sangat terasa bila mana suatu saat indahnya perkawinan itu dengan cinta kasih yang total sesuai konsep idealnya, ternyata tidak sepenuhnya dirasakan lagi oleh kedua belah pihak mempelai itu sendiri, atau dalam yang lebih parah dapat diilustrasikan dengan bukannya cinta kasih lagi yang mengalir, tetapi sebaliknya, justeru pertengkaran, dan perselisihan yang tak dapat diselesaikan dan didamaikan yang senantiasa bermunculan dan terasa, dalam istilah lain perkawinan itu bukannya terasa sebagai sorga dunia lagi tetapi sudah menjadi neraka dunia di satu sisi, sementara pada sisi yang lain telah hilang hak keperdataan kedua mempelai untuk menarik kembali perikatan suci yang sudah pernah dilakukannya, maka pada saat inilah mereka mengalami jalan buntu, mereka tidak punya solusi lagi sama sekali. Kondisi seperti ini membuka peluang munculnya perilaku lain negatif yang bisa saja berakibat lebih peran dari pada sekedar memisahkan mereka sehingga mereka lebih mampu untuk berkaca dan berinstropeksi diri. Kondisi seperti ini bisa saja muncul pada intern kedua mempelai itu, misalnya dalam wujud perkelahian, dan

penganiayaan, atau pada luar diri mereka, misalnya keinginan untuk menyalurkan aspek biologis di luar ketentuan yang ada, sehingga dipahami bahwa hal ini berdampak pada meluasnya prostitusi, dan aspek-aspek negatif yang menjadi turunannya.

3. Pengertian perkawinan menurut agama Protestan

Perkawinan menurut agama Protestan adalah suatu persekutuan hidup dan percaya yang total eksklusif dan kontinyu antara seorang pria dengan seorang wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh Kristus Yesus.⁸

Sejalan dengan adanya dasar keimanan dan ibadah yang sama antara agama Katolik dengan agama Protestan, yaitu percaya kepada asas Tritunggal; Allah Bapak, Allah Anak, dan Roh kudus yang didasarkan kepada ajaran yang tertuang dalam Alkitab maka dalam banyak hal mereka memiliki persamaan, termasuk soal perkawinan.

Di atas persamaan yang mereka miliki, ternyata khusus menyangkut ketentuan perkawinan mereka memiliki tafsiran-tafsiran yang beberapa, terutama pada penentuan status perkawinan itu sendiri, yaitu Agama Kristen Katolik memandang perkawinan itu sebagai sakramen, sedang Agama Protestan memandangnya tidak sebagai sakramen.

Agama Protestan melihat bahwa perkawinan

⁸ J.L. CH. Abineno, *Manusia, Suami & Isteri, Perkawinan & Keluarga*, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1982), hlm. 28-40.

adalah sebagai suatu peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan, dalam bahasa lain diungkapkan bahwa perkawinan adalah tata tertib suci yang ditetapkan Tuhan. Hal ini terlihat dalam Firman Tuhan sebagai berikut;

"Tidak baik kalau kamu itu seorang diri saja. Aku akan jadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia". (Kejadian 2:18).

"... dibangunNyalah seorang perempuan, lalu dibawaNya kepada manusia itu". (Kejadian 2:22).

"Lalu berkatalah manusia itu : Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku ...". (Kejadian 2:23).

"Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging". (Kejadian 2:24).

Berpegang kepada firman Tuhan tersebut, Umat Protestan menafsirkan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sejak semula telah diciptakan Tuhan sesuai dengan kehendakNya. Agama Protestan tidak memandang pernikahan yang diteguhkan oleh Gereja sebagai suatu sakramen. Nikah bagi mereka tetaplah sebagai alam kehidupan yang diciptakan. Kemudian Injil bagi pernikahan itu bukanlah berupa pengangkatan pernikahan itu ke alam atas (sakramen), tetapi kepada kasih Kristus yang menguduskan kehidupan kelamin dan pergaulan hidup pernikahan itu.

Lewat uraian tersebut terlihat bahwa agama Protestan tidak menempatkan perkawinan dalam kesakralan yang seutuhnya. Umat Protestan menafsir bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sejak semula telah diciptakan Tuhan sesuai dengan kehendakNya. Agama protestan tidak memandang pernikahan yang diteguhkan oleh Gereja sebagai suatu sakramen. Nikah bagi mereka tetaplah termasuk sebagai alam kehidupan yang diciptakan. Kemudian Injil bagi pernikahan itu bukanlah berupa pengangkatan pernikahan itu ke alam atas (sakramen), tetapi pada kasih Kristus yang menguduskan kehidupan kelamin dan pergaulan hidup pernikahan.

4. Pengertian Perkawinan menurut agama Hindu;

Perkawinan (*wiwaha*) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka Put, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda 'Smrti. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah.⁹

Agama Hindu memandang perkawinan sebagai suatu yang suci. Perkawinan adalah samskara (sakramen)

⁹ G. Puja, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu (Didasarkan Manusmriti)*, (Jakarta: Dirjen Bimas Hindu & Budha Depag., 1974 M.), hlm. 9.

dan termasuk salah satu dari sekian banyak sakramen sejak proses kelahiran (gharbadana) sampai proses upacara kematian (Antyasti). Perkawinan diartikan sebagai "yajna", orang yang tidak kawin adalah orang yang tanpa yajna.

Berdasarkan Manusmreti (Manudharmasastra), perkawinan umat Hindu itu bersifat religius dan obligator (mengikat), hal ini dihubungkan dengan adanya kewajiban bagi seorang untuk mempunyai keturunan laki-laki (purusa/putrika) agar anak tersebut dapat menyelamatkan orang tuanya dari Neraka Put. Jadi perkawinan menurut agama Hindu hukumnya adalah wajib.

Dari pengertian perkawinan menurut agama hindu tersebut, tercermin asas perkawinan seabagai berikut;

- a) Asas monogami dan poligami
- b) Asas kesepakatan bersama
- c) Asas sahnya perkawinan melalui hukum agama, yaitu melalui prosedur wiwaha samskara atau wiwaha homa.

4. Pengertian perkawinan menurut agama Budha

Menurut agama Budha; Sesuai dengan hukum perkawinan agama Budha (HPAB) Keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 pada pasal 1 dikatakan;

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri yang berdasarkan cinta kasih (*metta*) kasih sayang (*karuna*), dan rasa sepenanggungan (*mudita*) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia

yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha/ Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, dan para Bodhisatwa – Mahasatwa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan agama Budha Indonesia.

Berbeda halnya dengan pengertian yang dikemukakan di dalam nasehat perkawinan agama Budha dinyatakan bahwa;

Perkawinan adalah suatu ikatan suci yang harus dijalani dengan cinta dan kasih sayang seperti yang diajarkan oleh Budha, atau ikatan lahir dan batin dari dua orang yang berbeda kelamin, yang hidup bersama untuk selamanya dan bersama-sama melaksanakan Dharma Vinaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang ini dan kehidupan yang akan datang.¹⁰

Sebagaimana halnya dalam agama Katolik, dalam agama Budha pun terlihat perkawinan itu adalah untuk selamanya, karenanya mereka tidak mengenal istilah perceraian.

Sedemikian rupa telah dikemukakan aturan perkawinan menurut agama Budha, sesungguhnya semua itu hanyalah berupa pendapat dan isyarat yang dapat diambil dari norma-norma yang ada, secara tekstual sebenarnya tidak ada ajaran yang mengatur tentang

¹⁰ Krishnanda W. Mukti, *Nasehat Perkawinan Agama Budha dan Pendidikan Kependudukan Keluarga Berencana Dalam Agama Budha*, (Jakarta: Departemen Agama RI., dan BKKBN, 1983), hlm. 15, dan 78.

perkawinan tersebut. Hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut;

Budha mengajarkan kepada umatnya supaya menjauhi hidup segala kekotoran duniawi, segala kekotoran nafsu badani, agar manusia dapat terlepas dari penderitaan hidup tumimbal lahir.

Perkawinan sebagai salah satu aspek hidup akan selalu dicengkeram oleh duka, dan dalam suatu perkawinan, kebahagiaan yang diperoleh adalah kebahagiaan yang bersifat duniawi (lokiya) sedangkan kebahagiaan tertinggi adalah nirwana (nibbana) yang untuk mencapainya diperlukan pepadaman semua kekotoran batin, termasuk nafsu seks.

Corneles Wowor mengatakan bahwa Budha tidak melengkapi ajarannya bagi umatnya dengan hukum perkawinan kemungkinan karena Budha Dharma itu lahir dalam keadaan negara yang sudah maju, sehingga Budha tidak memandang perlu lagi melengkapi ajarannya dengan hukum perkawinan.

Krishnanda W. Mukti dalam buku Nasehat perkawinan Agama Budha menyatakan bahwa dalam kitab suci Tripitaka (Tipitaka) tidak dibahas tentang aturan tata cara perkawinan, tetapi ajaran sang Budha menekankan hubungan pria dan wanita dalam lembaga perkawinan yang memungkinkan mereka dapat membina hidup bersama dengan rukun dan serasi di dalam keluarga bahagia dan sejahtera.

5. Perkawinan menurut hukum Nasional

Perkawinan menurut pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

Pengertian ini terlihat mengakumulasi makna perkawinan sebagai aktivitas perdata sekaligus dengan hukum agama. Ikatan lahir tercermin sebagai manifestasi dari peristiwa perdata yang dilaksanakan seseorang dengan orang lain atas suatu persetujuan tertentu dilandasi kesepakatan bersama. Mengingat hal ini ikatan lahir maka akan ada kejelasan perikatan tentang sesuatu yang dapat diukur, sifatnya konkrit, karenanya hal ini lebih bersifat keduniaan semata, misalnya diperamakan dengan peristiwa jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya.¹² Kemudian, ikatan batin sebagai

¹¹ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 1995 M.), hlm. 33.

¹² Pengertian seperti dianut oleh Hukum Perdata, termasuk Hukum Perdata Indonesia sebelum tahun 1974. Hal ini terlihat dari maksud pasal 26 KUH Perdata di mana Undang Undang memandang soal perkawinan hanya urusan perdata semata. Dalam pasal 81, dan 82 KUH Perdata dinyatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh dilangsungkan sehubungan dengan adanya perkawinan selama kedua belah pihak belum dapat menunjukkan bukti tentang perkawinan telah dilaksanakan dihadapan petugas catatan sipil, dan bila hal ini diabaikan maka hal itu dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana yang

aspek keagamaan, di mana ada aspek moral yang mesti dibangun di dalam perkawinan itu sesuai dengan keyakinan mempelai. Hal ini membuat kontrak yang ada dalam perkawinan itu tidak mesti diukur dengan aspek-aspek keduniaan, dan lewat pemaknaan inilah perkawinan itu menjadi ideal dan sakral. Perpaduan ikatan lahir dengan batin yang ada dalam pengertian perkawinan ini membuat perkawinan yang diinginkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 itu sangat muluk-muluk.

M. Yahya Harahap mengatakan, Barang siapa yang memperhatikan perkawinan ini, barangkali dia tidak akan menjumpai pengertian perkawinan yang demikian tinggi falsafahnya dalam negara moderen sekarang ini. Ikatan lahir dan batin itu menjadi dasar utama perkawinan yang di atasnya dibangun pilar-pilar lainnya, sehingga penjelasannya dapat diformulasi sebagai berikut;

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri.
- b. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin, dan tujuan kebahagiaan yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan yang Mahaesa.

Sungguh sangat ideal sekali tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Undang-Undang ini, dia tidak

diancam dengan sanksi hukum. Berbeda halnya dengan UU No.1 Tahun 1974 yang menjadi acuan hukum perkawinan secara Nasional sekarang ini yang menggabungkan antara ikatan keperdataan dengan ikatan keagamaan (batin).

hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahiriah saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan batin suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia.

Mengamati hal tersebut ternyata bangsa Indonesia telah merumuskan suatu pengertian perkawinan yang cukup ideal. Dikatakan demikian, paling tidak kita bisa menyorotinya dalam tiga hal, sebagai berikut;

- 1). Keharusan perkawinan itu sebagai perwujudan dari ikatan lahir batin. Pencantuman kata "batin" di sini membuat perkawinan yang hendak dicapai itu cukup muluk, di samping adanya ikatan lahir, juga mesti dibarengi dengan pertautan hati yang dalam dari calon mempelai. Berhubung ini berkenaan dengan kejiwaan maka sifatnya abstrak, sedang suatu yang abstrak tidak diketahui dengan pasti, dan tidak dapat diukur kecuali hanya sekedar gejala dan aplikasinya saja, maka sangat sulit untuk mengetahuinya secara pasti apakah benar telah tercipta ikatan batin tersebut.¹³ Dalam hal ini bisa saja seseorang berpenampilan, dan berpura-pura berada dalam kondisi ikatan

¹³ Berbeda halnya dengan apa yang ada di negara lain, di antaranya ada yang membuat pengertian perkawinan itu dalam aspek ikatan lahiriyah semata, misalnya dalam Hukum Barat Amerika mengatakan; *Marriage is a form of contract* (perkawinan adalah suatu bentuk dari kontrak), sedang yang mereka maksud dengan kontrak di sini adalah calon suami, calon isteri, dan negara., Acthur P. Crabtree, *You and the Law*, (New York: Halt Rinehart and Wiston Inc., t.t.), hlm. 139.

batin yang sepenuhnya, padahal sesungguhnya hanya dialah dan Tuhan yang mengetahuinya, sedang petugas yang diberi amanah untuk memeriksa dan menyeleksi perkawinan yang akan dilangsungkan itu bisa saja tertipu dengan aplikasi yang diperlihatkan, lantas dengan hal itu dia mengambil sikap, umpamanya melangsungkan perkawinan tersebut, dalam keadaan seperti inilah seorang petugas itu sesungguhnya bisa tersalah, karena tidak ada jaminan pasti tentang telah adanya ikatan batin di antara calon mempelai, kecuali hanya sekedar mempedomani apa yang mereka ucapkan, dan lakonkan.

- 2). Adanya kalimat "untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal". Kata bahagia itu berkenaan dengan nilai, karenanya memiliki sifat yang relatif, dan ini tertuju kepada subjek (pelaku) perkawinan itu sendiri, maka mungkin saja muncul pertanyaan tentang kebahagiaan macam apa yang diinginkan tujuan perkawinan tersebut. Kemudian dapat ditambahkan lagi bahwa dalam perkawinan yang akan dilangsungkan itu sudah terlihat prospek akan bahagia dan kekal, karenanya muncul pemikiran bahwa bila telah terlihat gambaran yang jelas tentang (terprediksi) bahwa rumah tangga yang akan dibina itu tidak bahagia, dan sifatnya sementara karena akan berakhir dengan perceraian maka tidak boleh dilangsungkan.

Dengan pemahaman seperti dikemukakan di ataslah maka sesungguhnya kawin paksa, meskipun oleh kedua orang tua mereka tidak diperkenankan di

Indonesia ini. Perkawinan itu harus di dasarkan atas kerelaan masing-masing pihak mempelai, di mana dipahami bahwa kerelaan itu sebagai bukti konkrit tentang adanya harapan mempelai tentang kehidupan berumah tangga yang akan mereka bangun itu akan beroleh kebahagiaan, paling tidak ada harapan bahwa mereka akan hidup bahagia. Selagi perkawinan itu dimulai saja dengan kerelaan kedua belah pihak, dalam kenyataan perjalanan perkawinan itu bisa saja tidak beroleh kebahagiaan, apalagi didasarkan kepada perkawinan paksaan.

Demikian juga halnya dengan kawin kontrak (nikah mut'ah), sesungguhnya secara nyata-nyata tidak diperkenankan di Indonesia ini, karena sifat kesementaraannya tersebut. Hal seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan ideal yang diharapkan di dalam perkawinan itu. Yang penting, perkawinan yang dibangun itu harus direncanakan, dan dipersiapkan untuk selamanya, tetapi kalau ternyata di pertengahan jalan ada kendala, dan rintangan yang menjadi penghalang, sehingga dipahami bahwa perkawinan mereka itu tidak dapat dilanjutkan lagi, maka apa boleh buat, untuk hal seperti ini akan diserahkan kepada hakim untuk menilainya, tegasnya, sejak dari awal para pihak mempelai harus merencanakan perkawinan yang kekal, dan bahagia.

- 3). Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini membuat perkawinan itu menjadi sakral, karena secara langsung menghubungkannya kepada sila pertama Pancasila tentang ketuhanan. Pemahaman-

nya adalah perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriyah/ jasmani, tetapi juga batiniyah/ rohani.¹⁴ Dengan demikian terlihat bahwa untuk mewujudkan perkawinan seperti diinginkan oleh pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut tidaklah mudah.

Dalam bentuk yang lebih konkrit dapat disarikan bahwa perkawinan itu mempunyai 6 (enam) asas atau prinsip sebagai berikut:

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- 2) Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 3) Perkawinan itu menganut asas monogami.
- 4) Calon suami isteri itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan,
- 5) Mempersukar terjadinya perceraian,
- 6) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami,¹⁵

¹⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1991 M.), hlm. 9. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, lihat, Pagar, hlm. 54.

¹⁵ Hal ini dinyatakan dalam penjelasan umum UU No.1 Tahun 1974, Pagar, *ibid.*, hlm. 53-54.

6. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Terakhir Kompilasi hukum Islam mengemukakan dalam pasal 2-nya dinyatakan; Perkawinan menurut agama Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶

Dengan memperhatikan pengertian menurut Islam seperti telah dikemukakan di atas maka ternyata pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum itu mengakomodasi pendapat Jumhur ulama, termasuk di dalamnya Syafi'iyah, yang mengatakan bahwa perkawinan itu adalah "*akad*" (transaksi) bukan "*wathi*" (senggama). Karenanya, dengan adanya akad perkawinan akan adalah konsekwensi logis hukum perkawinan berikutnya seperti yang telah diungkapkan terdahulu.

Akad di sini juga dipertegas sebagai akad yang sangat kuat, artinya tidak sembarang akad, dan akad-akad pada umumnya yang bersifat rapuh. Ketangguhan akad ini menjadi modal bagi pihak mempelai untuk senantiasa komit menjaga hak dan kewajiban mereka secara konsisten sehingga keharmonisan, dan kebahagiaan rumah tangga itu dapat dicapai. Demikian juga dengan ketangguhan akad inilah mereka berpedoman

¹⁶ Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirbinbapera Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI., 1992/ 1993), hlm. 6.

untuk tidak ada keinginan melaksanakan perkawinan sementara, dan akan berusaha sekeras mungkin untuk mengatasi kendala perkawinan bila ternyata hal itu dijumpai, sehingga perkawinan yang kekal itu bisa tercapai.

Akad yang sangat kuat ini semata-mata dibuat sebagai ikatan suci untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Tidak ada kesepakatan lain yang mungkin untuk disisipkan dalam perkawinan itu sebagai kerjasama untuk maksiat kepada Allah SWT. Bila hal ini lebih dikontraskan lagi, maka dapat dipertegas tentang tidak mungkinnya membuat suatu perjanjian dalam rangka mengabaikan aspek agama, misalnya perkawinan di antara mereka dilaksanakan dengan perjanjian bahwa si wanita yang biasanya berjilbab itu harus senantiasa tampil di depan umum dengan tidak mengenakan jilbabnya. Hal ini jelas bukan dalam rangka mentaati Allah SWT. Karenanya tidak diperkenankan.

Dalam ungkapan yang konkrit dinyatakan bahwa perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam itu adalah merupakan bahagian dari "ibadah". Artinya, dengan melaksanakan perkawinan sekaligus telah melaksanakan ajaran agama, di mana bagi orang yang melaksanakannya dihitung sebagai ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya, dan di sana ada kebajikan. Dengan demikian jadilah perkawinan dalam pemahaman ini sebagai sesuatu yang sakral.

Terindikasi dari pemaknaan perkawinan ini termasuk dalam kategori ibadah maka nuansa yang dapat ditangkap adalah adanya ketentuan tentang masing-

masing pemeluk agama hanya beribadah secara sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan ajaran agamanya. Soal ibadah adalah aspek di mana manusia itu membangun hubungan horizontal dirinya sebagai makhluk dengan Khaliknya yang tidak bisa diganggu gugat, dan ditoleransikan sama sekali dengan agama lain, hal ini adalah berupa hak yang paling asasi dari manusia itu sendiri, yaitu hak kebebasan untuk beragama, dan menjalankan ajaran agamanya sesuai keyakinannya masing-masing. Dari hal ini saja seolah sudah memberi petunjuk untuk tidak bolehnya melakukan perkawinan dengan mereka yang tidak Islam.

Mengamati keseluruhan pengertian ini terlihat bahwa perkawinan itu adalah merupakan ikatan suci yang bukan hanya sekedar aktivitas dalam bentuknya yang propan tetapi juga sakral antara seorang pria dan seorang wanita dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Karenanya perkawinan itu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia tetapi juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya akan dikemukakan pengertian perkawinan berbeda agama, sebagai berikut;

Istilah berbeda agama dari judul Perkawinan Berbeda Agama adalah istilah penulis sendiri. Penulis membuat istilah ini karena mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam. Misalnya istilah perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din* dijumpai pada pasal 61 KHI¹⁷. Kemudian

¹⁷ Redaksi pasal 61 tersebut berbunyi; Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali

memadankan antara orang non muslim secara keseluruhan. Ini terdapat di dalam pasal 40, 44, dan 116 KHI.¹⁸ Dengan demikian terlihat bahwa pengertian perkawinan berbeda agama di sini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim baik pria maupun wanitanya dengan penganut agama lain (non muslim) secara keseluruhan, tanpa terkecuali pria dan wanitanya berasal dari agama yang mana. Misalnya perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan penganut agama Kristen Katolik, atau seorang muslim dengan seorang penganut agama Hindu, dan yang lainnya, sedang perkawinan non-muslim dengan non-muslim lainnya tidak dibicarakan oleh Kompilasi Hukum Islam. Misalnya perkawinan seorang penganut agama Kristen dengan Budha. Hal ini terjadi karena Kompilasi Hukum Islam hanyalah mengatur tentang ketentuan yang berlaku bagi orang Islam saja.

Berbeda halnya dengan istilah yang muncul sebelum tahun 1974 (UU No.1 Tahun 1974). Pada masa itu telah ada peraturan yang mengatur perkawinan berbeda agama dengan menyebut istilah "Perkawinan Campuran". Dalam pasal 1 Penetapan Raja tanggal 29 Desember

tidak sekufu karena *perbedaan agama* atau *ikhtilaf al-din.*, *ibid.*, hlm. 39.

¹⁸ Pasal 40 KHI menyebutkan; Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 116 menyebutkan; Perceraian dapat terjadi karena peralihan agama atau murtad, *ibid.*, hlm. 32, dan 58 - 59.

1896 No. 23 = Stbld. 1898 No. 158, dir. mengatakan; Yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Dengan demikian terlihat bahwa perkawinan berbeda agama dalam pengertian ini bukan hanya perkawinan antara orang Islam dengan non-muslim saja, tetapi juga termasuk perkawinan non-muslim dengan non muslim lainnya.

Adanya orang yang tunduk kepada hukum yang berbeda, di antaranya adalah karena adanya perbedaan agama yang mereka anut. Misalnya, penganut agama Islam akan tunduk kepada hukum yang berbeda dengan penganut agama Kristen.

Hilman hadikusuma mengatakan, perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing.¹⁹

Sebenarnya pengertian perkawinan campuran ini lebih umum lagi dari apa yang telah dikemukakan di atas, karena khasnya perkawinan campuran itu adalah adanya acuan hukum yang berbeda di mana suami isteri tunduk kepadanya. Paling tidak ada tiga sumber hukum yang hidup di Indonesia ini, yaitu; Hukum agama, Hukum adat, dan Hukum negara, maka terlihat aspek agama adalah merupakan bahagian dari padanya.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990 M.), hlm. 18.

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Perkawinan Campuran tersebut menyatakan; Perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukan menjadi halangan untuk perkawinan itu.²⁰

Sejalan dengan itu, istilah perkawinan campuran yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari-hari ialah perkawinan campuran karena perbedaan adat/suku bangsa yang bhinneka, atau karena perbedaan agama antar kedua insan yang akan melangsungkan perkawinan.

Mengamati hal ini terlihat bahwa perkawinan campuran yang dinyatakan oleh Stbld. 1898 No. 158 seperti dikemukakan di atas ternyata mempunyai makna yang lebih umum bila dibanding dengan istilah perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din* yang dinyatakan oleh Kompilasi Hukum Islam.

Sejalan dengan hal tersebut maka yang dimaksud dengan perkawinan berbeda agama di sini adalah sesuai dengan yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam atau sebagian dari maksud perkawinan campuran yang dinyatakan oleh Stbld. 1898 No. 158, yaitu khusus perkawinan seorang muslim dengan non-muslim.

B. SEJARAH PERKAWINAN BERBEDA AGAMA

Berbicara mengenai perkawinan berbeda agama di Indonesia ini ternyata kita mesti mengungkap infor-

²⁰ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), hlm. 208.

masi di masa silam dari masa yang cukup panjang, yaitu masa penjajahan, masa kemerdekaan, dan masa sesudah kemerdekaan. Karenanya dipahami dalam menentukan eksistensi perkawinan berbeda agama sekarang ini tidak terlepas dari pembicaraan perkawinan berbeda agama di masa silam.

Pada awalnya perkawinan berbeda agama berjalan liar tanpa pengaturan dari pemerintah Hindia Belanda, mungkin karena langkanya orang melakukannya, atau hal lain sehingga belum diperlukan pengaturan formal terhadapnya.

Dalam perkembangan selanjutnya mulai terasakan nuansa baru yang berbeda dengan apa yang ada sebelumnya. Hal itu sebagai berikut :

Pertama; Semakin mantapnya posisi pluralisme hukum, terutama hukum perdata (termasuk di dalamnya hukum perkawinan) di Indonesia.

Semakin kuatnya posisi kolonialis Belanda di Indonesia, secara serta merta turut berimplikasi terhadap semakin kuatnya posisi hukum yang mereka miliki di Indonesia ini, bahkan sikap pro aktif mereka untuk berperan dalam aspek pembangunan hukum di Indonesia, di mana di dalamnya terdapat pluralitas suku bangsa penduduk yang berada di dalamnya. Sejalan dengan ini, kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Belanda adalah sebagai berikut:

Hukum perdata yang berlaku pada zaman Hindia Belanda ditentukan oleh Pasal 131 Indische Statsregeling (IS) dan pasal 163 IS yang merupakan pedoman politik

bagi Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum yang ada di Indonesia. Pokok-pokok dari pasal 131 IS, sebelum itu pasal 75 *Regelings-reglement* (RR), menurut Prof. Subekti, adalah sebagai berikut;

- 1). Hukum Perdata dan dagang (begitu pula hukum pidana beserta hukum acara perdata dan pidana) harus diletakkan dalam Kitab Undang Undang, yaitu di "kodifisir".
- 2). Untuk golongan bangsa Eropah harus dianut (di-contoh) perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas konkordansi).
- 3). Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (yaitu Tionghoa, Arab, dan sebagainya) jika ternyata bahwa "kebutuhan kemasyarakatan" mereka menghendaknya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropah "dinyatakan berlaku" bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama; untuk selainnya harus diindahkan peraturan-peraturan yang berlaku di kalangan mereka, dari aturan-aturan mana boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum, atau kebutuhan kemasyarakatan mereka (ayat 2).
- 4). Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropah, diperbolehkan "menundukkan diri" (*onder werpen*) pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropah, penundukan mana boleh dilakukan secara umum maupun secara hanya suatu perbuatan tertentu saja (ayat 4).

- 5). Sebelumnya hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam Undang-undang, maka bagi mereka itu akan tetap berlaku "hukum yang sekarang berlaku bagi mereka", yaitu "Hukum Adat" (ayat 6).²¹

Kedua, Kenyataan kehidupan umat manusia di tengah pluralitas penduduk, dan hukum yang mereka anut menunjukkan tentang ada saja pasangan yang membutuhkan perkawinan berbeda agama, dengan indikasi dijumpainya pasangan yang melakukan perkawinan berbeda agama tersebut.

Meskipun pada masa ini dijumpai perkawinan berbeda agama tersebut, namun sesungguhnya perkawinan mereka itu tidak memperoleh legitimasi hukum, apalagi aturan tentang penanganan bagaimana sesungguhnya perkawinan itu dilangsungkan dari Pemerintah yang sedang berkuasa, karena belum ada aturan yang jelas yang dapat dijadikan dasar terhadap perkawinan yang mereka lakukan. Status perkawinan berbeda agama yang dilangsungkan pada masa ini sedikit mengambang.

Realitas sosial ini dihubungkan dengan hak perlindungan hukum, serta kepastian hukum tentang perkawinan yang mereka langsunkan, bahkan terhadap rentetan hukum yang akan lahir berikutnya akibat dari perkawinan itu tentu membutuhkan aturan tersendiri. Dengan hal ini Pemerintah Belanda mengeluarkan Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No.23 = Stbld. 1898 No. 158 dir. dan dit. dg. Stbld. 1901/348,

²¹ Asmin, hlm. 2-3.

1902/311, 1907/205, 1918/30, 259, 160 dan 161 1919/81 dan 816, 1931/ 168 Jo. 423 tentang perkawinan campuran yang berlaku bagi seluruh lapisan golongan masyarakat yang ada.

Aturan tentang Perkawinan berbeda agama yang disebut dengan Perkawinan Campuran pada masa ini, ternyata mengakomodasi serta melegitimasi perkawinan berbeda agama itu. Artinya sejak tahun 1896 ini perkawinan berbeda agama dinyatakan memiliki eksistensi, dapat dilangsungkan, dan memperoleh pengaturan tersendiri. Konsekwensinya, perkawinan ini memiliki kekuatan hukum sama dengan perkawinan lainnya yang dilakukan dalam lingkup satu agama.

Meskipun tidak dengan terlebih dahulu mengamati kesadaran hukum masyarakat lewat hukum agama yang ada pada seluruh agama yang ada di Indonesia ini, ternyata Pemerintah Belanda memberanikan diri untuk melahirkan Stb. 1898 No. 158 tersebut, dan memfasilitasi penerapannya. Dengan demikian aturan tentang Perkawinan Campuran (perkawinan berbeda agama) ini berlaku pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, Jepang, bahkan sampai Indonesia merdeka.

Diketahui pada masa ini sampai tahun 1974 di Indonesia terdapat pluralitas hukum perkawinan, maksudnya adalah ada banyak peraturan hukum yang mengatur tentang perkawinan bagi orang yang ada di Indonesia, sehingga bisa saja terjadi masyarakat yang tunduk kepada hukum yang berbeda meskipun mereka satu tempat tinggal. Secara umum perbedaan hukum perkawinan tersebut ada enam macam sebagai berikut;

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresifir ke dalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huweilijksordonnantie Christen Indonesia (S.1933 Nomor 74).
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga-negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropah dan warganegara Indonesia keturunan Eropah dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang Undang Hukum Perdata.²²

Berhubung banyaknya variasi hukum perkawinan tersebut, terkadang menimbulkan kesulitan yang cukup serius, terutama bila perikatan dengan perkawinan tersebut dijalin oleh pasangan yang berbeda anutan hukum, salah satu di antaranya karena berbeda agama. Kesulitan tersebut terjadi karena ada dua anutan hukum, padahal mereka hendak berada dalam satu perkawinan. Tentu hal ini menimbulkan kesulitan untuk menentukan hukum apa yang mau dijadikan pedoman.

²² Hal ini terdapat di dalam penjelasan umum UU No.1 Tahun 1974., Pagar, hlm. 52.

Bila salah seorang dari pasangan suami isteri itu rela mengalah untuk memberlakukan ketentuan hukum tertentu bagi mereka, dengan cara tunduk kepadanya, tentu tidak terlalu menimbulkan kesulitan, atau bila suatu peristiwa oleh kedua anutan hukum yang ada memandang penyelesaian hukum itu sama. Ternyata hal seperti itu tidak senantiasa dijumpai, karena banyak pasangan suami isteri itu yang tidak mau mengikut hukum pasangannya, atau hukum yang ada bagi kedua belah pihak ternyata berbeda, malah mungkin bertolak-belakang. Akhirnya hal ini akan menimbulkan permasalahan tersendiri.

Secara kuantitas variasi agama ini cukup dominan, karena secara umum orang yang ada di Indonesia ini adalah pengikut suatu agama, lebih dari itu mungkin tergolong fanatis. Ini tentu menambah seriusnya masalah yang ada.

Meskipun pada umumnya agama yang ada melarang perkawinan berbeda agama, tetapi realitasnya hal ini senantiasa saja dijumpai. Dengan demikian memang peristiwa itu terlihat membutuhkan penyelesaian tersendiri.

Asmin mengatakan bahwa pemerintah Belanda menciptakan peraturan tentang perkawinan campuran tersebut adalah dalam rangka memecahkan persoalan yang muncul akibat pluralitas hukum perkawinan yang ada, di mana orang sulit untuk menentukan hukum mana yang akan dianut bila ternyata calon mempelai tetap bertahan dengan anutan agamanya.²³

²³ Asmin, hlm. 55.

Meskipun Perkawinan Campuran dimaksudkan sebagai solusi oleh Pemerintah Belanda terhadap pluralitas hukum perkawinan yang ada di Indonesia, tetapi sesungguhnya hal itu tidaklah memadai, hal itu hanyalah secuil pengaturan khusus bagi mereka yang melakukan perkawinan berbeda agama, sedangkan Unifikasi hukum perkawinan secara Nasional masih sangat dibutuhkan, termasuk bagi mereka yang tidak menikah berbeda agama, maka tidaklah wajar memperlakukan perkawinan mereka di depan hukum secara berbeda karena perbedaan agama yang mereka anut. Karenanya diperlukan penanganan berikutnya.

Setelah dalam perjalanan yang cukup panjang, pluralitas hukum perkawinan ini berlangsung terus, kemudian dipertengahan jalan Perkawinan Campuran pun ikut menumpang di dalamnya, yaitu sejak masa pemerintahan Belanda sendiri, Jepang, dan Proklamasi kemerdekaan RI., sampai akhirnya pada tahun 1974. Perjalanan panjang pluralitas hukum perkawinan ini, sekaligus legitimasi terhadap Perkawinan Campuran, ternyata telah meninggalkan kesan mendalam bagi bangsa Indonesia, di samping menjadi aset sebagai sumber hukum dalam pembangunan hukum berikutnya, juga terkadang menjadi tempat berkaca tentang bagaimana hukum di masa silam. Karenanya, meskipun pada masa selanjutnya unifikasi hukum perkawinan di Indonesia dilaksanakan, namun bias hukum perkawinan di masa silam itu turut terasakan di dalamnya, bahkan perkawinan berbeda agama itu sampai sekarang ini masih eksis, dan berjalan terus di Indonesia ini.

Setelah Belanda kalah atas Jepang, peraturan ini tetap diberlakukan, karena dalam masa yang cukup singkat, yaitu sekitar tiga setengah tahun mereka berkuasa di Indonesia belum banyak yang dapat mereka lakukan, terutama dalam merubah peraturan perundang-undangan yang ada. Sesaat setelah Jepang berkuasa dia berhadapan dengan Sekutu, kondisi ini menciptakan ketidakstabilan, lalu mereka memberlakukan ketentuan hukum peralihan selama tidak bertentangan dengan kepentingan bala tentara Jepang, maka dengan ini peraturan perkawinan campuran termasuk di dalamnya.

Selanjutnya pada saat Indonesia merdeka juga diberlakukan pasal 37 aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi; Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini.²⁴

Sejalan dengan ini pada saat Indonesia merdeka, sebagaimana halnya peraturan dan perundang-undangan yang lain, termasuk di antaranya peraturan tentang perkawinan campuran turut diberlakukan. Sejak saat ini Negara Republik Indonesia memberlakukan peraturan perkawinan campuran. Hal ini berlangsung selama dua puluh sembilan tahun, tepatnya sampai pada tahun 1974 saat berlakunya UU Perkawinan Nasional No.1 Tahun 1974. Dengan demikian terlihat perkawinan campuran telah berlaku selama 76 tahun di Indonesia

²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, t.t.), hlm. 9.

ini, dengan perincian 47 tahun pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, dan 29 tahun setelah masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Dengan berlakunya UU No.1 tahun 1974, tekad bangsa Indonesia untuk menciptakan unifikasi hukum Perkawinan Nasional benar-benar telah direalisasikan, sekaligus membatalkan pluralitas hukum perkawinan yang ada, termasuk di dalamnya Stb. 1898 No. 158 tentang Perkawinan Campuran, karena pada pasal 66 UU No.1 Tahun 1974 tersebut berbunyi sebagai berikut:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huweilijks Ordonnantie Christen* Indonesia S. 1933 No. 74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwailijken* S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.²⁵

Anehnya, meskipun peraturan tentang perkawinan campuran telah dibatalkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, tapi Undang-Undang tersebut tidak pernah melarang perkawinan berbeda agama itu secara tegas.

²⁵ Pagar, hlm. 50.

Yang lebih aneh lagi peraturan perkawinan berbeda agama tidak dimuat di dalam Undang-Undang tersebut sebagai pengganti dari Stb. 1898 No. 158.²⁶ Akhirnya secara realitas perkawinan berbeda agama berlangsung terus, tapi tidak ada peraturan yang jelas yang dapat dijadikan sebagai pedoman terhadapnya, sehingga pakar hukum pun terlibat polemik dalam mem-bicarakannya.

Tidak dimuatnya pembicaraan perkawinan berbeda agama di dalam UU No.1 Tahun 1974 tersebut ternyata adalah sebuah solusi setelah macetnya perbincangan akan hal itu di DPR. Di satu sisi perkawinan berbeda agama ternyata tidak dapat dibendung di Indonesia ini, karena masih sangat banyak pasangan suami isteri yang membutuhkan dan melakukannya dengan tanpa mengindahkan ketentuan lain yang terkait dengannya, sementara di sisi yang lain tak ada satu agama pun di Indonesia ini yang membenarkan akan hal itu. Ternyata sikap mendiamkan hal itu (tidak dibicarakan) adalah merupakan tawar menawar yang paling dapat untuk diterima.

Di tengah panas, sulit dan alotnya mencari titik temu penanganan perkawinan berbeda agama ini di DPR saat perbincangan Rancangan UU No.1 Tahun 1974

²⁶ Undang-Undang ini tidak membicarakan perkawinan berbeda agama, namun ada memuat perkawinan campuran dengan istilah yang sama namun dalam maksud yang berbeda, karena perkawinan campuran di sini dimaksudkan adalah perkawinan yang berbeda kewarganegaraan sesuai dengan pasal 57-62 UU No. 1 Tahun 1974, *Ibid.*, hlm. 48-49.

tentang Perkawinan tersebut, secara umum telah muncul tiga macam pendapat, sebagai berikut;

- 1). Pendapat pertama; mengatakan bahwa perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dapat saja dilangsungkan sebagai pelaksanaan dari hak asasi manusia, dan kebebasan seseorang untuk menentukan pasangannya. Menurut pendapat ini, perkawinan yang demikian dapat mempergunakan S. 1898 No. 158 tentang Perkawinan Campuran peninggalan Belanda dulu, dan akan diawasi serta dicatat oleh Pegawai pencatat pada Kancor Catatan Sipil di tempat mereka melangsungkan perkawinan itu. Perbedaan agama menurut pendapat ini, tidak boleh menjadi penghalang bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Pegawai Catatan Sipil dalam hal ini tidak boleh menolak untuk mencatat perkawinan mereka, bahkan harus menerima dan mengawinkan mereka pasangan yang berbeda agama, di mana mereka sedang menyala api cintanya itu. Kelompok ini melihat bahwa, soal perkawinan adalah soal kehidupan dalam masyarakat di dunia ini, bukan masalah kehidupan di akhirat nanti. Oleh karena itu, soal perkawinan orang-orang berbeda agama, serahkan saja sepenuhnya kepada hukum hasil ciptaan manusia untuk mengaturnya. Untuk menyokong pendirian kelompok ini, mereka mengutip pendapat seorang Guru besar Belanda Prof W.L.G. Lemaire, Direktur Lembaga Dokumentasi Hukum Seberang Lautan (Seperti Indonesia masih menjadi negara bagian saja, MDA) Universitas Leiden yang mengatakan

bahwa "Tugas hukum adalah mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat, bukan mengatur kesejahteraan dan keselamatan di alam akhirat". Pandangan inilah yang terumus dalam Pasal 11 ayat (2) Rancangan Undang Undang Perkawinan 1973 dahulu, yang berbunyi; "Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan dan keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan". Hal ini secara tegas ditolak oleh, dan dikeluarkan dari UU Perkawinan Tahun 1974, karena tidak sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

- 2). Pendapat kedua; mengatakan bahwa UU No. 1 tahun 1974 tidak mengatur mengenai perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama, namun menurut pendapat ini, perkawinan antar pasangan yang berbeda agama adalah suatu kenyataan. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, sulit untuk mencegah adanya orang-orang berbeda agama yang saling jatuh cinta dan ingin menjalin hubungan dalam bentuk perkawinan (keluarga). Karenanya, menurut kelompok ini, perlu dirumuskan ketentuan hukumnya. Dari pada membiarkan kemaksiatan, lebih baik membenarkan atau mensahkan perkawinan orang-orang yang saling jatuh cinta itu, meskipun keyakinan agama yang mereka anut berbeda.

Pendapat ini dibantah dengan logika; Dilihat dari sudut ketakwaan kepada Tuhan Yana Mahaesa, yang menjadi syarat pengangkatan seseorang menjadi penyelenggara negara dalam negara Pancasila yang

salah satu kaidah fundamentalnya adalah Ketuhanan Yang Mahaesa, kita prihatin membaca kalau benar, ucapan Penyelenggara negara kita yang dimuat oleh surat-surat kabar itu. Sebab makna takwa yang berasal dari al-Qur'an itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi laranganNya, yaitu larangan Allah, Tuhan Yang Mahaesa. Tuhan Yang Mahaesa melalui wahyunya, dengan tegas melarang perkawinan wanita muslim dengan pria yang berbeda agama dengannya. Bagaimana mungkin pihak Penyelenggara negara, terutama yang muslim mempunyai kualifikasi bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa? padahal menghalalkan apa yang dengan tegas diharamkan oleh Tuhan yang Mahaesa?. Juga, Bagaimana mungkin seorang hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu dan memutuskan hal atau perkara "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa" membenarkan apa yang tidak dibenarkan oleh Tuhan Yang Mahaesa ?.

- 3). Pendapat ketiga; mengatakan bahwa perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama tidak dikehendaki oleh pembentuk Undang Undang, yaitu Pemerintah dan DPR Republik Indonesia. Kehendak itu antara lain dengan tegas dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) mengenai sahnya perkawinan tersebut di atas, dan pasal 8 huruf (f) mengenai Larangan Perkawinan. Dalam pasal 8 huruf (f) Undang Undang Perkawinan dengan jelas dirumuskan bahwa, "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan

yang berlaku dilarang kawin". Artinya, Undang-Undang perkawinan melarang dilangsungkan atau disahkan perkawinan yang dilarang oleh agama dan peraturan lain yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia. Larangan yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan ini selaras dengan larangan agama, dan hukum masing-masing agama yang dikemukakan di atas. Oleh karena itu pembenaran dan pengesahan perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama, selain dari bertentangan dengan agama atau hukum agama, sesungguhnya bertentangan pula dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia.

Demikian panasnya perbincangan ini di DPR, pada tahun 1973 akhirnya macet, dan buntu. Untuk mengatasi hal ini diadakanlah berbagai terobosan, antara lain melakukan lobbying untuk membahas RUU perkawinan tersebut di dalam dan di luar DPR. Akhirnya, suatu hal yang sangat berarti mengatasi kemacetan itu adalah adanya konsensus fraksi ABRI dengan fraksi Persatuan Pembangunan yang memberikan solusi sebagai tercantum pada poin-poin berikut;

- a). Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi, atau pun diubah.
- b). Sebagai konsekwensi dari pada poin a). di atas, maka alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi, atau diubah, tegasnya UU No.22 tahun 1946 dan UU No.14 tahun 1970 dijamin kelangsungannya.

c). Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam Undang-Undang ini dihilangkan (didrop).

d). Pasal 2 ayat (1) dari RUU ini disetujui untuk dirumuskan sebagai berikut;

Ayat (1) : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi Negara.

Ternyata konsensus inilah yang melapangkan jalan pembicaraan lebih lanjut mengenai materi RUU Perkawinan ini selanjutnya, akhirnya disetujui pula oleh fraksi-fraksi lain di DPR. Intinya adalah, semua ketentuan dalam RUU tersebut yang dipahami bertentangan dengan hukum perkawinan Islam, termasuk pembenaran perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama di mana sekarang ini sedang menjadi perbincangan kita, dihilangkan.²⁷

C. KETENTUAN PERKAWINAN BERBEDA AGAMA SEBELUM TAHUN 1974

Sejalan dengan maksud dikeluarkannya Stb. 1898 No. 158 tentang perkawinan campuran sebagai upaya

²⁷ Departemen Agama RI. *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta : al-Hikmah & Direktorat Badan Pembinaan Peradilan Agama Islam, No.5 Tahun III, 1992), hlm.73-75.

unifikasi dan penyelesaian masalah yang timbul akibat pluralitas hukum perkawinan dari calon mempelai yang berbeda agama, maka secara umum ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pengertian perkawinan campuran

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Stb. 1898 No. 158.

Berhubung faktor agama adalah hal yang sangat mendasar dan dominan membuat orang tunduk pada hukum yang berbeda maka perkawinan berbeda agama ini termasuk di dalamnya, malah sering orang mengatakan bahwa perkawinan campuran itu adalah aturan bagi orang yang menikah dengan perbedaan agama.

2. Acuan hukum bagi pelaku perkawinan campuran

Untuk menghindari terjadinya dualisme hukum maka ditentukan bahwa pihak isteri mesti tunduk kepada hukum yang dianut oleh suaminya selama perkawinan berlangsung, kecuali ada kesepakatan mereka untuk menentukan lain. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Stb. 1898 no. 158.

Sejalan dengan hal tersebut, seorang bisa kehilangan hak dan kewajiban terhadap suatu hukum pada suatu kesempatan, dan memperoleh hak dan kewajiban pada hukum baru pada kesempatan lain akibat terjadinya suatu

perkawinan. Apabila perkawinan putus, pihak isteri tetap tunduk kepada aturan hukum bekas suaminya, kecuali apabila masa telah berselang setahun, lalu ia menyatakan pendiriannya untuk kembali kepada anutan hukumnya semula. Bila dia menikah lagi kepada laki-laki lain maka dia kembali tunduk kepada hukum suaminya yang baru (suaminya yang ada pada saat itu).²⁸

Ketentuan aturan perkawinan campuran itu cenderung terlihat sebagai solusi terhadap pluralitas hukum perkawinan yang ada, di mana masing-masing mempelai memiliki aturan hukum yang berbeda padahal mereka hendak menyatu dalam satu rumah tangga. Dengan Stb 1898 No. 158 ini ada ketentuan yang memberi jalan keluar bagi mereka dari kemelut anutan hukum yang ada, sehingga kepastian dan keadilan hukum bagi perkawinan mereka yang berbeda agama ini tetap tercapai.

Bentuk solusi yang diberikan terlihat mengadopsi hukum yang dianut oleh suami, sekaligus adanya keharusan bagi isteri untuk melepaskan anutan hukum yang dipegangnya selama ini. Kerelaan seorang perempuan untuk menikah dalam perkawinan yang berbeda agama sekaligus terlihat sebagai kerelaan untuk

²⁸ Sebelum melangsungkan perkawinan pihak wanita dipahami telah rela dengan akibat hukum yang akan terjadi karena dia rela melangsungkan perkawinan tersebut., S. Chutama, *Hukum Antar Golongan (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Ichtiar Baru - Vanhoeve, Cet. Ke-5, 1980 M.), hlm. 128.

tunduk dan patuh secara suka rela dengan anutan hukum yang ada pada suaminya. Lewat pernikahan ini membuat suami isteri otomatis menundukkan diri pada satu hukum perkawinan saja.

Untuk lebih tegasnya aturan tentang Perkawinan Campuran yang ada di Indonesia ini yang dinyatakan berlakunya sejak tahun 1898 sampai tahun 1974 tersebut dinukilkan sebagai berikut;

PERATURAN TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN

Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. 23 = Stbld. 1898 No. 158 dir. dan dit. dg. Stbld. 1901/348, 1902/311, 1907/205, 1918/30, 259, 160 dan 161 1919/81 dan 816, 1931/168 Jo. 423 tentang perkawinan campuran.

Pasal 1;

Yang dimaksud perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.

Pasal 2;

Seorang perempuan (isteri) yang melakukan perkawinan campuran selama pernikahan itu belum putus, maka si perempuan (isteri) tunduk kepada hukum yang berlaku untuk suaminya, maupun hukum publik, maupun hukum sipil.

Pasal 3;

Kecuali dalam hal-hal yang tersebut pada pasal 4, seorang

perempuan yang melakukan perkawinan campuran, masih pula mempunyai kedudukan hukum yang didapatnya dari sebab perkawinan campuran itu atau sebagai akibat dari perkawinan campuran itu.

Pasal 4;

- (1) Menurut Hukum, si perempuan kehilangan kedudukan hukum dan dengan itu kehilangan pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperolehnya atau diberatkan kepadanya menurut hukum yang berlaku baginya dari sebab perkawinan campuran itu, jika ia sesudahnya mengalami putus perkawinan, lalu kawin lagi dengan lelaki yang tunduk kepada hukum yang berlainan dengan hukum yang berlaku bagi suami semula, atau apabila perempuan itu, dalam masa setahun sesudahnya putus perkawinan itu, memberi keterangan, bahwa ia ingin kembali kepada kedudukan hukum asal.
- (2) Karena keterangan itu, maka perempuan itu menurut hukum kembali kepada hukum asal sebelum ia melakukan perkawinan campuran.

Pasal 5;

Keterangan tersebut pada pasal 4 itu diberikan kepada Kepala Pemerintahan Daerah tempat kediaman perempuan itu. Keterangan itu dicatat dalam suatu daftar khusus diadakan untuk keperluan itu oleh pegawai tersebut, serta diumumkan dengan selekas mungkin dalam surat kabar resmi (Berita Negara).

Pasal 6;

- (1) Perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum

- yang berlaku untuk si suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang selalu harus ada.
- (2) Jika menurut hukum yang berlaku untuk si lelaki tidak ada seorang yang ditentukan untuk mengawasi atau diwajibkan melangsungkan pernikahan itu, maka pernikahan itu dilangsungkan oleh Kepala golongan si lelaki atau wakilnya dan jika Kepala itu tidak ada, maka diawasi oleh Kepala Kampung atau Kepala Desa, di mana perkawinan itu dijalankan.
 - (3) Jika hukum itu (yang berlaku untuk si lelaki) tidak mengharuskan, bahwa perkawinan itu dibuktikan dengan surat nikah, maka orang yang mengadakan perkawinan campuran, atau dibawah pengawasan mana perkawinan itu dilangsungkan, wajib membuat surat nikah menurut model yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal.
 - (4) Jika orang tersebut tidak dapat menulis, maka surat nikah harus ditulis seorang yang ditunjuk untuk itu oleh Kepala Pemerintah Daerah.
 - (5) Jika untuk si perempuan berlaku hukum keluarga Eropah (*Europeesch Familierecht*) sedang untuk si lelaki tidak, maka orang yang mengawinkan atau mengawasi perakawinan itu, harus mengirimkan surat nikah itu kepada Pegawai Pencatatan Sipil untuk bangsa Eropah dan bangsa yang disamakan dengan bangsa Eropah, di daerah di mana perkawinan itu dijalankan, dalam masa yang akan ditetapkan oleh ordonansi. Surat nikah itu oleh pegawai tersebut dicatat dalam suatu buku pendaftaran, yang

disediakan khusus untuk keperluan itu, serta disimpan olehnya.

Pasal 7;

- (1) Perkawinan campuran tak dapat dilakukan, sebelumnya terbukti bahwa hal-hal yang mengenai diri si perempuan itu telah dipenuhi yakni aturan-aturan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku untuk si perempuan itu, yang bersangkutan paut dengan sifat-sifat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan dan begitu juga formalitiet-formalitiet yang harus dijalankan sebelum perkawinan itu dilakukan.
- (2) Perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukan menjadi halangan untuk perkawinan itu.
- (3) Untuk membuktikan, bahwa aturan-aturan atau syarat-syarat tersebut dalam ayat satu dari pasal ini sudah dipenuhi dan oleh karena itu sudah tidak ada rintangan lagi untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut Hukum yang berlaku untuk si perempuan diwajibkan mengadakan nikah, atau yang kuasa mengadakan nikah dari tempat kediaman si perempuan, diberikan surat keterangan dengan percuma serta tidak memakai materai, kecuali jika perkawinan itu akan terjadi antara dua pihak yang takluk pada hukum keluarga Eropah. Jika orang yang tersebut itu menurut hukum yang berlaku untuk si perempuan tidak ada, maka keterangan itu diberikan oleh Kepala Penduduk golongan si perempuan itu, atau jika Kepala sedemikian itu tidak ada oleh orang yang ditentukan oleh

Kepala Pemerintah Daerah di tempat kediaman si perempuan, atau di mana si perempuan bertempat tinggal.

- (4) Jika orang tersebut itu tidak dapat menulis, maka berlaku ayat 4 pasal 6.
- (5) Keterangan tersebut pada ayat 3 pasal ini menurut hukum tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dijalankan dalam masa setahun sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 8;

- (1) Jika surat keterangan itu tidak diberikan, maka atas permintaan yang berkepentingan atau mereka yang berkepentingan, Pengadilan biasa dari si perempuan memberi keputusan dengan tidak beracara serta dengan tidak boleh dimintakan banding (appel) lagi tentang penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (2) Jika Pengadilan itu memutuskan, bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut pada pasal baru lalu ini, (lihat pasal 7 ayat (3)).
- (3) Terhadap keputusan ini berlaku pula apa yang tersebut pada alinea penghabisan dari pasal 7.

Pasal 9;

Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran dengan tidak memperlihatkan lebih dahulu kepadanya surat keterangan tersebut pada pasal 7 ayat (3), atau pun keputusan Pengadilan tersebut pada ayat (2) dari pasal yang baru lalu (pasal 8), dalam hal-hal keterangan

atau keputusan ini diperlihatkan, dihukum denda sebanyak-banyaknya 15 kali lima puluh rupiah, (Stbl. 1917/497 jo. 645 pasal 6 No. 107 dan LN. 52/1960 jo. 1/1961).

Pasal 10;

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia atau di bagian Indonesia yang masih mempunyai Pemerintah sendiri (Indonesisch Zelfbestuur) adalah sah, jika perkawinan itu dilakukan menurut aturan-aturan yang berlaku di negeri tersebut, di mana perkawinan itu dilangsungkan, asal saja kedua pihak tidak melanggar aturan-aturan atau syarat-syarat dari hukum yang berlaku untuk mereka masing-masing, ialah tentang sifat-sifat dan syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan suatu pernikahan.

Pasal 11;

Anak-anak lahir dari perkawinan campuran yang dilangsungkan menurut hukum-hukum yang dulu mempunyai kedudukan hukum menurut kedudukan hukum bapak mereka, baik terhadap hukum publik maupun hukum sipil.

Pasal 12;

Kedudukan hukum anak-anak tersebut pada pasal yang baru lalu ini (pasal 11), oleh karena surat nikah ayah ibu mereka ada kekurangan syarat-syarat atau oleh sebab tidak ada surat nikah tidak dapat dipertikaikan jika anak-anak itu lahirnya mempunyai kedudukan hukum sebagai anak-anak ayah dan ibu mereka sedang orang tua mereka hidup dengan terang-terangan sebagai laki isteri.

BAB II

PERKAWINAN BERBEDA AGAMA MENURUT BEBERAPA AGAMA

A. PERKAWINAN BERBEDA AGAMA MENURUT ISLAM

Dalam membicarakan perkawinan berbeda agama, yaitu perkawinan seorang muslim dengan non muslim menurut Islam dapat penulis jelaskan setelah terlebih dahulu membuat klasifikasi non-muslim tersebut kepada dua kelompok, yaitu musyrik dan ahli kitab. Untuk hal ini dapat dilihat uraian berikut ini :

1. Musyrik

Untuk membahas pernikahan seorang muslim / muslimat dengan musyrik/musyrikat dapat merujuk kepada kandungan Q.S al Baqarah ayat 221 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى
الْحَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya; Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke Syurga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.¹

Setelah mengamati beberapa kitab tafsir, penulis dapat menyimpulkan bahwa haram hukumnya menikah dengan orang musyrik termasuk pria dan wanitanya. Secara umum.² Dengan demikian pernikahan berbeda

¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1978 M), hlm. 53-54.

² Misalnya dapat kita temukan pada : Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, juz. 2, (Beirut : Dar al-fikr, t.t.), hlm. 249., Ismail Ibnu Kasir al-Qursy al-Damsyqy, *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*, juz. 1, (Mesir : Dar al-

agama antara seorang muslim/muslimah dengan musyrik/musyrikah adalah haram, dan nikahnya tersebut tidak sah.

Di balik kesempatan yang ada ini, ulama berbeda pendapat dalam menentukan siapa saja sebenarnya yang tergolong kepada orang musyrik/musyrikah itu. Untuk hal ini dapat dilihat pendapat berikut ini :

- a. Rasyid Ridha mengatakan bahwa kebanyakan ulama berpendapat pengertian musyrik/musyrikah tersebut adalah orang yang musyrik/musyrikah (mensekutukan Allah) dari bangsa Arab, dimana mereka itu tidak mempunyai kitab.³
- b. Qaulun mengatakan bahwa yang dimaksud dengan musyrik/musyrikah itu adalah di samping orang yang

Fikr, t.t.), hlm. 257., Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurtubi al-Damsyiqy, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz.1, (Mesir : Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 257., Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami' al-ahkam al-Qur'an*, Juz.3, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 71., al-Zamkhasari al-Khawarizmi, *al-Kassaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa al-'Uyun al-'Aqawil*, Juz.1, (Mesir : Musthafa al Bab al Halb wa Syurakah, 1396 H./1972M.), hlm. 360. demikian juga pada tafsir-tafsir lainnya.

³ Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Abduh, *ibid.*, hlm. 349., penulis melihat bahwa keduanya terlalu memberikan pengertian yang khusus karena lebih terikat dengan aspek yang lokal dan kondisional, maka penulis lebih setuju dan juga mungkin keduanya, yaitu tidak hanya orang Arab, tetapi semua Bangsa yang ada di bumi ini. Penulis menduga pembuatan pengertian yang agak khusus ini adalah karena melihat kenyataan yang ada pada saat syariat tersebut diturunkan.

mensekutukan Allah yang dapat dipahami sebagai mana biasanya, juga termasuk ahli kitab.⁴

Penyebutan larangan menikah dengan musyrik/musyrikah tersebut termasuk ahli kitab adalah karena mereka memberikan pemahaman akan mansukhnya ketentuan perkawinan dengan ahli kitabiyat yang ada di dalam Al- Qur'an surat al-Maidah ayat 5.⁵

Demikian juga halnya dengan orang kafir, haram hukumnya menikahi mereka. Hal ini sejalan dengan firman Allah Q.S. al-Mumtahanah ayat 10, yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِنْهَا جَرَاتٍ فَاَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ
أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا
هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

⁴ Ibid.

⁵Penjelasan tentang mansukhnya Q.S al - Maidah oleh Q.S al-Baqarah ayat 221 sulit untuk dapat diterima karena ayat yang dikatakan menasakh tersebut terlebih dahulu turun daripada yang dinyatakan mansukh. Q.S al-Baqarah ayat 221 turun pada saat baru saja Rasul hijriah ke Madinah, sedang Q.S al-Maidah ayat 5 turun adalah sesudahnya, karena ayat tersebut termasuk ayat yang terakhir turun., *ibid.*, Selanjutnya satu pendapat mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani itu juga adalah musyrik, karena mereka mengatakan "Usair anak Tuhan (oleh orang Yahudi) dan Isa anak Tuhan (oleh orang Nasrani)., al-Zamkhasari al-Kawarizmi, hlm. 360.

وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

12. Ahli Kitab

Untuk membahas mengenai perkawinan dengan ahli kitab pada umumnya juga mengacu kepada Q.S al-Maidah ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.⁶

Melalui ayat ini Jumhur ulama mengatakan bahwa menikahi wanita kitabiyat tersebut adalah boleh, sedang sebaliknya yaitu menikahkan wanita muslimah dengan pria kitab (ahl al-kitab) adalah haram.

Untuk lebih jelasnya dikemukakan beberapa pendapat, sebagai berikut :

⁶Departemen Agama RI., hlm. 158,

- a. Muhammad Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh mengatakan bahwa menikahi wanita kitabiyat tersebut adalah halal hukumnya. Hal ini dengan tegas dipahami dari kata *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ* adalah *ma'thuf* (dihubungkan/ mengikut) kepada kalimat sebelumnya, yaitu *طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ*.⁷
- b. Al-Qurtubi mengemukakan dalam riwayat ibn Abbas dinyatakan bahwa boleh menikahi wanita kitabiyat, sedang menikahkan wanita muslimah dengan ahl al-kitab pria adalah haram. Kebolehan menikahi wanita kitabiyah itu dipahami dari Q.S al-Maidah ayat 5 tersebut.⁸
- c. Al-Syuyuti menyampaikan 17 riwayat untuk menafsir ayat tersebut. Dari semua riwayat tersebut terlihat bahwa tak satu pun yang mengatakan bahwa wanita muslimah boleh menikah dengan pria ahl al-kitab. Sebagai contoh salah satu riwayat terlihat lebih lugas dan tegas; Dari Abdullah ibn Hamid dari Qatadah; yang dimaksud dengan "mukminah yang baik-baik dan ahl al-kitab yang baik-baik dari orang sebelum kamu". Dalam ayat tersebut Allah menghalalkan bagi kita wanita muslimah yang baik-baik. Wanita kita haram bagi mereka, dan wanita mereka halal bagi kita.⁹

⁷Rasyid Ridha, Muhammad Abduh, Juz. 6, hlm. 180.

⁸Mhd ibn Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, Juz.6, hlm. 79

⁹Al-Syuyuti, *Tafsir al-Durr al-Mansur fi Tafsir al-Ma'sur*, juz 3 (Beirut : Dar al-Fikr, Cet. Ke-1, 1403/1983 M.), hlm. 24-26.

- d. Ibn Kasir mengatakan dalam riwayat ibn Jarir dari Mujahid bahwa menikahi wanita kitabiyah tersebut adalah halal, sedang sebaliknya, yaitu menikah dengan prianya adalah haram hukumnya.¹⁰

Sebaliknya pendapat yang berbeda dengan Jumhur ulama tersebut muncul dalam persepsi yang lain, yaitu orang yang mengatakan bahwa baik laki-laki dan perempuan dari ahli kitab, keduanya boleh menikah dengan orang Islam. Hal ini terlihat dari kelompok berikut ini :

- a. Qaulun mengatakan bahwa boleh menikah dengan ahl al-kitab baik laki-laki dan perempuan. Kebolehan ini diambil dari pengertian yang umum, yaitu dengan membolehkan menikahi wanita kitabiyat, maka diambil pemahaman yang umum, yaitu termasuk juga prianya.¹¹
- b. Yoesoef Souyb mengatakan boleh menikah dengan pria ahl al-kitab. Alasannya adalah karena mereka ini tidak dibicarakan oleh nas, baik al-Qur'an maupun al-Hadits. Misalnya Q.S al-Baqarah ayat 221, mereka tidak termasuk dalam pengertiannya, begitu juga Q.S al-Maidah ayat 5 jelas tidak menyebutkannya.

¹⁰ Ismail ibn Kasir al Qursi al-Damsyqy, juz 2 hlm. 20, Hal yang senada dengan ini dikemukakan juga oleh Purwahadi Wardoyo, dalam Purwahadi Wardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katholik Implikasinya Dalam Kawin Campur*, (Yogyakarta : Kansius, Cet. Ke 2, 1991 M.), hlm. 18.

¹¹ Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, hlm. 79.

Berhubung mereka didiamkan oleh syari'at maka Yoesoef Souyb kembali kepada hukum asal "bahwa segala sesuatu itu hukum asalnya adalah boleh". Dengan demikian dia memahami menikah dengan ahl al-kitab pria adalah boleh.¹²

Di samping telah menyebutkan beberapa pendapat yang ada, sesuatu hal yang sangat penting untuk dikemukakan sejalan dengan bahasan ini adalah pengertian ahl kitab itu sendiri. untuk hal ini dikemukakan ungkapan Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh. Keduanya mengatakan : Yang dimaksud dengan ahli kitab adalah mereka yang *tergolong ahli al-Tauhid* (orang yang mengesakan Allah SWT.) dari orang sebelum Islam kemudian mereka ditimpa oleh fitnah kemusyrikan dari orang musyrik yang memeluk agama mereka, kemudian mereka terputus dengan masa lalu mereka.¹³

Selanjutnya bila kita mengangkat contoh ahli kitab yang ada sekarang ini, khususnya dengan contoh Indonesia, maka hukum menikah bagi orang Islam dengan mereka telah terdapat fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tanggal 1 Juni 1980 yang mengatakan bahwa baik pria maupun wanita keduanya adalah haram melangsungkan pernikahan. Alasannya adalah karena mereka tidak bisa dikategorikan lagi kepada ahli kitab, mereka telah

¹² Panji Masyarakat, nomor, 710, 1412 H./1992 M., hlm. 38-40

¹³ Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Abduh, juz 6, hlm. 177.

berbeda dengan ahli kitab yang asli seperti yang dimaksudkan oleh Q.S al-Maidah ayat 5 dan yang lainnya.¹⁴

Fatwa tersebut di atas dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1980, sebagai tanggapan atas bertambahnya perhatian masyarakat terhadap makin seringnya terjadi pernikahan antar agama. Menurut kenyataannya, pembicaraan mengenai fatwa ini diadakan pada konferensi tahunan kedua MUI pada tahun 1980 dan bukannya dalam rapat-rapat biasa komisi fatwa. Fatwa tersebut memuat dua pernyataan gamblang mengenai masalah itu, pertama bahwa seorang wanita Islam tidak diperbolehkan (haram) untuk dinikahkan dengan seorang pria bukan Islam; kedua, bahwa seorang pria muslim tidak diizinkan menikahi seorang wanita bukan Islam. Fatwa itu ditandatangani oleh HAMKA, Ketua Umum, Kafrawi, dan Sekretaris MUI. Yang agak aneh ialah bahwa fatwa itu dibubuhi tanda-tangan Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara. Tetapi pentingnya fatwa ini tidak terletak pada tanda tangan Menteri, melainkan karena fatwa ini dibicarakan dan diputuskan dalam konferensi tahunan MUI.

Sejalan dengan uraian di atas Hazairin mengatakan bahwa kebolehan mengawini wanita kitabiyat tersebut seperti yang dikemukakan Allah SWT di dalam Q.S. al-Maidah ayat 5 adalah berupa dispensasi, karena suatu keadaan di mana ada kesulitan bagi pria muslim untuk mendapatkan wanita muslimah di sekitar mereka, karena

¹⁴Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : INIS, 1993), hlm. 99-104.

memang jumlah wanita muslimah pada waktu itu sangat sedikit. Sehubungan dengan kondisi Indonesia yang ada sampai saat ini ternyata tidak demikian halnya, karenanya dispensasi tersebut tidak boleh dipergunakan, artinya tidak boleh menikahi non muslim dengan alasan sulit untuk menemukan wanita muslimah, sedang mereka itu adalah tergolong wanita kitabiyat. Kemungkinan kebolehan menikahi wanita kitabiyat ini hanya dapat dilakukan di negeri-negeri yang penduduknya terdiri dari minoritas muslim, sedang wanita kitabiyat banyak dijumpai di sana. Dengan demikian tidak diperkenankan bagi seorang muslim di Indonesia ini untuk menikahi wanita non muslim dengan alasan bahwa mereka itu adalah tergolong wanita kitabiyat.

Selain dari apa yang telah dikemukakan, sebenarnya ada syarat yang sangat penting bagi pria muslim untuk dapat menikahi wanita kitabiyat, yaitu syarat keimanan. Syarat keimanan ini harus terlebih dahulu dipenuhi oleh mereka yang berkeinginan untuk menikah dengan wanita kitabiyat tersebut, hal ini penting dalam rangka menjaga kepentingan agama, baik terhadap dirinya, keluarganya, dan anak-anak mereka yang akan lahir, hanya mereka yang kuat imannya saja yang diperkenankan menikah dengan wanita kitabiyat tersebut, dia harus mampu menjadi kepala rumah tangga dengan bimbingan iman yang ada padanya. Jika tidak demikian maka dilarang bagi seorang pria untuk menikah dengan wanita kitabiyat, karena akan dapat menimbulkan kerawanan aqidahnya, demikian juga dengan anak-

anaknya yang akan lahir, bahkan keluarga itu dikawatirkan akan dapat tertarik kepada iman non muslim.

Berangkat dari uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa ulama telah sepakat mengatakan menikah dengan orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan haram hukumnya. Hanya saja ada perbedaan dalam menentukan siapa saja sebenarnya yang termasuk kepada orang musyrik tersebut, di mana satu pendapat mengatakan hanya orang-orang yang tidak punya kitab saja dari orang Arab sebelum Islam, sedang pendapat kedua, membuatnya lebih umum, yaitu termasuk Yahudi dan Nasrani meskipun mereka punya kitab. Demikian juga halnya haram hukumnya menikah dengan orang kafir secara umum. Selanjutnya sepakat ulama mengatakan bahwa menikahi wanita kitabiyat itu adalah halal tetapi tidak sebaliknya, yaitu menikahkan wanita muslimat dengan ahli kitab pria, karena itu adalah haram. Namun di sini ditemui pendapat minoritas dari *Qaulun* dan *Yoesoeb Souyb* yang mengatakan boleh menikah dengan ahli kitab tanpa kecuali pria atau wanitanya. Terakhir MUI mempertegas bahwa haram hukumnya menikah dengan orang yang tidak Islam termasuk pria dan wanitanya, karena mereka itu tidak bisa lagi digolongkan kepada ahli kitab.

B. PERKAWINAN BERBEDA AGAMA MENURUT KATOLIK

Meskipun tidak terpublikasi, ternyata perkawinan Katolik dengan penganut agama lain banyak dilakukan

Sekedar data, dikemukakan informasi perkawinan tersebut, sebagai berikut;

JUMLAH PERKAWINAN KATOLIK DI
KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA, PADA
TAHUN 1984

| No | Antar Perkawinan | Jlh. | Persen |
|---------------|---------------------|-------|----------|
| 1 | Katolik + Katekumin | 200 | 9,83 % |
| 2 | Katolik + Protestan | 236 | 11,60 % |
| 3 | Katolik + Islam | 163 | 8,01 % |
| 4 | Katolik + Lain-lain | 253 | 12,43 % |
| 5 | Katolik + Katolik | 1.183 | 58,13 % |
| Jumlah | | 2.035 | 100,00 % |

Untuk memudahkan menjawab hukum perkawinan berbeda agama menurut agama Kristen Katolik terlebih dahulu dikemukakan beberapa hal, diantaranya:

a. Syarat Materil, yang terdiri dari :

- 1) Calon mempelai sudah mengerti makna penerimaan sakramen perkawinan beserta akibat-akibatnya;
- 2) Tidak berdasarkan paksaan;
- 3) Pria sudah berumur 16 tahun, dan wanita sudah berumur 14 tahun;
- 4) Tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain;
- 5) Beragama Katolik;
- 6) Tidak ada hubungan darah yang terlampau dekat;
- 7) Tidak melanggar larangan perkawinan.

b. Syarat Formil, yang terdiri dari:

- 1) Dua bulan sebelum hari pernikahan, calon mempelai memberitahukan maksudnya kepada Pastor paroki pihak wanita atau pihak pria, bila calon isteri tidak beragama Katolik;
- 2) Pastor paroki akan mengadakan penyelidikan kanonik mengenai :
 - a) ada atau tidaknya halangan perkawinan.
 - b) pengertian calon mempelai tentang makna menerima sakramen perkawinan dengan segala akibatnya.
- 3) Bila tidak ada halangan perkawinan, Pastor paroki akan mengumumkan berturut-turut tiga kali pada misa hari minggu;
- 4) Bila tidak ada pencegahan perkawinan, pernikahan dapat dilangsungkan pada hari yang ditentukan;
- 5) Pernikahan dilakukan menurut aturan gereja Katolik, yaitu :
 - a) Harus di hadapan ordinaris wilayah atau pastor-pastor atau imam diakon yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka untuk meneguhkan perkawinan tersebut;
 - b) Harus disaksikan oleh dua orang saksi;
- 6) Setelah pernikahan menurut hukum agama selesai, pernikahan harus dicatat di kantor catatan sipil.¹⁵

¹⁵ P. A. Heuken, *Persiapan Perkawinan*, (Jakarta : Obor, 1981 M.), hlm. 142-144., Hal ini tercantum dalam ; Kan. 1083:1, 1085:1, 1091, dan 1108:1.

2. Larangan Perkawinan

Hal-hal yang berupa larangan perkawinan atau hal-hal yang dapat mengakibatkan perkawinan itu tidak sah menurut agama Kristen Katolik adalah :

- a) Umur mempelai pria belum mencapai 16 tahun dan mempelai perempuan belum mencapai 14 tahun;
- b) Impotensi yang sudah ada sejak sebelum perkawinan;
- c) Telah ada ikatan perkawinan sebelumnya;
- d) Salah seorang calon mempelai bukan beragama Katolik;
- e) Salah seorang telah menerima *Tahdis* suci;
- f) Telah terikat kaul kemurnian dalam suatu lembaga religius.
- g) Adanya unsur penipuan.
- h) Tersangkut kejahatan pembunuhan seperti dimaksud dalam kanonik 1090:1 dan 2.
- i) Calon mempelai mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, baik sah maupun tidak sah.
- j) Kedua calon mempelai berhubungan semenda.
- k) Antara kedua mempelai mempunyai hubungan adopsi dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua.¹⁶

3. Sahnya Perkawinan

Menurut agama Kristen Katolik, pernikahan yang

¹⁶ P. J. B. Martisidjoto Sj., *Perkawinan Gerejani*, Paper disajikan dalam pertemuan ketakisse Kaj., tanggal 19-8-1985.

sah adalah pernikahan yang dilakukan diteguhkan dan diberkati oleh pejabat gereja. Pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita secara sah ditingkatkan menjadi satu sakramen. Sakramen ini diberikan oleh suami istri itu sendiri, yaitu dengan mengucapkan janji saling mencintai, dan setia satu sama lain di hadapan imam dan para saksi. Janji pernikahan tersebut diucapkan dalam bentuk sumpah yang berbunyi; " Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikian janji saya demi Allah dan demi injil suci ini."¹⁷ Dengan selesainya pengucapan janji ini, kedua mempelai diteguhkan oleh imam dan diberkatinya, maka sahlah perkawinan ini menurut agama keyakinan Katolik.

Dengan memperhatikan uraian terdahulu, maka di sana kita jumpai bahwa salah satu persyaratan perkawinan menurut agama Katolik ini adalah mesti kedua calon mempelai beragama Katolik. Demikian juga halnya dengan larangan perkawinan, di sana dikatakan tidak boleh menikah antara penganut Katolik dengan non-Katolik. Karenanya dapat disimpulkan bahwa menurut agama Katolik tidak boleh melakukan perkawinan berbeda agama.

¹⁷H.J.Palang Agama et. All, *Peranan Agama Katolik Dalam Meningkatkan Program Kependudukan Dan Keluarga Berencana Melalui Nasehat Perkawinan*, (Jakarta : Unit Kependudukan dan Keluarga Berencana Departemen Agama RI. Dan Biro Penerangan dan Motivasi BKKBN, 1983 M.), hlm. 45.

Kendatipun telah dengan tegas dinyatakan bahwa perkawinan berbeda agama itu tidak boleh menurut agama Katolik, namun bagi mereka yang sudah tidak mungkin lagi dipisahkan cintanya karena sudah terlanjur mendalam, maka pejabat gereja yang berwenang, yakni Uskup dapat memberi dispensasi (pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus) dengan jalan mengawinkan mereka kendatipun berbeda agama, dengan syarat seperti dikemukakan dalam Kanon 1125 sebagai berikut :

- a. Akan tetap setia pada iman Katolik.
- b. Berusaha mempermandikan dan mendidik semua anak-anak mereka secara Katolik.

Bagi yang tidak beragama Katolik berjanji :

- a. Menerima perkawinan secara Katolik.
- b. Tidak akan menceraikan yang beragama Katolik
- c. Tidak akan menghalang-halangi pihak yang Katolik melaksanakan imannya.
- d. Bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik.¹⁸

Meskipun agama Katolik memberikan dispensasi perkawinan berbeda agama ini, namun menurut mereka hal ini adalah dalam situasi yang sangat memaksa (darurat), karena menurut mereka bagaimanapun adanya perkawinan berbeda agama itu pasti menimbulkan konflik, diantaranya ; konflik iman, batin, hak

¹⁸ Tulisan Muhammad Daud Ali dalam, Depag RI., *Mimbar Hukum Aktualisasi Islam*, No. 5 Thn. 3, (Jakarta: Direktorat Badan Peradilan Agama Islam, 1992 M.), hlm. 68.

asasi, sistem nilai, kewajiban asasi terhadap anak, kewajiban dan kebingungan pada anak-anak, dan konflik-konflik lainnya setelah api cinta tidak lagi menyala.

C. PERKAWINAN BERBEDA AGAMA MENURUT PROTESTAN

Secara umum dapat dikatakan bahwa ketentuan perkawinan menurut agama Katolik adalah sama dengan protestan, karena pada hakekatnya kedua agama itu berasal dari satu tampuk, yaitu sama-sama percaya kepada Tritunggal : Allah bapa, Allah anak, dan Rohul qudus yang didasarkan kepada ajaran yang tertuang didalam al-Kitab. Dengan demikian sebagaimana halnya Katolik melarang perkawinan berbeda agama maka agama Protestan juga melarangnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat uraian berikut ini :

1. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan menurut agama Protestan adalah sebagai berikut;

- a. Masing-masing calon mempelai tidak terkait tali perkawinan dengan pihak lain.
- b. Kedua mempelai beragama Kristen Protestan (agar pernikahan tersebut dapat diteguhkan dan diberkati).
- c. Kedua calon mempelai harus sudah sidi (sudah dewasa)
- d. Harus dihadiri oleh dua orang saksi.
- e. Disaksikan oleh jemaat.¹⁹

¹⁹ Asmin, hlm. 41.

2. Sahnya Pernikahan

Menurut agama Protestan, perkawinan baru sah apabila telah dilaksanakan berdasarkan agama Protestan dan hukum Negara.²⁰

Berdasarkan kepada uraian di atas terutama tentang syarat-syarat perkawinan maka dapat dipahami bahwa hukum agama Protestan, seorang penganut agamanya dilarang melangsungkan perkawinan dengan penganut agama lain. Juga persyaratan seagama dalam iman Protestan ini sebagai syarat supaya pernikahan mereka dapat diberkati.

Sebagaimana halnya dalam agama Katolik, juga pada agama Protestan, salah satu prinsip perkawinan itu mestilah dilakukan dalam satu iman, akan tetapi dalam suasana yang sangat membutuhkan (darurat) pihak gerejawi dapat memberikan dispensasi bila pasangan suami istri itu bersedia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Misalnya gereja Kristen Indonesia menetapkan bagi:

a. Orang yang beragama Kristen Protestan menandatangani suatu perjanjian yang berisi :

- 1) Tetap akan melaksanakan iman Kristennya.
- 2) Akan membaptis anak-anaknya yang lahir dari perkawinan itu secara Kristen.
- 3) Berjanji akan mendidik anak-anak mereka secara Kristen.

b. Yang bukan beragama Kristen Protestan harus

²⁰ Ibid., hlm. 40.

menandatangani surat pernyataan bahwa ia:

- 1) Tidak keberatan perkawinan dilaksanakan di gereja Protestan.
- 2) Tidak keberatan bahwa anak mereka dididik secara Protestan.²¹

Selanjutnya dapat ditambahkan bahwa dalam Konfransi Wali Gereja Indonesia (Katolik) dan Persatuan Gereja Indonesia (Protestan) pada seminar "Perkawinan Antara Pemeluk Agama yang Berbeda " yang diselenggarakan di Malang pada tanggal 12 - 14 Maret 1947, memutuskan mengenai perkawinan berbeda agama sebagai berikut :

- a. Perkawinan campuran berbeda gereja sudah sepenuhnya dapat diterima antar gereja-gereja Persekutuan Gereja Indonesia (PGI = Protestan).
- b. Perkawinan antara Protestan dengan Katolik, pada umumnya sudah diterima berdasar banyaknya persamaan.

Mengenai perkawinan Kristen dengan pemeluk agama lain, misalnya Islam, sebagai berikut :

- a. Mereka dianjurkan menikah secara sipil (Di Kantor Catatan Sipil) sedang mereka tetap menganut agama masing-masing.
- b. Kepada mereka diadakan pengembalaan khusus.
- c. Pada umumnya perkawinan mereka tidak diberkati Gereja.

²¹ Departemen Agama RI., hlm.68-69.

- d. Apabila dikemudian hari mereka bertaubat, dan berjanji Kristen maka perkawinan mereka dapat diberkati oleh Gereja.
- e. Kepada mereka diberi petunjuk untuk merubah atau menambah keterangan pada surat nikah mereka yang lama yang menyatakan bahwa mereka sudah menjadi Kristen.²²

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan berbeda agama menurut agama Protestan adalah dilarang. Terutama untuk selain orang Kristen, sedang perkawinan antara Protestan dengan Katolik, mereka lebih memiliki sikap yang lunak untuk dapat menerimanya. Bila ternyata perkawinan Protestan dengan selain Katolik sudah tak dapat dibendung lagi maka pihak Gereja tidak memberkati perkawinan mereka, dan mereka disarankan untuk melangsungkan perkawinan mereka melalui petugas Catatan Sipil saja.²³

²²Ibid.

²³ Hal yang agak berbeda didapati dari Pendeta J.S. Kiel Mulyadikrama dari Gereja Pomadi Jakarta dan R. Budyarto Staf khusus Urusan Hukum dan Humas Subdit Bimas Agama Kristen Protestan Departemen Agama Republik Indonesia yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil saja oleh Umat Kristen Protestan dianggap sebagai perkawinan yang sah walaupun tidak diberkati dan diteguhkan di Gereja., Asmin, hlm. 41.

D. PERKAWINAN BERBEDA AGAMA MENURUT HINDU

Untuk mengetahui hukum perkawinan berbeda agama menurut agama Hindu terlebih dahulu dikemukakan pembahasan berikut ini :

1. Syarat-syarat Perkawinan

- a. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
Manudharmasastra IX:102 menegaskan bahwa suatu hubungan saling cinta mencintai antara pria dan wanita yang terikat oleh tali perkawinan hendaknya dijalin sebaik-baiknya untuk mencapai kebahagiaan dan menurunkan keturunan yang baik dengan berusaha supaya selalu mencegah perceraian.
- b. Telah mencapai usia yang layak untuk kawin, yaitu 21 tahun.
Penafsiran terbaru dari M.IX:94, 4, 89, 90, dan 91, mengenai umur yang layak untuk kawin ini adalah 21 tahun.
- c. Harus ada izin orang tua (M.V:148) atau bila tidak ada orang tua atau sanak keluarganya maka orang yang dapat bertindak sebagai wali, perwaliannya dilakukan oleh Raja atau Pemerintah (M.VIII:27 dan 28) jika orang tua sudah tidak ada lagi atau tidak dapat bertindak sebagai wali.
- d. Tidak melanggar larangan kawin, yaitu bahwa kedua calon mempelai tidak :

- 1) Mempunyai hubungan darah yang terlampau dekat
- 2) Mempunyai penyakit turunan / menular.
- 3) Cacat tubuh.
- 4) Merupakan anak tunggal (bagi calon mempelai wanita)
- 5) Telah bersuami (bagi calon mempelai wanita)
- 6) Mendahului kakaknya dalam perkawinan.
- 7) Merupakan putri saudara perempuan ayah/ibunya.

Adapun formalitas perkawinan menurut agama Hindu adalah :

- 1) Perkawinan dilakukan menurut tata cara hukum Hindu, dan dilakukan oleh Brahmana atau Pendeta atau Pejabat agama Hindu yang mempunyai wewenang untuk itu.
- 2) Suatu perkawinan hanya dapat disahkan menurut hukum agama Hindu apabila kedua mempelai tersebut beragama Hindu.²⁴

2. Sahnya Perkawinan

Perkawinan menurut ajaran agama Hindu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dengan melalui upacara sakramen, yaitu "*wiwaha homa*" atau "*wiwaha samskara*". Bila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agama, maka akibatnya bahwa segala

²⁴ Gde Djaksa, *Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Hindu Dengan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1/1974*, (Jakarta : Skripsi pada Fakultas Hukum UI, 1976 M.), hlm. 96-97.

akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak diakui sah oleh agama.²⁵

Selanjutnya dapat ditambahkan bahwa bagi pengesahan suatu perkawinan menurut agama Hindu tidak ada suatu *ascape clause* yang memungkinkan bagi Brahmana untuk melakukan suatu pengesahan upacara perkawinan yang dilakukan kalau antara kedua mempelai terdapat perbedaan agama.²⁶

Sejalan dengan uraian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa agama Hindu tidak menerima adanya perkawinan berbeda agama yang dilakukan oleh pemeluk agama Hindu dengan non-Hindu, karenanya hal itu dilarang.

E. PERKAWINAN BERBEDA AGAMA MENURUT BUDHA

Untuk menjawab pertanyaan apakah boleh melakukan perkawinan berbeda agama menurut agama Budha terlebih dahulu dikemukakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai dalam perkawinan tersebut. Persyaratan itu adalah sebagai berikut :

1. Apapun yang mendorong suatu pasangan untuk menikah, cinta kasih dan pengertian yang baik dengan tujuan membahagiakan satu sama lain adalah hal utama yang harus dikembangkan.
2. usia kedua calon mempelai tidak terlalu jauh berbeda.
3. kedua calon mempelai haruslah sedharma, mempunyai

²⁵ Asmin, hlm. 47.

²⁶ Gde Puja, hlm. 49.

keyakinan yang sebanding, tata susila yang sebanding, kemurahan hati yang sebanding, dan kebijaksanaan yang sebanding pula.²⁷

Setelah memperhatikan persyaratan perkawinan menurut agama Budha ini ternyata perkawinan berbeda agama tidak diterima dalam ajaran agama Budha, karena calon mempelai tidak sedharma, dan tidak mempunyai keyakinan yang sebanding. Karenanya perkawinan seperti ini adalah dilarang.

Selanjutnya, setelah memperhatikan ketentuan hukum menikah berbeda agama menurut lima agama besar yang ada di Indonesia, yaitu ; Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha, dapatlah disimpulkan bahwa semua agama tersebut melarang perkawinan berbeda agama itu. Hanya saja ada beberapa agama yang bersifat lunak dengan cara memberikan dispensasi bila-mana seorang pemeluk agamanya akan menikah dengan pemeluk agama lain dalam keadaan darurat (sudah tak terbendung lagi). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh agama yang ada di Indonesia ini tidak dapat menerima perkawinan berbeda agama.

Mengamati semua uraian terdahulu ternyata dapat diambil pemahaman bahwa semua agama yang ada di Indonesia ini tidak memperkenankan umatnya melakukan perkawinan dengan penganut agama lain, dan pengabaian akan hal ini cenderung untuk tidak sahnya perkawinan tersebut.

²⁷ Krisnanda W., Mukti, hlm. 16.

BAB III

PERKAWINAN BERBEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. SEJARAH LAHIRNYA KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dalam rangka memenuhi kebutuhan umat Islam, ternyata sejak dari awal Mahkamah Agung telah menyadari sepenuhnya betapa pentingnya untuk melahirkan Kompilasi Hukum Islam. Pertama, mengingat mayoritas penduduk bangsa ini adalah beragama Islam. Kedua, mengamati adanya peluang bagi para hakim untuk memberikan putusan yang bervariasi dalam kasus yang sama, karena bervariasinya kitab pedoman hukum yang dijadikan rujukan (dalam hal ini ada 13 kitab)¹. Dengan demikian, maka upaya untuk meng-

¹ Kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut; (1). Al-Bajuri, (2). Fath al-Mu'in, (3). Syarqawi 'ala al-Tahrir, (4). Qalyubi/ Mahalli, (5). Fath al-Wahab dengan syarahnya, (6).

antisipasi hal tersebut adalah dengan melahirkan satu pedoman hukum tertulis yang berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam Indonesia.

Ide awal pembentukan KHI itu sebenarnya ada pada tahun 1970-an, yaitu setelah lahirnya UU No.14 Tahun 1970, terutama mengenai maksud pasal 10 ayat (1) dan 11 ayat (1)nya.² Pasal ini mengamanatkan tentang adanya kedudukan Pengadilan Agama yang kuat dalam sistem hukum Nasional, juga mempunyai kesetaraan dengan tiga Pengadilan lainnya di Indonesia, juga ditentukan bahwa aspek organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Departemen Agama, sedang aspek yudikatif berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, maka pihak Departemen Agama

Tuhfah, (7). Targhib al-Mustaq, (8). Qawanin Syar'iyah li al-Sayyid bin Yahya, (9). Qawanin Syuar'iyah li al-Sayyid Sadaqah Dachlan, (10). Syamsuri fi al-Fara'id, (11). Bughyat al-Musytarsyidin, (12). Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah, (13). Mughni al-Muhtaj., Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI., 1997/1998), hlm. 124.

² Pasal 10 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 tersebut berbunyi Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan: a). Peradilan Umum, b). Peradilan Agama, c). Peradilan Militer, dan d). Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian pasal 11 ayat (1) berbunyi; Badan-badan yang melakukan Peradilan tersebut pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan., Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, IAIN Press, Medan, 1995 M., hlm.12.

dan Mahkamah Agung merasa berkepentingan untuk mempersiapkan tugasnya masing-masing terutama menyangkut hukum acara dan hukum materilnya. Khusus menyangkut hukum materilnya direncanakanlah melahirkan kitab pedoman hukum yang sifatnya unifikatif, yaitu adanya satu pedoman hukum yang seragam untuk semua Pengadilan Agama, dan kodifikatif, yaitu kitab pedoman hukum tersebut bersifat tertulis, dan terhimpun dalam satu kitab hukum formal. Kitab tersebut adalah KHI.

KHI sebagai kitab hukum formal yang unifikatif dan kodifikatif tersebut sangat diperlukan dan sifatnya segera mengingat pada masa sebelumnya tidak terdapat keseragaman keputusan antar Pengadilan Agama, karena para hakim senantiasa berbeda pendapat dalam mengambil kesimpulan meskipun dalam kasus yang sama. Kenyataan seperti ini terjadi hampir merata pada setiap persoalan. Dengan kenyataan ini maka prinsip kepastian hukum kurang terealisasi dengan baik.³

Meskipun keinginan untuk melahirkan KHI ini cukup kuat, dan dilakukan dengan penuh keseriusan namun hal ini bukanlah pekerjaan sederhana yang segera dapat diselesaikan. Dikatakan demikian karena dengan melahirkan kitab hukum materil semacam KHI yang bersifat khusus bagi orang Islam tentunya akan dapat mengundang banyak pemikiran yang bersifat pro dan kontra, nuansa pemikiran terhadap hal ini sangat elastis, dengan mudah dia bisa ditarik ke arah mana saja orang

³ Departemen Agama RI, hlm. 128

menginginkan, termasuk kepada pemikiran politis yang mendeskreditkan umat Islam karena mengarah kepada dominasi eksistensi umat Islam dibanding dengan non muslim sebagai warga negara yang ingin menghidupkan kembali Piagam Jakarta, alias mendirikan negara Islam. Karenanya tidak heran kalau proses lahirnya KHI tersebut memakan waktu sampai 30-an (tiga puluhan) tahun.⁴

Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1/ 1974, pada tanggal 16 September 1976 telah dibentuk Panitia Kerjasama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 04/KMA/ 1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia kerjasama Mahkamah Agung/ Departemen Agama).

Setelah adanya kerjasama dengan Mahkamah Agung, maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan menciptakan hukum tertulis bagi umat Islam (kendatipun sudah berlaku dalam masyarakat, namun sebagiannya masih mempunyai status sebagai hukum tidak tertulis), mulai menampakkan diri dalam bentuk seminar, simposium, dan lokakarya, serta penyusunan Kompilasi hukum Islam bidang hukum tertentu, antara lain:

- 1) Penyusunan Buku Himpunan dan Putusan Peradilan Agama, tahun 1976.
- 2) Lokakarya tentang Pengacara dan Pengadilan Agama, tahun 1977.
- 3) Seminar tentang Hukum Waris Islam, tahun 1978.
- 4) Seminar tentang Pelaksanaan Undang undang perkawinan, tahun 1979.
- 5) Simposium tentang beberapa Bidang Hukum Islam, tahun 1982.
- 6) Simposium Sejarah Peradilan Agama, tahun 1982.
- 7) Penyusunan Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah, tahun 1983.
- 8) Penyusunan Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama, tahun 1981.
- 9) Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama I, tahun 1984.
- 10) Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama II, tahun 1985.
- 11) Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama III, tahun 1986.
- 12) Penyusunan Kompilasi Hukum NTCR I dan II, tahun 1985.

Dalam rangka melahirkan Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka pada tanggal 21 Maret 1985 telah dibentuk suatu rapat kerja di Yogyakarta, yang dihadiri oleh; Ketua-ketua Pengadilan Tinggi dari seluruh Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Militer se-Indonesia, juga Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri Agama. Dalam kesempatan ini telah dicapai keputusan bersama antara Mahkamah Agung

⁴ Ibid., hlm. 127 - 174.

dan Menteri Agama tentang Proyek pembangunan Hukum Islam melalui Jurisprudensi.

Dalam kegiatan-kegiatan tersebut telah diikuti sertakan ahli hukum dari beberapa kalangan, seperti; Hakim, Pengacara, Notaris, Kalangan Perguruan Tinggi, Departemen Kehakiman, IAIN, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, Ulama, dan Cendi-kiawan muslim, serta perorangan lainnya.

Upaya perumusan KHI tersebut mulai lebih konkrit setelah tahun 1885, yaitu sejak ditanda-tanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI. tentang penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 di Yogyakarta.

Dalam SKB tersebut ditentukan sebagai berikut:

a) Pelaksana proyek

Pelaksana proyek tersebut adalah orang-orang tertentu yang ditunjuk dari Mahkamah Agung, Departemen Agama, dan Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin langsung oleh Prof. DR. H. Busthanul Arifin, SH. yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung RI. Urusan Lingkungan Peradilan Agama.

b) Jangka waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak saat ditetapkannya SKB tersebut.

c) Tata kerja dan jadwal waktu pelaksanaan proyek ditetapkan sebagai terlihat dalam lampiran SKB.

- d) Biaya dibenbankan kepada dana bantuan yang diperoleh dari Pemerintah, Kepres. Nomor 191/SOSRROKH/ 1985 (Bnatuan Presiden RI.) dan Nomor 068/SOSRROKH/ 1985.
- e) Masa kerja proyek dimulai sejak tanggal 25 Maret 1985.
- f) Tugas pokok proyek adalah melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi dengan Kompilasi Hukum. Sasarannya adalah untuk mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum Nasional.
- g) Proses pengolahan hasil-hasil penelitian dilaksanakan oleh:
 - (1) Pelaksana bidang kitab-kitab/ jurisprudensi
 - (2) Pelaksana bidang wawancara
 - (3) Pelaksana bidang pengumpulan dan pengolahan data.

Mengenai pelaksanaannya ditempuh lewat 4 (empat) jalur, yaitu:

1. Jalur Penelitian Kitab-kitab⁵

⁵ Bagian ini telah menyusun daftar kitab-kitab fikih yang berpengaruh di Indonesia, dan dunia Islam, yang selama ini juga telah menjadi kitab-kitab rujukan bagi para hakim Peradilan Agama di Indonesia. Di samping itu disusun pula daftar-daftar pertanyaan/ masalah yang akan diteliti dan dicatat jawaban dan penyelesaiannya oleh setiap kitab yang telah terdaftar itu. Hal ini tentu bukan pekerjaan ringan, maka

2. Jalur Ulama
3. Jalur Jurisprudensi
4. Jalur Studi Perbandingan.⁶

Pertama: Jalur Penelitian Kitab-kitab

Melalui jalur ini, dimulai dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum/ kitab-kitab fiqh, minimal 13 kitab yang selama ini oleh Deprtemen Agama telah diwajibkan sebagai buku pedoman/ pegangan para Hakim Agama, dikumpulkan, dibuat berbagai permasalahan-permasalahan hukum, kemudian kepada Perguruan perguruan Tinggi Islam/ IAIN di Indonesia dimintakan untuk membuat bagaimana pendapat mereka masing-masing Terhadap kitab itu, dan juga kitab-kitab lainnya mengenai masalah-masalah hukum Islam yang telah disediakan, disertai argumentasi/ dalil-dalil hukumnya.

- (1) Materi hukum yang diteliti adalah sebanyak 160
- (2) Kitab yang diteliti adalah sebanyak 38 kitab.
- (3) Penelitian kitab-kitab tersebut adalah dilakukan oleh 7 IAIN.

Pemerintah dan Mahkamah Agung membuat kontrak kerja dengan 7 Istitut Agama Islam Negeri (IAIN), khususnya dengan fakultas syari'ah. Kontak kerja itu memberikan tugas kepada ke-7 IAIN untuk membahas kitab-kitab fikih tersebut., Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Cet. Ke-1, Gema Insani Press, 1996 M., hlm. 59.

⁶ Masrani Basran, *Kompilasi Hukum Islam* (Makalah) yang disajikan pada Orientasi Kompilasi Hukum Islam pada tanggal 22 s/d/ 26 Agustus 1995 di Medan, hlm.12.

- (4) Hasil penelitian tersebut diolah lebih lanjut oleh Tim Proyek pelaksanaan bidang kitab dan yurisprudensi.

Kedua : Jalur Ulama

Dengan terlebih dahulu menyiapkan 102 masalah sebagai materi wawancara, dan ini dibawa ke 10 lokasi para ulama sebagai sampel, dengan pertimbangan telah termasuk di dalamnya daerah-daerah yang tergolong panatis, biasa-biasa, dan kurang panatis, yaitu: Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram, dan Banjar Masin. Semua mereka ini diwawancarai, dan kegiatan ini sudah dapat diselesaikan pada bulan Oktober dan Nopember 1985.

Mengenai hasilnya, dapat diinformasikan bahwa seluruh ulama, baik yang bersifat perorangan, maupun golongan yang mewakili ormas-ormas Islam yang ada telah memberikan *support* (dukungan) dan partisipasi aktif dalam memberikan jawaban atas *questionaris* yang diajukan. Jawaban-jawaban ini telah dihimpun secara deskriptif.

Ketiga : Jalur Jurisprudensi

Melalui jalur ini, dilakukan upaya menghimpun putusan-putusan Peradilan Agama dari dulu sampai sekarang yang masih bisa ditemukan dalam arsip-arsip Pengadilan Agama, atau dari mana saja yang dapat ditemukan, dan ini akan dibukukan untuk mengakrabkan

Hakim Agama dengan jurisprudensi tersebut yang juga merupakan sumber hukum.

Penelitian yurisprudensi ini dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Peradilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku.⁷

Keempat : Jalur Studi perbandingan

Petugas yang ditunjuk untuk itu sengaja pergi ke luar negeri, terutama Timur Tengah, yaitu ke Maroko, Turki, dan Mesir untuk melihat secara langsung bagaimana penerapan Hukum Islam di sana, dan sejauh mana kemungkinan kita dapat menerapkannya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, serta latar belakang budaya kita. Petugas juga melakukan studi sistem, dan studi tentang putusan-putusan Peradilan Agama di sana.

⁷ Kalau dihitung usia Peradilan Agama di Indonesia dari tahun 1882 saja berarti Peradilan Agama telah menjalankan tugasnya dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari seratus tahun, apalagi kalau dihitung dari tahun sebelumnya, karena pada masa itu Peradilan Agama telah berjalan dengan baik. Segala keputusannya telah dirasiokan oleh kaum muslimin Indonesia sebagai hukum yang benar-benar hidup, dan telah sesuai dengan syari'at Islam menurut orang Islam Indonesia. Telah banyak keputusan Pengadilan Agama, kalau diteliti sangat mengagumkan, kadang-kadang ada masalah yang dulu telah diputus oleh Pengadilan Agama, kini seakan masih merupakan persoalan fikih yang hangat., *ibid.*, hlm. 59-60.

Selain dari 4 jalur seperti dikemukakan di atas ditemukan juga masukan dari:

- (1) Syuriah NU Jawa Timur yang mengadakan 3 kali *bahsul masa'il* di 3 pondok pesantren, yaitu; Tambak Beras, Lumajang, dan Sidoarjo.
- (2) Majelis tarjih PP Muhammadiyah melalui suatu seminar tentang kompilasi hukum Islam.

Sesudah terkumpul data dari hasil upaya keempat jalur ini, maka data tersebut diolah dan disusun secara sistematis sehingga termuat dalam tiga buku hukum menurut kebiasaan yang lazim dalam bahasa dan buku hukum di Indonesia ini. Hal ini direncanakan akan dapat diselesaikan dalam masa 2 (dua) tahun, dan untuk selanjutnya akan diadakan lokakarya ulama dan sarjana-sarjana hukum Islam yang secara khusus untuk membahas tiga buku hukum tersebut. Melalui upaya ini diharapkan akan tercapai konsensus ulama Indonesia, dan akan diterbitkan tiga buku hukum Islam, yaitu:

1. Buku I : Tentang Hukum Munakahat
2. Buku II : Tentang Hukum Kewarisan (Fara'id)
3. Buku III : Tentang Wakaf, Hibah, Sadaqah, Baitul Mal, Hadonah, dan lain-lain.

Tahap berikutnya diadakan wawancara dengan ulama/ sarjana-sarjana hukum Islam dan para ilmuan/ Cerdik Pandai. Kegiatan ini secara resmi telah dimulai pada tanggal 8 Oktober 1985 di Bandung, dengan amanat Wakil ketua Mahkamah Agung RI. atas nama Ketua Mahkamah Agung RI., dan amanat serta pembukaan

secara simbolis oleh Menteri Agama H. Alamsyah Ratu Perwira Negara, baru menyusul pelaksanaan wawancara di tempat-tempat yang ditentukan, yaitu; di Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, Proinsi-propinsi lainnya, seluruh Sumatera, Kalimantan, dan Nusa tenggara Barat.

Berikutnya dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Mahkamah Agung RI. H. Ali Said, SH., dan Menteri Agama RI. H. Munawir Sjadzali, MA. Tentang pelaksanaan lokakarya Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi pada bulan Pebruari 1988. Lokakarya tersebut dilakukan pada tanggal 2 s/d. 6 Pebruari 1988 dimaksud untuk mendengarkan komentar akhir para ulama dan cendikiawan muslim Indonesia.

Ulama dan cendikiawan yang diundang pada lokakarya tersebut adalah wakil-wakil yang representatif dari daerah penelitian dan wawancara dengan mempertimbangkan luas jangkauan pengaruhnya dan bidang keahliannya. Mereka yang ikut menghadiri lokakarya tersebut ada sebanyak 124 orang.

Lokakarya tersebut diselenggarakan selama 2 hari di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Ali Said, SH.

Proses selanjutnya setelah Tim Besar melakukan penghalusan redaksi naskah Kompilasi Hukum Islam tersebut di Ciawi Bogor maka naskah tersebut disampaikan oleh Menteri Agama kepada Presiden, oleh Menteri Agama dengan surat tanggal 14 Maret 1988 Nomor: MA/123/1988 Hal: Kompilasi Hukum Islam

dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di lingkungan Peradilan Agama, maka oleh Presiden lahirlah Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991 seperti apa yang ada dan masih berlaku sekarang ini.⁸

Akhirnya dari seluruh upaya yang dilakukan, ditemukanlah kesamaan pandangan tentang redaksi dan isi hukum Islam yang akan diberlakukan di Indonesia ini, yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁹

B. PERKAWINAN BERBEDA AGAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Bila kita memperhatikan pembicaraan perkawinan berbeda agama dalam Kompilasi hukum Islam, paling tidak kita akan dapat menjumpai empat pasal. Pasal-pasal tersebut adalah:

1. Pasal 40 KHI;

"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

⁸ Ibid.

⁹ Masrani Basran, *ibid.*

3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam."¹⁰
2. Pasal 44 KHI;
"Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."¹¹
3. Pasal 61 KHI;
"Tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din*."¹²
4. Pasal 116 KHI;
"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
 1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5

¹⁰ Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Dirbinbapera Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI., 1992/1993), hlm. 32.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 33.

¹² *Ibid.*, hlm. 39.

(lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.¹³

Dari pernyataan tersebut dapat diambil pemahaman sebagai berikut:

1. Pengertian perkawinan berbeda agama

Yang dimaksud dengan perkawinan berbeda agama dalam Kompilasi Hukum Islam, sekaligus yang menjadi bahasan dalam tulisan ini adalah perkawinan berbeda agama yang dilakukan oleh seorang muslim dengan non-muslim, sedang perkawinan non muslim dengan non muslim lainnya tidak termasuk dalam pembicaraan ini. Pemahaman seperti ini terlihat pada setiap pasal seperti telah dikemukakan di atas dengan: 1). Pasal 40 (c) dengan tegas menyebutkannya, dalam hal ini

¹³ *Ibid.*, hlm. 58-59.

menggunakan istilah “tidak beragama Islam”., 2). Pasal 41 juga mempergunakan istilah “tidak beragama Islam”., 3). Pasal 61 memakai istilah “perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din*” (seorang Islam dan yang lain tidak muslim)., 4). Pasal 116 (h) dengan istilah “peralihan agama atau murtad” (keluar dari Islam). Berhubung pengertian perkawinan berbeda agama dimaksud di sini adalah perkawinan yang dilakukan antara orang Islam dengan non-muslim, maka perkawinan non-muslim dengan non-muslim tidak termasuk di dalamnya, misalnya perkawinan antara seorang penganut Kristen dengan seorang Budha, atau yang lainnya.

Penentuan makna perkawinan berbeda agama seperti dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam hanya terbatas dalam perkawinan muslim dengan non muslim saja memang sangat wajar. Kompilasi Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang sengaja dibuat khusus bagi umat Islam, dan hanya berlaku bagi umat Islam saja, karenanya tidak heran kalau perkawinan non muslim dengan non muslim lainnya tidak dibicarakan sama sekali, misalnya, perkawinan Katolik dengan Protestan, Perkawinan Hindu dengan Budha, dan yang lainnya.

2. Ketentuan hukum perkawinan berbeda agama

Perkawinan berbeda agama tidak boleh dilakukan menurut Kompilasi Hukum Islam. Berhubung pasal 40 KHI dimasukkan dalam bab larangan kawin, demikian juga dengan pasal 44 KHI, maka petugas yang berwenang

dalam hal ini adalah PPN atau PPPN berkewajiban untuk tidak menerima dan melangsungkan perkawinan calon mempelai yang berbeda agama tersebut. Demikian juga halnya dengan pasal 61 KHI dimasukkan dalam bab pencegahan perkawinan, maka kendatipun petugas menerima perkawinan mereka yang berbeda agama, mungkin karena adanya kekeliruan/kesilapan, atau adanya kesengajaan mungkin karena suatu kepentingan, maka bagi orang yang diberi hak untuk mencegah dapat mempergunakan haknya untuk melakukan pencegahan perkawinan tersebut.

Orang yang dapat melakukan pencegahan perkawinan tersebut dapat dijumpai pada pasal 62 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilangsungkan oleh wali nikah yang lain.¹⁴

Selanjutnya pasal 116 dimasukkan ke dalam bab putusannya perkawinan, maka kendatipun perkawinan telah dilangsungkan, atau mungkin sudah dilangsungkan dari semula sebelum lahirnya Kompilasi Hukum

¹⁴ Ibid., hlm. 40.

Islam karena mereka menikah sebelum tahun 1991, perkawinan mereka bisa diakhiri (cerai) dengan alasan karena salah seorang di antara mereka tidak beragama Islam.

3. Pelaksanaan perkawinan berbeda agama setelah lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Idealnya, sejalan dengan kandungan Kompilasi Hukum Islam tersebut sejak tahun 1991 saat diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, perkawinan berbeda agama antara seorang muslim dengan non-muslim tidak terjadi lagi. Sejalan dengan adanya larangan perkawinan berbeda agama dalam Kompilasi Hukum Islam seperti telah dikemukakan, maka para ilmuwan dan pakar hukum muncul dan memperlihatkan sikap mereka dalam menyahuti maksud Kompilasi Hukum Islam tersebut. Secara umum sikap mereka itu dapat diklasifikasi kepada dua kelompok, sebagai berikut:

- a. Orang yang mengatakan bahwa perkawinan berbeda agama yang terjadi di Indonesia ini, paling tidak sejak lahirnya Kompilasi Hukum Islam itu sendiri tidak legal, malah tidak dapat dilangsungkan.

Di samping perkawinan berbeda agama itu tidak legal, dan tidak sah, juga banyak menimbulkan kecacauan. Misalnya perkawinan tersebut sering berakhir dengan perceraian. Kendatipun tidak berakhir dengan perceraian, tapi perkawinan ini akan menimbulkan konflik-konflik serius, di antaranya pertentangan yang melekat pada dirinya, tidak akan harmonis, tidak akan menyatu lahir dan batin, konflik anak-anak yang akan

lahir untuk mengikut agama ibu atau bapaknya, atau mungkin akan terjadi atheis karena tidak mengikut salah satu dari keduanya. Hal ini bertentangan dengan sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pasal 29 ayat (1) UUD 1945, juga bertentangan dengan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa perkawinan berbeda agama itu tidak perlu dilindungi, dan tidak perlu dibuat peraturan tersendiri, karena sudah ada peraturannya, dan melindungi perkawinan berbeda agama tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai cita hukum bangsa, dan hukum agama, selain hal itu tidak legal, juga tidak konstitusional.¹⁵

Ahmad Rofik juga turut mendukung hal tersebut, dia mengatakan untuk menjawab ketentuan hukum perkawinan berbeda agama tersebut, selain telah tegas dinyatakan di dalam pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, ini juga mesti dihubungkan kepada bunyi pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, yaitu: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sejalan dengan ini dia menyimpulkan bahwa perkawinan berbeda agama itu tidak diperbolehkan secara hukum, karena benar-benar termasuk salah satu dari halangan untuk melangsungkan perkawinan.¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI., *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No.5, Thn. 3, (Jakarta : Direktorat Badan Peradilan Agama Islam, 1992 M.), hlm. 72, 76.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 1995 M., hlm. 348.

- b. Orang yang mengatakan bahwa perkawinan berbeda agama yang ada di Indonesia ini adalah legal, sedang larangan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak dapat diberlakukan.

Pendapat ini dipedomani oleh sebahagian pakar hukum, di antaranya A. Hamid S. Attamimi, dia mengatakan bahwa KHI adalah himpunan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur, KHI bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis meskipun dia ditulis, bukan Undang-Undang, bukan Peraturan Pemerintah, bukan Keputusan Presiden, dan seterusnya. KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebahagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam di Indonesia ini.¹⁷

Dengan adanya tanggapan A. Hamid S. Attamimi tentang kedudukan Kompilasi hukum Islam yang tidak termasuk salah satu bahagian dari hukum tertulis Indonesia maka otomatis pasal-pasal yang ada di dalamnya pun yang secara tegas melarang terjadinya perkawinan berbeda agama itu tidak dapat dijadikan sebagai pedoman. Dengan demikian, kendatipun Kompilasi Hukum Islam telah ada, itu tidak dapat dipahami sebagai hukum yang mengikat seperti layaknya hukum positif.

Pendapat seperti ini dipedomaninya setelah ter-

¹⁷ Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 1417 H./ 1996 M.), hlm. 152 - 154.

lebih dahulu mencari tempat Kompilasi Hukum Islam itu sendiri dalam struktur sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Dia mengatakan bahwa Kompilasi itu diatur dengan INPRES No.1 tahun 1991. Ternyata setelah dicari dan disesuaikan dengan sumber hukum Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa INPRES tersebut tidak termasuk salah satu dari sumber hukum yang ada di Indonesia ini.

Dia mengatakan, setelah diteliti jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini dengan cara berjenjang dari atas ke bawah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang disetingkatkan dengan Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah.
3. Keputusan Presiden.
4. Keputusan Menteri.
5. Keputusan Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Departemen.
6. Keputusan Direktur Jenderal Departemen.
7. Keputusan Badan Negara.
8. Peraturan Daerah Tingkat I.
9. Keputusan Gubernur/ Kepala Daerah Tk.I.
10. Keputusan Daerah Tk.II.
11. Keputusan Bupati & Walikota/ Kepala Daerah Tk.II.¹⁸

Sejalan dengan pendapatnya ini, dia mengeritik kehadiran Kompilasi Hukum Islam dalam dua hal, yaitu:

¹⁸ *Ibid.*

- 1) Kompilasi hukum Islam diatur dengan INPRES (bukan KEPRES), kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama. Hal ini janggal, dikatakan demikian karena INPRES itu tidak termasuk dalam sumber hukum di Indonesia ini, lalu ditindak-lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama, hal ini termasuk sumber hukum, karenanya terdapat kesenjangan di antara keduanya. Dengan demikian apa yang dimaksud oleh KHI tersebut menjadi tidak jelas, apakah KHI tersebut berlaku secara umum abstrak, atau umum konkrit, juga apakah individual abstrak atau individual konkrit.
- 2) Dilihat dari segi isinya ternyata Keputusan Menteri Agama tersebut adalah sama dengan INPRES yang sudah lebih dahulu diberlakukan menimbulkan ketidaksesuaian, di mana INPRES tersebut menyuruh untuk menyebar-luaskan dan melaksanakan KHI, akhirnya dengan Keputusan Menteri Agama tersebut jadilah sifatnya individual, yaitu berlaku khusus di jajaran Departemen Agama saja.¹⁹

Berbicara mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem tata hukum Indonesia, memang secara umum para pakar terbagi kepada dua kelompok. Hal ini terlihat dalam tulisan Abdul Gani Abdullah, misalnya dia mengatakan;

Dilihat dari tata hukum Nasional, KHI dihadapkan pada dua pandangan:

¹⁹ Ibid.

Pertama;

Sebagai hukum tidak tertulis seperti yang diajukan oleh penggunaan instrumen hukum berupa INPRES yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundangan yang menjadi sumber hukum tertulis.

Kelemahan pandangan ini terletak pada pengabdian terhadap beberapa sumber pengambilan bagi penyusunan buku I dan III yang terdiri dari UU No. 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954, UU No. 1 Tahun 1974 Jo. PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 28 Tahun 1977. Sumber-sumber tersebut yang justru mengakrabkan KHI menjadi hukum tertulis. Buku II cenderung mendukung pendapat ini sekalipun dalam kenyataannya dia juga disusun dengan mengambil kaidah hukum dari jurisprudensi Indonesia sepanjang mengenai kewarisan Islam.

Kedua;

KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Sumber yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa KHI berisi *law* dan *rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan potensi *political power*.

INPRES No. 1 Tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk *political power* yang mengalirkan KHI dalam jajaran *law*. Pada akhirnya masyarakat pemakai KHI yang menguji kebenaran pandangan ini menjadikannya sebagai hukum tertulis.²⁰

²⁰ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi hukum Islam*

Berangkat dari adanya dua pandangan ini akan dapat menimbulkan akibat hukum yang bervariasi. Dengan berpedoman kepada pendapat kedua, yaitu kelompok orang yang mengatakan bahwa KHI adalah salah satu hukum tertulis yang sifatnya formil dan mengikat maka wajib mengamalkannya. Berhubung KHI tersebut melarang perkawinan berbeda agama bagi orang Islam, maka bagi orang Islam tidak boleh melakukan hal itu, akhirnya bagi orang yang tidak menginginkannya mengakibatkan perkawinannya tersebut tidak legal, tidak konstitusional, dan tidak sah. Selanjutnya kelompok orang pertama, dengan berpedoman kepada pendapat ini memandang bahwa kehadiran KHI hanya sebagai hukum pelengkap yang sifatnya tidak formil saja, dan tidak mengikat, karenanya dalam membicarakan ketentuan hukum perkawinan berbeda agama yang ada di Indonesia ini harus kita cari melalui peraturan perundang-undangan yang lain.

Bila kita hendak menyelesaikan ketentuan hukum perkawinan berbeda agama dengan tidak mempergunakan KHI ini maka umumnya acuan yang dapat dijadikan pedoman untuk diperbincangkan adalah Stb 1898 No. 158 tentang perkawinan campuran, dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nasional.

Dengan berpedoman kepada kedua ketentuan ini pun ternyata para ahli hukum masih mempunyai pan-

dangan yang berbeda. Mohammad Daud Ali mengatakan, untuk hal ini ada tiga pandangan sebagai berikut:

1. Kelompok orang yang mengatakan bahwa perkawinan berbeda agama sekarang ini tetap bisa dilaksanakan.

Mereka mengatakan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan berbeda agama dapat mempedomani Stb. 1898 No. 158 tentang perkawinan campuran, karena Stb. 1898 ini dipahami masih tetap berlaku. Peraturan tersebut menentukan bahwa perbedaan agama tidak dapat dijadikan penghalang untuk melangsungkan perkawinan. Pada ketentuan lain dinyatakan bahwa Pegawai Catatan Sipil tidak boleh menolak untuk mencatat, bahkan harus mengawinkan mereka yang sedang menyala api cintanya tersebut.

Menurut mereka, perkawinan adalah soal kehidupan dalam masyarakat di dunia ini, karenanya serahkan saja sepenuhnya kepada hukum ciptaan manusia untuk mengaturnya. Hal ini sejalan dengan pendapat W.L.G. Lamaire (seorang Belanda yang menjabat Direktur Lembaga Dokumentasi Hukum Seberang Lautan).

2. Kelompok orang yang mengatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan berbeda agama.

Kelompok ini berpendapat bahwa pada saat sekarang ini perkawinan berbeda agama adalah hampa hukum. Berhubung dalam bentuk realita di negara kita yang bervariasi penganut agama senantiasa saja dijumpai orang

yang akan melangsungkan perkawinan dengan perbedaan agama. Sejalan dengan ini, kata orang kelompok ini berpendapat bahwa perlu merumuskan ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut. Sekaligus kelompok ini mempunyai persamaan dengan kelompok pertama, yaitu sama-sama dapat menerima perkawinan berbeda agama. Bedanya adalah, kelompok kedua ini mengatakan UU No.1 Tahun 1974 melalui pasal 66 telah membatalkan ketentuan Stb. 1898 No. 158, sedang UU No. 1 Tahun 1974 tersebut tidak memberikan aturan baru tentang perkawinan berbeda agama itu, karenanya sekarang ini perkawinan berbeda agama berada dalam kondisi hampa hukum. Berbeda halnya dengan kelompok pertama yang berpendapat bahwa Stb. 1898 No. 158 tetap berlaku, karena UU No. 1 tahun 1974 itu hanya bersikap membatalkan peraturan lain sepanjang UU No. 1 Tahun 1974 tersebut telah mengaturnya, ternyata UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan berbeda agama, maka peraturan lama masih tetap diberlakukan.

3. Kelompok orang yang mengatakan bahwa perkawinan antar orang yang berbeda agama itu bertentangan dengan agama, Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia ini.

Kelompok ini berpendapat bahwa pembuat Undang-Undang, yaitu Pemerintah dan DPR tidak menghendaki adanya perkawinan berbeda agama tersebut. Hal ini dengan tegas terlihat pada pasal 2 ayat (1) UU No. 1

tahun 1974 mengenai sahnya perkawinan tersebut didasarkan kepada sahnya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, padahal tak satu pun agama dan kepercayaan di Indonesia ini yang memandang sah perkawinan berbeda agama tersebut. Demikian juga halnya dengan pasal 8 huruf (f) tentang larangan perkawinan yang mengatakan; Dilarang kawin antara dua orang yang mempunyai hubungan di mana oleh agamanya dilarang kawin. Dengan demikian perkawinan berbeda agama itu tidak sejalan dengan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini.²¹

Meskipun Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan berbeda agama, dan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk melakukan pencegahan terhadapnya, ternyata para pakar masih berbeda pendapat tentang memaknai larangan itu bagi umat Islam Indonesia. Kajian akan hal ini akan lebih jelas terlihat dalam analisis berikut ini.

C. ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN BERBEDA AGAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pada tanggal 10 Juni 1991 Kompilasi Hukum Islam telah lahir melalui saluran hukum INPRES No. 1 Tahun 1991, kemudian ditindak-lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991 maka secara resmi berlakulah

²¹ Departemen Agama RI., hlm. 73-74.

Kompilasi Hukum Islam bagi seluruh umat Islam Indonesia.

Di antara kandungan Kompilasi Hukum Islam itu ada menyangkut ketentuan perkawinan berbeda agama. Hal itu dapat dijumpai dalam empat tempat, yaitu pada pasal 40 dan 44 bab VI tentang larangan kawin, Kompilasi Hukum Islam melarang umat Islam melakukan perkawinan dengan non-muslim. Kemudian pasal 61 bab X tentang pencegahan perkawinan, maka perkawinan seorang muslim dengan non-muslim dapat dicegah oleh orang-orang yang telah diberi hak untuk dapat melakukan pencegahan. Terakhir pada pasal 116 bab XVI tentang putusnya perkawinan, maka perkawinan pasangan suami isteri yang sama-sama beragama Islam dapat putus akibat salah seorang dari mereka keluar dari Islam.

Berbicara mengenai otoritas KHI untuk diberlakukan bagi umat Islam Indonesia tampaknya para ahli hukum berbeda pendapat, dan dapat disimpulkan kepada dua kelompok. Kelompok pertama berpandangan bahwa KHI adalah termasuk salah satu dari hukum tertulis yang bersifat memaksa karenanya ia termasuk salah satu sumber hukum formal di Indonesia ini, jadi KHI wajib diamalkan. Dengan demikian, berhubung KHI telah melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama itu inkonstitusional dan tidak legal. Kelompok kedua orang yang mengatakan bahwa KHI tersebut tidak termasuk salah satu sumber hukum formal di Indonesia ini, karena dia hanya diatur dengan INPRES, sedang INPRES tersebut tidak termasuk

bagian dari sumber hukum formal tersebut di Indonesia ini. Sejalan dengan ini KHI tidak mesti dilaksanakan (dia hanya bersifat persuasif), jadi kendati pun KHI telah melarang perkawinan berbeda agama bagi orang Islam, itu tidak dapat dipahami sebagai kemestian tetapi hanya anjuran, maka bagi orang yang akan melakukan perkawinan tersebut menurut kelompok ini bisa memberlakukan ketentuan STb. 1898 No. 158 karena hal itu dipandang masih berlaku, dan perkawinan mereka ini dipahami legal dan konstitusional. Sebagaimana dari kelompok ini ada orang yang berpendapat bahwa Stb. 1898 No. 158 tersebut telah batal, sedang peraturan lain tidak ada yang memuatnya, karenanya sampai saat ini perkawinan berbeda agama masih dalam keadaan hampa hukum, maka bagi pihak yang berwenang kiranya diharapkan akan menciptakan peraturan tentang itu. Demikianlah pandangan yang bervariasi tentang perkawinan berbeda agama dalam KHI tersebut. Sejalan dengan ini, penulis melihat bahwa kedua kelompok ini sama-sama mempunyai keunggulan yang dapat mengajak kita untuk turut mempedomaninya, sebaliknya juga sama-sama mempunyai kelemahan yang menurut pemikiran rasional hal tersebut mengandung gef yang membuat kurang intres untuk mengikutnya.

Pendapat kelompok pertama terlihat cukup ideal, di mana pendapat ini ternyata sesuai dengan ajaran Islam bahkan ajaran agama lain yang ada di Indonesia ini, yaitu perkawinan berbeda agama itu dilarang, di samping hukumnya haram, juga tidak legal, dan inkonstitusional. Dengan mengamalkan ini orang akan selamat dunia

akhirat. Selamat di dunia dalam hukum bernegara, dan konflik-konflik perkawinan berbeda agama, dan selamat di akhirat dari siksa (dosa).

Pada sisi lain terlihat pendapat ini menyimpan sisi kelemahan, kita tidak selamanya bisa bercerita yang ideal, di mana kita mungkin dipengaruhi keinginan subjektif, tetapi ada kalanya kita dihadapkan kepada realitas yang ada. Kita tidak bisa mengingkari bahwa KHI tersebut diatur oleh INPRES, sedang INPRES tersebut tidak termasuk salah satu sumber hukum formal yang ada di Indonesia ini, karenanya perkawinan berbeda agama yang diatur oleh KHI tersebut tidak dianggap sebagai hukum tertulis yang bersifat formal dan memaksa, maka tidak mesti melaksanakannya. Bila hal itu dinyatakan telah mengemban aspirasi UUD 1945, dan UU No. 1 Tahun 1974 sehingga ini dipahami sebagai sumber hukum, maka bisa dijawab dengan; UUD 1945 tidak menjelaskan perkawinan berbeda agama secara eksplisit karena UUD 1945 tersebut sifatnya dasar yang memberikan pedoman umum. Demikian juga halnya dengan UU No. 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan hal itu secara tekstual, bila ada orang mengatakan perkawinan berbeda agama itu tidak sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, itu sifatnya adalah tafsiran, bila demikian halnya orang lain juga bisa menafsir beda dengan tafsiran yang ada. Tafsiran itu sifatnya relatif, karenanya hukum perkawinan berbeda agama itu sifatnya relatif, maka bagaimana mungkin kita bisa mengkonkritkannya menjadi tidak sah. Kalau memang keinginan pemerintah dan lembaga

legislatif adalah melarang perkawinan berbeda agama seperti yang diklaim, kenapa tidak secara langsung saja membuat peraturan yang melarang perkawinan berbeda agama tersebut secara tegas dengan sarana salah satu dari perangkat hukum formal, misalnya dengan melahirkan Undang-Undang. Dengan demikian pendapat ini susah untuk ditegakkan, keinginan di hati saja tanpa diaplikasikan dalam sinyal-sinyal formal tidak dapat dijadikan sebagai pegangan formal. Karenanya KHI terlihat hanya sebagai alternatif bagi orang yang ingin mengamalkannya secara sukarela.

Pendapat kelompok kedua juga terlihat cukup argumentatif, karena logika mereka bisa mereka jalankan secara netral, sehingga mereka tidak terperangkap kerancuan berpikir subjektif, kendatipun mungkin mereka secara moril sulit untuk menerima perkawinan berbeda agama, tetapi mereka bisa memilah-milah lokasi ilmiah dengan lokasi ideologis, berhubung mereka bercerita ilmiah maka aspek ilmiah mereka lakukan secara objektif. Pada sisi lain terlihat pendapat kelompok ini memang menyimpan kelemahan di mana Kompilasi Hukum Islam yang telah lahir dengan menyita waktu banyak, dan menghabiskan dana yang besar, para pengabdikan hukum juga telah penat dan lelah, juga telah dengan secara serius dimasyarakatkan, semua ini untuk apa kalau bukan untuk dilaksanakan. Negara kita memang negara hukum, tapi bukan negara agama, negara kita adalah negara hukum yang melindungi hak-hak orang beragama. Adanya upaya penghapusan tujuh kata dari Piagam Jakarta pada saat baru saja memprok-

lamirkan negara yang kita cintai ini adalah dalam rangka menghindari adanya anggapan bahwa negara kita ini adalah negara agama, maka anggapan itu bisa saja muncul bila terlalu sering menciptakan hukum melalui perangkat formal bagi kelompok agama tertentu. Dengan demikian perkawinan berbeda agama tetap tidak diberikan aturan konkrit dan eksplisit.

Baik kelompok kedua yang mengatakan perkawinan berbeda agama dapat mengambil ketentuan Stb. 1898 No. 158, demikian juga yang berpendapat bahwa ketentuan perkawinan berbeda agama itu sekarang dalam keadaan hampa hukum, namun keduanya termasuk dalam kelompok yang tidak sependapat dengan kelompok pertama, di mana mereka ini masih tetap berkeyakinan bahwa perkawinan berbeda agama di Indonesia ini masih bisa dilangsungkan, dan hal itu dipahami sah, legal, dan konstitusional. Dengan demikian tanggapan terhadap kelompok kedua sama seperti telah dikemukakan di atas.

Sejalan dengan hal tersebut, bila penulis diajak untuk turut memberikan tanggapan, maka penulis lebih condong dengan pendapat kelompok kedua, yaitu perkawinan berbeda agama di Indonesia ini masih tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kehadiran KHI melarangnya tidak dapat dijadikan sebagai pedoman yang bersifat memaksa. Sejalan dengan hal ini penulis memberikan alasan selain dari pada apa yang telah dikemukakan dalam polemik pembicaraan perkawinan berbeda agama itu. Alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam bentuk realitas perkawinan berbeda agama terlihat berjalan terus, kemudian petugas yang berwenang dalam hal ini Pegawai Catatan Sipil tetap melayani kepentingan mereka, karenanya pernikahan mereka resmi, serta memiliki bukti autentik pernikahan, yaitu surat nikah. Kalau memang hal ini dipahami tidak sah, tidak legal, dan inkonstitusional maka perbuatan mereka bisa tergolong pidana, perbuatan mesum mereka itu tidak memperoleh izin resmi, dan bisa dipandang mengganggu ketentraman umum. Karenanya bisa dihadapkan ke muka sidang setelah terlebih dahulu mereka ditangkap dan ditahan untuk dilakukan penyidikan, dan penyelidikan untuk selanjutnya diajukan ke muka sidang dan akhirnya diberikan keputusan. Ternyata situasi seperti ini tidak pernah dijumpai di negara kita ini, karenanya perkawinan berbeda agama dipahami masih tetap dapat dilakukan.
2. Keikutsertaan Menteri Agama dalam mengatur perkawinan berbeda agama dipahami kurang proporsional. Dikatakan demikian karena diketahui induk Pengadilan Agama waktu itu ada dua, yaitu Menteri Agama dan Mahkamah Agung. Kedua ini mempunyai tugas dan kekuasaan masing-masing dan sifatnya berbeda. Mahkamah Agung membidangi seluruh Pengadilan yang ada di Indonesia ini dalam aspek teknis fungsional yudikatif, sedang Menteri Agama dalam bidang organisatoris, administratif, dan finansial khusus untuk Pengadilan Agama.²² Dengan

²² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*,

demikian sikap Menteri Agama mengatur KHI sebagai hukum yang akan diterapkan bagi masyarakat muslim lewat Pengadilan Agama dipahami telah masuk kepada aspek yudikatif. Penanganan Menteri Agama dalam aspek yudikatif itu adalah melampaui batas, idealnya hal itu dilahirkan oleh Mahkamah Agung, atau lembaga legislatif, atau pembuat peraturan yang ada sesuai dengan keberadaan sumber hukum formal khusus di bidangnya masing-masing. Dengan demikian akan sulit untuk dapat diterima bila suatu peraturan dilahirkan melalui prosedur yang tidak proporsional untuk dikatakan sebagai hukum formal yang mengikat.

3. Sikap KHI melarang perkawinan berbeda agama terlihat tidak tegas. Sikap KHI ini terlihat dalam keraguan, di satu sisi melarang perkawinan berbeda agama, tapi pada sisi lain tetap membolehkannya. Hal ini terlihat dengan jelas pada pasal-pasal yang mengatur perkawinan berbeda agama tersebut. Pasal 40, 44, dan 61 terlihat sejalan, yaitu tidak menghendaki perkawinan berbeda agama, karena pada pasal 40 dan 44 tersebut KHI dengan tegas melarangnya, dan pada pasal 61 dikatakan bahwa para pihak yang mempunyai hak dapat melakukan pencegahan terhadapnya. Berbeda halnya dengan

(Jakarta : Rajawali Press, Cet. Ke1, 1991 M.), hlm. 10-18., Juga, M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Pustaka Kartini, Cet. Ke-1, 1990 M.), hlm. 94-98.

pasal 116 yang dinilai tidak serius membendung orang untuk melakukan perkawinan berbeda agama. Pasal 116 tersebut menyatakan bahwa bagi pasangan suami isteri yang telah menikah, lantas salah seorang di antara mereka murtad (keluar dari Islam) KHI memberi kesempatan bagi salah satu yang masih tetap dengan ajaran dan agama Islam untuk melakukan perceraian bila ternyata mereka tidak rukun. Penyebutan KHI tentang "beralih agama yang mengakibatkan terjadinya ketidak rukunan" ini penuh dengan kesia-siaan. Dikatakan demikian karena hal ini memberi pemahaman kendatipun salah satu pihak murtad, kalau mereka tetap rukun maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Selanjutnya terlihat fungsi murtad sebagai alasan melangsungkan perceraian itu tidak ada sama sekali, karena yang berpengaruh di situ adalah tidak rukunnya, sebab walaupun mereka tetap seagama bila mereka tidak rukun dapat melangsungkan perceraian. Kalau di saring-saring, sebenarnya alasan perceraian itu di Indonesia ini sama dengan di Barat, yaitu adanya "ketidak-rukunan" oleh suami dan isteri itu, ternyata dari delapan alasan perceraian yang yang dikemukakan oleh KHI itu tak satu pun yang bersifat aktif, tetapi semuanya dihubungkan kepada adanya keberatan pihak lain dari suami isteri itu, lantas karena keberatan inilah suami isteri itu dimungkinkan untuk melakukan perceraian, maka "keberatan" inilah sesungguhnya "tidak rukun" tersebut. Dengan

demikian pencantuman kata murtad atau beralih agama di situ tidak mempunyai fungsi sama sekali, toh tidak rukun itu sendiri (tanpa beralih agama sama sekali pun) telah mampu membuat suami isteri itu bercerai.²³

4. Larangan KHI untuk melakukan perkawinan berbeda agama tidak fungsional. Dikatakan demikian karena di Indonesia ini ada dua lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan mencatat perkawinan, yaitu PPN, dan PPPN dari kantor Urusan Agama, ini khusus bagi yang beragama Islam, baik calon suami maupun calon isteri. Kemudian pegawai yang sama dari Kantor Catatan Sipil untuk perkawinan selain orang Islam. Berangkat dari ketentuan ini, bila pasangan calon suami isteri tersebut ingin melakukan perkawinan berbeda agama maka yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil yang berada di bawah kekuasaan Departemen Dalam Negeri lalu mereka ini pergi ke kantor Catatan Sipil tersebut untuk mendapatkan pengawasan perkawinan, sekaligus untuk dapat dicatatkan dan memiliki akta nikah. Dengan kenyataan seperti ini PPN dan PPPN yang ada di sana akan menerima mereka dan menanganinya

²³ Salah satu alasan untuk melangsungkan perceraian tersebut adalah di antara suami isteri itu senantiasa terjadi pertengkaran yang mengakibatkan ketidak rukunan di antara mereka. Hal ini sesuai dengan kandungan pasal 19 PP No. 9 tahun 1975., Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia, (Medan : IAIN Press, 1995 M.), hlm. 68.

sesuai dengan prosedur yang ada. Dapat ditambahkan bahwa Kantor Catatan Sipil tersebut tidak menjadikan perbedaan agama tersebut menjadi kendala bagi calon suami isteri tersebut untuk melangsungkan perkawinan, karena dalam sleksi perkawinan tersebut mereka tidak mempedomani, dan memberlakukan KHI. KHI hanya berlaku untuk jajaran Departemen Agama, sedang Kantor Catatan Sipil tersebut berada di bawah kekuasaan Menteri Dalam Negeri. Bila dalam tahap awal ternyata Petugas yang berwenang di Catatan Sipil tidak menyeleksi aspek perbedaan agama untuk dijadikan larangan dalam perkawinan pihak mempelai, maka jika ada orang yang ingin melakukan pencegahan sesudahnya, tentu akan dengan mudah petugas tersebut mengatakan bahwa KHI tidak termasuk salah satu hal yang dijadikan pedoman untuk melangsungkan perkawinan di kantor ini. Dengan demikian kendatipun kita capek untuk memberlakukan KHI dalam hal menghalangi berlangsungnya perkawinan berbeda agama tidak akan besar pengaruhnya untuk menghalangi orang yang berkepentingan melangsungkan perkawinan berbeda agama, ibarat pepatah anjing menggonggong kafilah lalu, kita capek menghalanginya namun perkawinan berbeda agama itu berlangsung terus.

5. Hal yang lebih ironis, sesungguhnya bisa saja terjadi, yaitu adanya orang yang rela saja mengatakan dirinya masuk Islam dengan tujuan supaya bisa menikah dengan seorang yang beragama Islam, karena KHI secara tegas melarang muslim menikah dengan non

muslim, lalu dengan Islamnya dia, maka persyaratan muslim sebagai salah satu aspek seleksi yang diterapkan dalam perkawinan menurut KHI membuat dia lolos dalam seleksi tersebut, artinya bolehlah dia melakukan perkawinan dengan seorang muslim yang diidamkannya tersebut. Karena sebenarnya masuk Islamnya itu hanya dalam ucapan belaka, sedang hatinya tidak sama sekali, lalu setelah dalam perkawinan dia kembali ke agamanya, dan memperlihatkan komitmen dan konsistennya dalam agamanya semula maka KHI tidak punya cara lagi untuk menyatakan bahwa perkawinan mereka ini batal karena memang tidak ada aturan seperti di dalamnya. KHI hanya memberi jalan, dan kesempatan bagi pasangan yang muslim tersebut untuk menggugat cerai pasangannya yang murtad tadi ke Pengadilan jika ternyata mereka tidak rukun dengan sebab murtadnya pasangannya tersebut. Seperti telah dikemukakan, yang potensial di sini dijadikan alasan untuk melakukan perceraian tersebut adalah tidak rukunnya itu, bukan murtadnya sama sekali. Karenanya, jangankan murtad, apa saja yang membuat suami isteri itu tidak rukun, misalnya; persoalan belanja, suami yang lama-lama baru pulang ke rumah, isteri yang senantiasa bertandang di rumah tetangga, menyangkut penentuan tempat tinggal, dan yang lainnya, akan sama halnya dengan murtad tadi, maka bagi pasangan yang keberatan dengan hal itu akan bisa mengajukan perceraian ke Pengadilan. Dengan tegas dapat dinyatakan, sebenarnya pencantuman poin ke-8 dari

alasan perceraian itu sama sekali tidak ada gunanya "*wujuduhu ka `adamini*", meskipun dengan tanpa mencantumkan hal ini, toh suami isteri itu akan tetap bisa mempergunakan haknya untuk cerai dengan alasan "tidak rukun" dengan tanpa terbatas sama sekali. Dengan demikian seolah poin itu hanya sekedar menghias pasal yang tidak ada artinya sama sekali, diperlihatkan ke publik tentang betapa islaminya KHI tersebut lewat poin kedelapan tadi, ternyata hanya memiliki nihil makna.

6. Dimungkinkannya seorang pria yang mengaku Islam (padahal hatinya tidak) menikah dengan wanita muslimah cenderung dapat merugikan umat Islam. Berapa banyak wanita muslim yang menikah secara Islam dengan pasangannya yang mengaku muslim juga ternyata kecewa belakangan. Sewaktu mereka susah, rumah tangga aman damai, si suami diperjuangkan supaya berkarir dan berprestasi, bahkan termasuk dengan bantuan orang tua dan pihak keluarga lainnya, ternyata setelah suami isteri itu jaya, dan suami telah kuat maka si suami itu pun murtad. Dalam keadaan seperti ini si isteri, seorang wanita muslimah sering tidak kuat imannya untuk menghadapi kenyataan hidup, di mana kalau dia sigap, dan tegar untuk melakukan perceraian, dia sudah berpikir panjang tentang statusnya yang akan menjadi janda, dalam keadaan terlantar, karena kondisi ekonominya yang sangat sederhana, pemikiran dengan anak-anaknya, dan lain sebagainya. Akhirnya tidak jarang si wanita dalam keadaan seperti ini terpaksa memperlihatkan per-

setujuannya dengan keadaan suaminya, demi status sosial, dan ekonominya yang lebih baik. Yang lebih memprihatinkan lagi, jika dia dipaksa oleh suaminya untuk ikut murtad memeluk agama suaminya tersebut, *na'uzu bi Allah min zalik*.

BAB IV

PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT JARINGAN ISLAM LIBERAL (JIL) INDONESIA

A. JARINGAN ISLAM LIBERAL INDONESIA

- KEORGANISASIAN

Jaringan Islam Liberal adalah forum intelektual terbuka yang mendiskusikan dan menyebarkan liberalisme Islam di Indonesia. Forum ini bersekretariat di Teater Utan Kayu, Jalan Utan Kayu no. 68 H, Jakarta, sebidang tanah milik jurnalis dan intelektual senior Goenawan Muhammad.

Forum ini berawal dari sekedar komunitas diskusi beberapa intelektual muda Muslim di ISAI (Institut Studi Arus Informasi). Forum ini berkembang menjadi forum diskusi, dapat dihubungi via internet beralamat di islamliberal@yahoogroups.com. Pada awal tahun 2001, forum ini mendapat bantuan yang sangat besar dari jurnalis senior Goenawan Muhammad, baik berupa

sebidang tanah yang dijadikan sekretariat resmi, maupun berupa pendanaan. Sejak Februari 2001 pula forum ini mulai aktif sebagai Jaringan Islam Liberal, terutama dalam menyelenggarakan diskusi-diskusi. Pada usia awalnya, perkembangan forum ini juga tak lepas dari dukungan dan kontribusi beberapa intelektual lainnya, baik di luar maupun intra JIL, seperti Nurcholis Madjid, Azyumardi Azra, Komaruddin Hidayat, Ahmad Sahal, Budhy Munawar-Rachman, Hamid Basyaib, Luthfi Assaukanie, Rizal Mallarangeng, Denny J. A., Ihsan Ali-Fauzi, A.E. Priyono, Samsurizal Panggabean, Ulil Abshar Abdalla, Saiful Mujani dan Hadimulyo. JIL tidak punya sistem keanggotaan untuk menjaga kelonggaran dan inklusivisme. Saat ini koordinator JIL adalah Ulil Abshar Abdalla, seorang tokoh Islam liberal muda yang juga mengetuai Lakpesdam NU.

Pendanaan JIL juga datang dari The Asia Foundation sebuah yayasan yang peduli terhadap Liberalisme, pluralisme hingga kesetaraan gender. Dari yayasan inilah Ulil Abshar juga pernah mendapat penghargaan.

Pernyataan langsung JIL secara resmi mengatakan; Nama "Islam liberal" menggambarkan prinsip-prinsip yang kami anut, yaitu Islam yang menekankan kebebasan pribadi dan *pembebasan* dari struktur sosial-politik yang menindas. "Liberal" di sini bermakna dua: *kebebasan* dan *pembebasan*. Kami percaya bahwa Islam selalu dilekati kata sifat, sebab pada kenyataannya Islam ditafsirkan secara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penafsirnya. Kami memilih satu jenis tafsir, dan dengan demikian satu kata sifat terhadap Islam, yaitu "liberal". Untuk

mewujudkan Islam Liberal, kami membentuk Jaringan Islam Liberal (JIL).

Di Indonesia, organisasi ini masih terbilang cukup muda, karena baru berusia 5 (lima) tahun, dia lahir di Jakarta pada tahun 2001. Dalam usianya yang masih kecil ini, ternyata kiprahnya cukup besar karena telah turut tampil meramaikan pemikiran keislaman dan keagamaan secara umum, bahkan cukup kontributif dalam kancah kajian keilmuan.

Untuk lebih konkritnya pemahaman terhadap mereka ini dikemukakan dua pertanyaan sekaligus jawabannya sebagai berikut;

1. Apa Tujuan Jaringan Islam Liberal?

Tujuan utama kami adalah menyebarkan gagasan Islam Liberal seluas-luasnya kepada masyarakat. Untuk itu kami memilih bentuk jaringan, bukan organisasi kemasyarakatan, maupun partai politik. JIL adalah wadah yang longgar untuk siapapun yang memiliki aspirasi dan kepedulian terhadap gagasan Islam Liberal.

2. Apa misi JIL?

Pertama, mengembangkan penafsiran Islam yang liberal sesuai dengan prinsip-prinsip yang kami anut, serta menyebarkannya kepada seluas mungkin khalayak.

Kedua, mengusahakan terbukanya ruang dialog yang bebas dari tekanan konservatisme. Kami yakin, terbukanya ruang dialog akan memekarkan pemikiran dan gerakan Islam yang sehat.

Ketiga, mengupayakan terciptanya struktur sosial dan politik yang adil dan manusiawi.¹

PEMIKIRAN

Pemikiran JIL dalam aspek hukum Islam sebagai dikemukakan oleh Fajar Kuniarto lebih menukik pada pemaknaan fikih. Fikih sebagai bentuk pemahaman manusia terhadap nash syari'at menempatkannya sebagai sesuatu yang propan (duniawi), artinya, dapat saja dilakukan oleh setiap orang yang memiliki kapasitas untuk memahaminya. Fikih sebagai produk intelektual pada masa dan dalam konteks tertentu yang bersifat dinamis kini berubah menjadi stagnan serta kaku.

Hingga kini, sebagian besar umat Islam masih meyakini bahwa fikih yang dihasilkan ulama-ulama masa keemasan Islam bisa menyelesaikan berbagai persoalan kekinian. Namun, fikih sebagai produk intelektual pada masa dan dalam konteks tertentu yang bersifat dinamis kini berubah menjadi stagnan serta kaku. Sebenarnya hakikat fikih bukan mengajarkan kekakuan, tapi pelaksana fikih itu yang menganggapnya demikian.

Menurut Fajar Kuniarto, ada tiga penyebab mengerasnya kecenderungan mempertahankan produk fikih klasik tersebut sampai kini, sebagai berikut;

Pertama;

Fikih diidentikkan dengan syariat. Padahal, dari

¹ redaksi@islamlib.com

sisi kebahasaan saja, fikih yang berarti "paham" sangat berbeda dari syariat yang berarti "jalan". Perbedaan itu berlanjut pada dataran istilah. Abdul Wahhab Khallaf dalam Ilmu Ushul Fiqh mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang praktis yang diambilkan dari dalil-dalilnya secara rinci.

Dalam hal ini, fikih dimaknai sebatas pengetahuan mengenai syariat dan keduanya tidak identik. Terdapat perbedaan yang tajam antara pengetahuan soal syariat dan hukum syariat itu. Fikih akhirnya memiliki ranah yang berbeda dari ranah syariat. Syariat sejatinya adalah ajaran-ajaran ilahi yang universal dan ditujukan untuk kemaslahatan seluruh manusia. Syariat dalam pengertian seperti itu tidak bersifat diskriminatif pada kelompok atau individu tertentu.

Sebagai sebuah "jalan", syariat ibarat rambu-rambu yang mengontrol pengguna jalan agar selamat sampai tujuan. Berbeda dari fikih sebagai pemahaman mengenai "jalan" itu. Jalannya satu. Tapi, karena setiap orang tidak tahu persis jalan sebenarnya, mereka lalu mendeteksi jalan tersebut dengan sudut pandang masing-masing, sehingga muncullah keragaman jalan. Karena itu, dalam ruang lingkup pemahaman (fikih), tidak ada yang memiliki otoritas tertinggi, sehingga bisa menyalahkan pemahaman lain dan mengklaim pandangannya sendiri adalah yang paling benar.

Fikih selalu memberikan ruang yang luas bagi pemaknaan lain mengenai sebuah "jalan" tersebut. Karena itu, dalam sejarah pertumbuhan fikih, perbedaan pendapat antara ulama yang satu dan lainnya bukan merupa-

kan hal baru. Perbedaan antara Imam Syafii sebagai guru dan Imam Ahmad bin Hanbal sebagai murid tidak berdampak apa-apa bagi hubungan keduanya. Tidak ada yang mengklaim kebenaran berada di pihak mereka saja.

Kedua;

Menyangkut asumsi tentang sakralitas fikih. Ketika fikih diidentikkan dengan syariat, konsekuensinya, ia akan dianggap sakral. Umat memandang fikih sebagai barang yang sakral karena diambil dari dalil-dalil Al-quran dan hadis. Dengan pandangan ini, mengubah fikih dipahami sebagai tindakan mengubah syariat yang sakral. Pandangan tersebut diperkuat hadis yang dipahami secara keliru, "Barangsiapa yang membuat hal-hal yang baru dalam masalah agama, maka dia tertolak." Atau, hadis yang menyatakan, "Sebaik-baik petunjuk adalah Kitab Allah dan sunah Rasul-Nya. Dan, seburuk-buruknya adalah bid'ah (inovasi), karena setiap bid'ah adalah sesat."

Tidak ada yang keliru pada kedua sabda Rasulullah itu. Tapi, pemahaman yang kurang tepat merintangi kedinamisan serta keterbukaan fikih. Betul bahwa syariat pada hakikatnya adalah sakral dan absolut. Karena itu, mengubah syariat adalah terlarang. Karena syariat bersifat absolut dan mutlak, ia adalah universal, bisa berlaku di segala tempat dan keadaan. Berbeda dari fikih, ia terbatas konteks penafsir dan berlaku dalam kurun serta tempat tertentu.

Ketiga;

Tentang hegemoni kalangan konservatif yang sudah lama bercokol, sehingga dianggap memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan hukum-hukum agama. Misalnya, dalam konteks Indonesia, kalangan yang dianggap memiliki otoritas itu telah menjadi institusi nasional yang mendapatkan legalitas negara. Setiap saat mereka siap dimintai fatwa atau memfatwakan hukum yang bisa jadi berlaku pada skala nasional. Pendek kata, fikih telah menjadi institusi di bawah kendali pemerintah yang setiap saat potensial diundang-undangkan. Karena itu, tidak mengherankan, menguatnya suara-suara yang menuntut ditegakkannya syariat Islam (juga) ditopang keberadaan institusi legal tersebut.

Mereka yang menuntut syariat menjadi undang-undang negara biasanya berangkat dari asumsi bahwa syariat adalah sakral -karena berasal dari Tuhan-, sehingga harus diundangkan untuk mengikat seluruh umat.

Namun, itu sungguh keliru. Sebab, mereka sebetulnya menyuarakan fikih yang dianggapnya sebagai syariat. Misalnya, mengenai hukum potong tangan, mereka menganggapnya sebagai syariat. Padahal, itu hanyalah sebuah produk fikih. Syariat atau hal yang menjadi substansi ajaran potong tangan, yaitu larangan merugikan orang lain secara sengaja, sama sekali tidak disinggung. Ia hanya disinggung dalam dataran hikmah hukum.

Akibatnya, paham sakralitas dan otoritas hampir selalu mewarnai kemandekan fikih dalam menyikapi realitas kekinian. Dari situlah muncul "kelas khusus"

yang seakan mempunyai hak eksklusif dalam menafsirkan ajaran agama. Itulah persoalan mendasar fikih.

Padahal, konteks hukum yang selalu berubah dan perkembangan zaman yang menuntut partisipasi fikih merupakan fenomena yang tak terbantahkan. Pergantian dan perubahan dari satu hukum ke hukum lain menjadi hal yang mesti terjadi. Dalam ilmu fikih dikenal istilah nasikh dan mansukh, yaitu dalil hukum yang meralat dan diralat. Dalam penafsiran teks agama, doktrin tersebut sungguh sangat urgen karena memungkinkan kita menjawab persoalan baru yang datang silih berganti. Evolusi pelarangan khamar dari status bisa ditoleransi hingga dilarang total merupakan indikasi bahwa hukum bersifat dinamis.

Hukum muncul seiring alasan dan argumentasi logis yang dikenakan pada objeknya. Dalam bahasa fikih, hal tersebut disebut illat, yaitu alasan mendasar adanya hukum. Karena itu, hukum bukan merupakan sesuatu yang sakral, tapi bisa saja berubah sesuai illat-illat-nya.

Bertolak dari situ, sudah saatnya fikih ditempatkan dalam tataran wacana agama. Berkembang dan mandeknya produk fikih akan sangat bergantung pada pemaknaan tiap individu mengenai apa itu fikih. Sejatinya, fikih memang harus selalu memberikan berbagai alternatif pandangan demi tujuan kemanusiaan yang lebih relevan serta bermaslahat. Sementara itu, asumsi tentang sakralisasi fikih dan terkungkungnya otoritas penafsiran syariat pada individu tertentu tidak akan mampu menjawab

persoalan umat manusia yang kian kompleks. Wallahu a'lam.²

Sejalan dengan aktivitas kelompok ini yang banyak bergerak dalam bidang kajian, maka penafsiran keislaman yang mereka lakukan dapat dikonkritkan ke dalam enam landasan, sebagai berikut;

a. *Membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam.*

Islam Liberal percaya bahwa ijtihad atau penalaran rasional atas teks-teks keislaman adalah prinsip utama yang memungkinkan Islam terus bisa bertahan dalam segala cuaca. Penutupan pintu ijtihad, baik secara terbatas atau secara keseluruhan, adalah ancaman atas Islam itu sendiri, sebab dengan demikian Islam akan mengalami pembusukan. Islam Liberal percaya bahwa ijtihad bisa diselenggarakan dalam semua segi, baik segi muamalat (interaksi sosial), ubudiyyat (ritual), dan ilahiyyat (teologi).

b. *Mengutamakan semangat religio etik, bukan makna literal teks.*

Ijtihad yang dikembangkan oleh Islam Liberal adalah upaya menafsirkan Islam berdasarkan semangat religio-etik Qur'an dan Sunnah Nabi, bukan menafsirkan Islam semata-mata berdasarkan makna literal sebuah teks. Penafsiran yang literal hanya akan melumpuhkan Islam. Dengan penafsiran yang berdasarkan

² <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=517>

semangat religio-etik, Islam akan hidup dan berkembang secara kreatif menjadi bagian dari peradaban kemanusiaan universal.

c. *Mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka dan plural.*

Islam Liberal mendasarkan diri pada gagasan tentang kebenaran (dalam penafsiran keagamaan) sebagai sesuatu yang relatif, sebab sebuah penafsiran adalah kegiatan manusiawi yang terkungkung oleh konteks tertentu; terbuka, sebab setiap bentuk penafsiran mengandung kemungkinan salah, selain kemungkinan benar; plural, sebab penafsiran keagamaan, dalam satu dan lain cara, adalah cerminan dari kebutuhan seorang penafsir di suatu masa dan ruang yang terus berubah-ubah.

d. *Memihak pada yang minoritas dan tertindas.*

Islam Liberal berpijak pada penafsiran Islam yang memihak kepada kaum minoritas yang tertindas dan dipinggirkan. Setiap struktur sosial-politik yang mengawetkan praktek ketidakadilan atas yang minoritas adalah berlawanan dengan semangat Islam. Minoritas di sini dipahami dalam maknanya yang luas, mencakup minoritas agama, etnik, ras, gender, budaya, politik, dan ekonomi.

e. *Meyakini kebebasan beragama.*

Islam Liberal meyakini bahwa urusan *beragama* dan *tidak beragama* adalah hak perorangan yang harus dihargai dan dilindungi. Islam Liberal tidak membenarkan peng-

aniayaan (persekusi) atas dasar suatu pendapat atau kepercayaan.

f. *Memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik.*

Islam Liberal yakin bahwa kekuasaan keagamaan dan politik harus dipisahkan. Islam Liberal menentang negara agama (teokrasi). Islam Liberal yakin bahwa bentuk negara yang sehat bagi kehidupan agama dan politik adalah negara yang memisahkan kedua wewenang tersebut. Agama adalah sumber inspirasi yang dapat mempengaruhi kebijakan publik, tetapi agama tidak punya hak suci untuk menentukan segala bentuk kebijakan publik. Agama berada di ruang privat, dan urusan publik harus diselenggarakan melalui proses konsensus.

Demikian kontrasnya pemikiran dan gerakan ini meluncur ditengah peta keislaman yang berkembang saat ini di Indonesia sehingga memancing kelompok tertentu untuk alergi dan bersikap represif terhadap JIL ini. Di antaranya, FUI (Forum Umat Islam) yang meminta pemerintah menyiapkan undang-undang untuk melarang liberalisme, pluralisme dan sekularisme. Hingga Forum Umat Islam Utan Kayu yang bersikeras mengusir Jaringan Islam Liberal (JIL) dari Utan Kayu.

PROGRAM

Dalam hal yang lebih konkrit, ada beberapa kegiatan pokok Jaringan Islam Liberal yang sudah dilakukan saat ini:

1. Sindikasi Penulis Islam Liberal. Maksudnya adalah mengumpulkan tulisan sejumlah penulis yang selama ini dikenal (atau belum dikenal) oleh publik luas sebagai pembela pluralisme dan inklusivisme. Sindikasi ini akan menyediakan bahan-bahan tulisan, wawancara dan artikel yang baik untuk koran-koran di daerah yang biasanya mengalami kesulitan untuk mendapatkan penulis yang baik. Dengan adanya "otonomi daerah", maka peran media lokal makin penting, dan suara-suara keagamaan yang toleran juga penting untuk disebarkan melalui media daerah ini. Setiap minggu, akan disediakan artikel dan wawancara untuk koran-koran daerah.
2. Talk-show di Kantor Berita Radio 68H. Talk-show ini akan mengundang sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai "pendekar pluralisme dan inklusivisme" untuk berbicara tentang berbagai isu sosial-keagamaan di Tanah Air. Acara ini akan diselenggarakan setiap minggu, dan disiarkan melalui jaringan Radio namlapanha di 40 Radio, antara lain; Radio namlapanha Jakarta, Radio Smart (Menado), Radio DMS (Maluku), Radio Unisi (Yogyakarta), Radio PTPN (Solo), Radio Mara (Bandung), Radio Prima FM (Aceh).
3. Penerbitan Buku. JIL berupaya menghadirkan buku-buku yang bertemakan pluralisme dan inklusivisme agama, baik berupa terjemahan, kumpulan tulisan, maupun penerbitan ulang buku-buku lama yang masih relevan dengan tema-tema tersebut. Saat ini JIL sudah menerbitkan buku kumpulan artikel,

- wawancara, dan diskusi yang diselenggarakan oleh JIL, berjudul Wajah Liberal Islam di Indonesia.
4. Penerbitan Buku Saku. Untuk kebutuhan pembaca umum, JIL menerbitkan Buku saku setebal 50-100 halaman dengan bahasa renyah dan mudah dicerna. Buku Saku ini akan mengulas dan menanggapi sejumlah isu yang menjadi bahan perdebatan dalam masyarakat. Tentu, tanggapan ini dari perspektif Islam Liberal. Tema-tema itu antara lain: jihad, penerapan syari'at Islam, jilbab, penerapan ajaran "memerintah yang baik, dan mencegah yang jahat" (amr ma'ruf, nahy munkar), dll.
 5. Website Islamlib.com. Program ini berawal dari dibukanya milis Islam Liberal (islamliberal@yahoo.com) yang mendapat respon positif. Ada usulan dari beberapa anggota untuk meluaskan milis ini ke dalam bentuk website yang bisa diakses oleh semua kalangan. Sementara milis akan tetap dipertahankan untuk kalangan terbatas saja. Semua produk JIL (sindikasi media, talk show radio, dll.) akan dimuat dalam website ini. Web ini juga akan memuat setiap perkembangan berita, artikel, atau apapun yang berkaitan dengan misi JIL.
 6. Iklan Layanan Masyarakat. Untuk menyebarkan visi Islam Liberal, JIL memproduksi sejumlah Iklan Layanan Masyarakat (Public Service Advertisement) dengan tema-tema seputar pluralisme, penghargaan atas perbedaan, dan pencegahan konflik sosial. Salah satu iklan yang sudah diproduksi adalah iklan berjudul "Islam Warna-Warni".

7. Diskusi Keislaman. Melalui kerjasama dengan pihak luar (universitas, LSM, kelompok mahasiswa, pesantren, dan pihak-pihak lain), JIL menyelenggarakan sejumlah diskusi dan seminar mengenai tema-tema keislaman dan keagamaan secara umum. Termasuk dalam kegiatan ini adalah diskusi keliling yang diadakan melalui kerjasama dengan kelompok-kelompok mahasiswa di sejumlah universitas, seperti Universitas Indonesia Jakarta, Universitas Diponegoro Semarang, Institut Pertanian Bogor, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dll.³

B. PERKAWINAN BERBEDA AGAMA MENURUT JIL

Berbeda halnya dengan pandangan kelompok Islam konvensional, Islam pada umumnya di Indonesia, bahkan Islam dalam skop dunia internasional tentang perkawinan beda agama (lebih khusus dalam kapling Islam menikah dengan non muslim) maka JIL melihat hal ini sebagai sesuatu yang mubah, yaitu dapat saja dilakukan bila hal itu dikehendaki. Mereka memahami teks-teks keagamaan dengan cermat, dan mendekati hal itu dengan penalaran versi mereka, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama itu dapat dan boleh dilaksanakan.

Misalnya Ulil Abshar Abdallah mengatakan; Larangan kawin beda agama adalah bersifat kontekstual.

³ redaksi@islamlib.com

Pada zaman Nabi, motivasi larangan kawin beda agama itu lebih dipengaruhi oleh kondisi umat Islam, waktu itu umat Islam masih sedikit, dan lemah, dan sedang berusaha memperbanyak dan memperkuat umat, jika waktu itu perkawinan beda agama diperkenankan bisa-bisa umat Islam akan habis ditelan orang kafir (non muslim) ditengah pengaruh mereka yang masih dominan. Nah, saat ini Islam sudah semilyar lebih, kenapa harus takut kawin dengan yang di luar Islam. Kala itu, Islam sendiri sebenarnya sudah mencapai kemajuan, membolehkan laki-laki muslim kawin dengan wanita ahli kitab. Ahli kitab hingga saat ini masih ada. Malah, agama-agama selain Nasrani dan Yahudi pun bisa disebut ahli kitab. Kawin beda agama hambatannya bukan persoalan teologis, melainkan sosial.⁴

Islam sebagai agama adalah masalah privat. Ketika masuk ke urusan publik, tak perlu lagi membawa label agama, label agama itu akan menjadikan sesuatu yang di luar sistem akan terasing. Persoalan zakat, haji, dan perkawinan tak perlu diatur oleh negara. Cukup dikelola umat Islam sendiri. Pemberlakuan syariat Islam sama saja melibatkan secara penuh peran negara dalam kehidupan beragama. Padahal, cara ini bisa mempersempit cara pandang Islam itu sendiri. Syariat menjadi terjebak pada urusan, misalnya, larangan minuman keras, jilbab, dan perzinahan, dan lain sebagainya.

⁴ <http://www.dilibrary.net/images/topics/debat-ulil-thian.pdf>.

Di antara kerangka berfikir yang mereka kembangkan ternukil di dalam buku Fiqih Lintas Agama. Pandangan itu lebih jauh dikemukakan sebagai berikut;

Pada umumnya ulama yang melarang dilangsungkannya perkawinan beda agama itu mengacu kepada Q.S. Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya; Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁵

Ayat tersebut adalah termasuk ayat Madaniyah yang

⁵ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 1989), hlm.53.

pertama sekali turun dan membawa pesan khusus agar orang-orang muslim tidak menikahi wanita musyrik atau sebaliknya. Imam Muhammad al-Razi dalam al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Gaib menyebut ayat tersebut sebagai ayat permulaan yang secara eksplisit menjelaskan hal-hal yang halal (*ma yuhallu*) dan hal-hal yang dilarang (*ma yuhramu*)⁶

Dengan menjadikan ayat tersebut sebagai pedoman dalam pengharaman, dan dilarang menikah dengan orang-orang musyrik maka hal yang menjadi persoalan sesungguhnya adalah; siapa saja yang dimaksud dengan orang-orang musyrik itu. Tampaknya para ulama klasik memberikan pemaknaan yang sangat luas terhadapnya, yaitu non muslim secara umum, konsekwensinya selain muslim, mereka dinyatakan sebagai musyrik, di antaranya; Nasrani (Kristen) dan Yahudi meskipun keduanya tergolong agama samawi (agama monotheis).

Imam al-Razi mengemukakan, sebagian ulama memasukkan Nasrani sebagai kategori musyrik karena mereka menganggap bahwa Isa al-Masih sebagai anak Tuhan, dan Yahudi juga sebagai musyrik karena mereka menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan. Dengan perilaku

⁶ Imam Muhammad al-Razi Fakhr al-Din ibn al-'Allamah Dhiya'u al-Din Umar, *Tafsir al-Fakhr al-Razi al-Musytahar bi al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, dikomentari oleh Syaikh Khalil Muhyiddin al-Mays, jilid V, (Bairut : Dar al-Fikir, 1995), hlm. 59., Juga, Tim Penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina & The Asia Foundation, 2004), hlm. 154.

seperti ini jelas merusak akidah monotheisme mereka, dengan demikian mereka tergolong musyrik.

Sejalan dengan hal ini, ternyata Rasulullah SAW. sendiri dalam sebuah hadisnya menyuruh salah seorang pemimpin/ gubernur bila bertemu dengan sejumlah "orang-orang musyrik" dengan tidak mengkonkritkan siapa mereka yang diberi status musyrik itu, apakah termasuk Nasrani dan Yahudi, maka hendaklah mengajak mereka agar berkenan masuk Islam, bila mereka bersedia terimalah mereka, tetapi jika mereka tidak bersedia maka suruhlah mereka membayar jizyah (pajak), dan menandatangani akad zimmah.

Ayat tersebut tidaklah dapat secara langsung dijadikan sebagai alasan untuk mengharamkan menikah dengan non muslim secara umum, karena ketidak tegasan tunjukan siapa sebenarnya yang dimaksud dengan musyrik tersebut. Ditambahkan lagi, bahwa pada sisi lain ada ayat lain yang lebih dapat dijadikan sebagai pedoman karena memiliki ketegasan makna yang terkandung di dalamnya, sebagai berikut;

Sebenarnya Allah SWT. membedakan musyrik dengan ahli kitab. Lebih tegas mengenai hal ini dapat dilihat pada dua ayat yang akan dikemukakan berikut ini;

Pertama, Q.S. al-Baqarah ayat 105 yang berbunyi;

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya; Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu.⁷

Kedua, Q.S. al-Bayyinah ayat 1, berbunyi;

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُتَفَكِّينَ حَتَّى
تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

Artinya; Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.⁸

Kedua ayat ini sesungguhnya menggunakan kata penghubung "dan" (*waw*) antara kata Kafir Ahli kitab dengan kata Kafir Musyrik. Sikap Tuhan menyajikan bentuk seperti ini berarti Tuhan bermaksud membedakan antara keduanya, yaitu Ahli kitab berbeda dengan Musyrik. Mengenai perbedaan kedua kata ini akan diuraikan nanti dalam bentuk yang lebih rinci.

Secara bahasa kata "*kufr*" bermakna "menutupi". Ada 525 kali kata *kufr* tersebut diulang-ulang oleh Allah SWT. di dalam Alqur'an. Semua kata ini dimaknai dengan "menutupi", yaitu menutup-nutupi nikmat dan kebenaran, baik kebenaran dalam arti Tuhan (sebagai sumber kebenaran), demikian juga dengan kebenaran

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an ... hlm.29.

⁸ *Ibid*, hlm. 1084

dalam arti ajaran-ajaran-Nya yang disampaikan melalui Rasul-rasul-Nya.⁹

Sama halnya dengan keimanan itu sendiri memiliki perbedaan antara keimanan seorang dengan orang lain, maka demikian jugalah halnya dengan kekufuran itu. Artinya, kekufuran itu ada lima macam bentuknya sebagai berikut;

1. Kafir "*ingkar*", yaitu kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan, Rasul-rasul-Nya dan seluruh ajaran yang mereka bawa.
2. Kafir *juhud*, yaitu kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Tuhan dalam keadaan tahu bahwa apa yang diingkari itu adalah kebenaran. Ia tidak jauh berbeda dengan kekafiran ingkar seperti dikemukakan pada nomor satu di atas.
3. Kafir *munafik*, yaitu kekafiran yang mengakui Tuhan, Rasul dan ajaran-ajarannya lewat lidah semata, tetapi mengingkarinya dengan hati, mereka adalah orang-orang yang lahiriyahnya memperlihatkan keimanan tetapi sesungguhnya mereka adalah orang yang kafir.
4. Kafir *syirik*, yaitu mereka yang mempersekutukan dengan menjadikan sesuatu selain dari Allah menjadi sesembahan, objek pemujaan, dan atau sebagai tempat menggantungkan harapan, syirik seperti ini digolongkan sebagai kekafiran karena mereka mengingkari Allah SWT., Rasul, dan wahyu-wahyu-Nya lewat perbuatan mereka.

⁹ Harifuddin Cadiwu, *Konsep Kufr Dalam al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 31.

5. Kafir *nikmat*, yaitu adanya sikap tidak mensyukuri nikmat Allah, dan menggunakan nikmat itu pada hal-hal yang tidak diridhai-Nya. Orang-orang muslim pun jika mereka tidak mensyukuri nikmat Allah SWT dapat masuk ke dalam hal ini.
6. Kafir *murtad*, yaitu Orang yang kembali menjadi kafir setelah sebelumnya mereka beriman, tegasnya mereka adalah-orang-orang yang keluar dari Islam.
7. Kafir *Ahli Kitab*, yaitu Non muslim yang percaya kepada Nabi dan kitab suci yang mereka bawa sebagai wahyu Tuhan.
8. Dan lain-lain.

Semua ini memberi pemahaman kepada kita bahwa kafir itu ada banyak macamnya, sekaligus keragaman yang banyak itu tentu berbeda maksud dan tujuannya. Dengan demikian secara terminologis kalau disebut "*Kafir Ahli Kitab*" tentu berbeda dengan "*Kafir Musyrik*".

Sejalan dengan hal ini Abu al-A'la al-Maududi berkata; "Buka dan bacalah Alqur'an dari awal, mulai dari surat al-Fatihah sampai akhirnya surat al-Nas, kita akan menemukan tiga bentuk kepercayaan, dimana ketiganya mempunyai perbedaan antara satu sama lainnya. Ketiga bentuk kepercayaan itu adalah; 1). *Musyrik* 2). *Ahli Kitab*, 3). Dan *Ahlu al-Iman*.¹⁰

Para Ahli kitab itu sesungguhnya benar-benar

¹⁰ Abul al-A'la al-Maududi, *al-Islam fi Muwajahah al-Tahaddiyah al-Mu'assharah*, (Kuwait : Dar al-Qalam, 1983), hlm. 112, juga Tim Penulis Paramadina, hlm. 158.

telah melakukan perbuatan syirik, tetapi ternyata Allah SWT tidak pernah mengkhitab mereka dengan kata musyrik, justeru mereka tetap dikhitab dengan kata Ahli kitab. Hal ini dapat dilihat dari sajian berikut ini;

Pertama; Q.S. al-Maidah ayat 17 yang berbunyi sebagai berikut;

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

Artinya; Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam".¹¹

Kedua; Q.S. al-Maidah ayat 73 yang berbunyi;

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ

Artinya; Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga (Trinitas)".¹²

Ketiga, Q.S. al-Taubah ayat 30, yang berbunyi;

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ

Artinya; Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu

putera Allah" dan orang Nasrani berkata: "Al Masih itu putera Allah".¹³

Ketiga ayat tersebut jelas telah menceritakan tentang perbuatan syirik yang mereka lakukan, meskipun demikian perbuatan mereka ternyata Allah SWT. tidak pernah memanggil mereka dengan musyrik, tetapi tetap dengan menggunakan Ahli kitab.

Dengan menganalisis uraian di atas terlihat bahwa perilaku syirik yang dilakukan tidaklah secara otomatis menjadikan pelakunya sebagai musyrik. Hal ini dapat ditarik kesimpulan dari kenyataan perbuatan Yahudi dan Nasrani yang melakukan kemusyrikan tetapi ternyata Allah SWT. tidak memanggil mereka dengan kata musyrik tersebut, justeru tetap memanggil mereka dengan sebutan Ahli kitab. Lebih konkrit hal ini terlihat pada uraian berikut ini;

Pertama, Q.S. al-Nisa' ayat 171, berbunyi;

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ

Artinya; Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya

¹¹ Departemen Agama, al-Qur'an ... hlm. 161.

¹² Ibid., hlm. 173

¹³ Ibid., hlm. 282.

nya Al Masih, 'Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah.¹⁴

Kedua, Q.S.al-Maidah ayat 5 yang berbunyi;

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

Artinya; Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka.¹⁵

Ketiga, Q.S. Ali Imran ayat 64 yang berbunyi;

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

Artinya; Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah.¹⁶

¹⁴ Ibid., hlm. 152.

¹⁵ Ibid., hlm. 158

¹⁶ Ibid., hlm. 86.

Bila hal ini lebih dipertajam lagi maka kita bisa berkata bahwa orang Islam itu pun sesungguhnya pernah melakukan perilaku syirik, dan memang kenyataannya hal itu terjadi, namun mereka tetap tidak bisa kita sebut sebagai musyrik. Sebab, dengan mengatakan mereka musyrik maka konsekwensi logisnya kalau ada sepasang suami isteri yang telah diikat tali perkawinan di dalam Islam lalu ada seorang di antara mereka yang syirik maka perkawinan mereka harus dibubarkan alias cerai, karena perkawinan itu akan batal dengan sendirinya bila seorang di antara mereka telah murtad. Kenyataan seperti ini tidak pernah diterima, sekaligus membuktikan bahwa orang seperti ini tidak digolongkan dengan musyrik, namun tetap sebagai muslim.

Perilaku syirik yang ada kemungkinan dilakukan umat Islam itu digambarkan Allah di dalam Alqur'an sebagai berikut;

Pertama, Perbuatan menjadikan sesuatu selain Allah sebagai Tuhan adalah perilaku syirik, dan hal ini tercantum di dalam Q.S. al-Nisa' ayat 36 yang berbunyi;

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

Artinya; Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun.¹⁷

Kedua, Perilaku mempertuhankan hawa nafsu, harta, kedudukan, dan lain sebagainya adalah termasuk per-

¹⁷ Ibid., hlm. 123

buatan syirik, hal ini seperti dikemukakan Allah dalam Q.S. al-Jasiyah ayat 23 yang berbunyi;

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

Artinya; Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya.¹⁸

Lewat kedua ayat tersebut di atas terlihat bahwa Allah SWT. mengingatkan bahwa umat Islam itu suatu ketika bisa melakukan kesyirikan berupa mempersekutukannya, dan menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, namun Allah tetap tidak memanggil mereka sebagai musyrik, justeru tetap sebagai muslim.

Dengan uraian ini, kelompok JIL mempertanyakan; Apakah orang-orang Islam pelaku syirik seperti dikemukakan pada dua ayat di atas dapat dinyatakan dengan musyrik yang mempunyai konsekuensi logis bahwa orang Islam akan haram menikah dengan mereka, dan bila bagi mereka yang telah menikah lalu harus diceraikan karena seorang dari mereka telah murtad karena melakukan syirik seperti amanat yang terkandung di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 221. Bagi mereka (kelompok JIL) jawabannya jelas tidak demikian, orang tersebut tidak dikatakan dengan musyrik, dan orang Islam tidak dilarang menikah dengan mereka, dan bagi mereka yang sudah berada dalam perkawinan tidak perlu diceraikan karena mereka masih tetap sama-sama dalam keadaan Islam, bila hal ini tidak

¹⁸ Ibid., hlm. 818.

dimaknai demikian tentu akan sangat banyak sekali orang sesama Islam yang sudah tidak boleh lagi menikah, dan bagi yang telah menikah akan sangat banyak sekali yang sudah harus diceraikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak semua perilaku syirik yang dilakukan oleh seseorang secara otomatis membuat dia menjadi musyrik, dan berdampak terhadap adanya larangan menikah dengan orang Islam, dan pemahaman musyrik dalam Q.S.al-Baqarah ayat 221 tersebut tidak demikian.

Imam Muhammad Rasyid Ridha terlihat lebih tegas lagi membedakan makna musyrik dengan ahli kitab tersebut. Muhammad Abduh dalam menafsir Q.S. al-Baqarah ayat 221 tersebut berpendapat seperti dinukil oleh muridnya Rasyid Ridha bahwa objek yang dimaksud sebagai larangan kawin dengan orang Islam dalam ayat tersebut perempuan-perempuan musyrik Arab.¹⁹ Dengan hal ini terdapat perbedaan yang jelas antara musyrik dengan ahli kitab tersebut, dan menikah dengan wanita-wanita ahli kitab itu tidak ada persoalan.

Kemudian muncul pertanyaan baru tentang apakah perempuan-perempuan musyrik Arab itu masih ada sekarang ini, tentu jawaban ini akan menentukan jawaban berikutnya, yaitu bila ada maka hukum ada dan haramlah bagi laki-laki muslim untuk menikahi mereka, tetapi bila jawabannya tidak ada, dan mungkin inilah yang lebih terdukung maka tidak ada lagi hukum yang dikandung

¹⁹ Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jld. VI, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, tt.), hlm. 193.

ayat tersebut, sedang menyangkut menikahi selain perempuan-perempuan musyrik Arab tersebut tidak ada persoalan sama sekali.

Memperhatikan berbagai argumen dan logika seperti telah dikemukakan maka memaknai musyrik dalam bentuk yang lebih umum dengan memasukkan seluruh non muslim akan ditolak dengan alasan sebagai berikut;

1. Dalam Ayat-ayat Alqur'an ternyata membedakan panggilan terhadap Ahli kitab (orang-orang Yahudi dan Nasrani) dengan orang-orang musyrik. Dalam beberapa ayat pembedaan ini dilakukan Tuhan dengan menggunakan kata penghubung "*waw*" (dan), dalam kaidah bahasa Arab hal ini disebut "*athfun*", yang dimaksud sebagai alat pembeda antara kata sebelum dan sesudahnya. Dengan demikian jelas bahwa kata musyrik itu berbeda dengan Ahli kitab. Abu Ja'far ibn Jarir al-Thabari di dalam tafsirnya Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an dengan tegas membedakan kata musyrik dan Ahli kitab yang ada dalam Alqur'an, menurutnya musyrik itu bukan Ahli kitab, dan Ahli kitab juga bukan musyrik itu. Lebih spesifik lagi bahwa musyrik yang terkandung di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 221 tersebut bukanlah Ahli kitab Yahudi dan Nasrani, tetapi mereka adalah orang-orang musyrik Arab yang tidak mempunyai kitab suci.²⁰

²⁰ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat al-Qur'an, dikomentari Shudqi Jamil al-Attar, Jld. II, (Beirut : Dar al-Fikr, 2001), hlm. 467.

2. Sejalan dengan situasi dan kondisi pada saat ayat ini turun adalah pada masa terjadi ketegangan antara orang-orang Islam dengan musyrik Arab, maka larangan itu dipahami lebih sebagai antisipasi supaya musyrik itu tidak memerangi orang Islam. Dengan memperhatikan konteks turunnya ayat ini jelas bahwa mereka yang dimaksud dengan musyrik di sana adalah musyrik yang suka memerangi orang Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam al-Razi yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan musyrik dalam ayat tersebut bukanlah kelompok paganis Arab, tetapi mereka yang suka memerangi orang-orang Islam, karenanya mereka bukanlah *ahl al-zimmah*.²¹
3. Stratifikasi masyarakat Arab ternyata memperlihatkan kepada kita *al-akhar* (kelompok lain), mereka terdiri dari tiga komponen masyarakat, yaitu; (1). Musyrik, adalah mereka yang mempunyai kedudukan tinggi dan posisi penting dalam masyarakat, pusatnya di mekkah, mereka mempunyai patung yang paling besar "*Hibal*" yang menghadap ke ka'bah, bentuknya seperti manusia, dan ini terbuat dari batu akik. Dan di sekeliling patung tersebut terdapat patung-patung kecil sebanyak 360 buah.²² (2). Kristen atau Nasrani, adalah merupakan kekuatan yang sangat besar di

²¹ Imam Muhammad al-Razi, hlm.64.

²² Kisah ini dinukil oleh Arzaqy dari Ibn Abbas, dan dijelaskan secara panjang lebar dalam bukunya, *Tarikh Makkah*, hlm. 125

daratan Arab. Mereka adalah sekelompok orang Kristen Sayam yang lari ke Arab sebagai jalan keluar dari kezaliman Romawi, mereka menempati puncak gunung dan bukit-bukit melalui para pedagang Afrika. Kedatangan orang-orang Kristen atau Nasrani ini menyebabkan sejumlah kabilah Arab memeluk agama Kristen (Nasrani), antara lain; kabilah Ghassan, Taghallub, Tanukh, Lakhm, Kharam, dan lain-lain.²³

(3). Yahudi, adalah mereka juga yang lari dari Syam karena kediktatoran Romawi dan Persia. Mereka berpusat di Madinah, jumlah mereka hampir separoh penduduk Madinah, antara lain; keturunan Qoynaqa`, Nadhir, dan Qurayzhah, dan sebagian mereka ada mengikuti al-Khumayri yang pergi menuju wilayah selatan Arab bersama orang-orang Yahudi sehingga mereka menyebarkan agamanya di Yaman. Dari sinilah mereka akhirnya tersebar di Yatsrib, Khaybar, Tabuk, Tayma, dan Yaman.²⁴

Komposisi masyarakat seperti ini menunjukkan bahwa ada distingsi yang jelas antara kaum musyrik, Kristen (Nasrani), dan Yahudi. Hal utama yang membedakan antara Musyrik dengan Kristen (Nasrani), dan Yahudi adalah ajaran monotheismenya. Seperti-nya Musyrik terlihat murni sebagai kekuatan politik,

²³ Fahmi Huwaydi, *Muwathunun la Zimmiyun*, (Kairo : Dar el-Zorouk, Cet. Ke-3, 1999), hlm. 15

²⁴ Jawad Ali dengan karyanya buku, *al-Mufasshashal fi Tarikh al-'Arab*, seperti dinukil dalam, Fahmi Huwaydi, Jld. VI, hlm. 518.

di mana di antara yang menjadi ambisinya adalah kekuasaan dan kekayaan. Sedangkan Yahudi dan Kristen (Nasrani) adalah mereka yang sedikit banyaknya mempunyai persinggungan theologis dengan Islam. Walaupun terdapat ketegangan antara mereka dengan muslim, tetapi setidaknya terdapat upaya bersama untuk membangun kesepahaman yang dibuktikan dengan lahirnya "Piagam Madinah", dan ini jelas merupakan bentuk kesepahaman antara Muslim, Kristen (Nasrani), dan Yahudi, bahkan ketiga komponen penganut umat beragama ini telah bersepakat untuk menjadi satu (*ummatan wahidah*). Sejalan dengan ini, Allah SWT. juga ternyata dalam beberapa kesempatan memberi apresiasi terhadap mereka kelompok Kristen (Nasrani), Yahudi, dan kaum Shabi`ah, juga mereka yang beramal shaleh, akan mendapat imbalan yang setimpal di Hari Kiamat nanti (Q.S. al-Baqarah ayat 62). Demikian juga Allah SWT. tidak segan-segan menyebut sejumlah pendeta dan pastor yang tidak sombong, dan apabila mereka mendengarkan ayat-ayat Tuhan yang diturunkan kepada Rasul, mata mereka dibanjiri air mata (Q.S. al-Maidah ayat 82-83).

4. Alasan yang paling fundamental tentang dibolehkannya menikah dengan orang yang berbeda agama adalah fiman Tuhan yang mendeklarasikan hal itu dalam Q.S. al-Maidah ayat 5, yang berbunyi sebagai berikut;

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَوَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ
مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya; Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.²⁵

Setelah diteliti ternyata ayat ini adalah ayat Madaniyah yang secara hirarkis ternyata belakangan turun dari ayat yang menjelaskan tentang menikah dengan orang musyrik yang terdapat di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 221. Ayat ini dapat disebut dengan "ayat revolusi",

²⁵ Departemen Agama RI., al-Qur'an ... hlm. 158.

karena secara eksplisit menjawab beberapa keraguan bagi masyarakat muslim pada saat itu, di antaranya prihal pernikahan dengan non muslim. Pada ayat pertama (Q.S. al-Baqarah ayat 221) menggunakan kata musyrik yang bisa dimaknai dengan seluruh non muslim, maka melalui ayat ini Allah mulai membuka ruang bagi pria muslim untuk dapat melakukan perkawinan dengan wanita Kristen, dan Yahudi (Ahli kitab). Ayat ini juga bisa berfungsi dua hal sekaligus, yaitu penghapus (*Nasikh*), dan pengkhusus (*mukhassish*) dari ayat sebelumnya yang melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik. Lewat Kaidah Fiqh bisa diambil kesimpulan bahwa bila terdapat dua ayat yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya maka diambillah ayat yang lebih akhir diturunkan.²⁶

Menyangkut kebolehan pernikahan dengan non muslim secara umum, terdapat data yang autentik

²⁶ Imam Muhammad al-Razi Fakhr al-Din ibn al-'Allamah Dhiya'u al-Din Umar, *al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, jld. V, Dikomentari oleh Syaikh Khalil Muhyiddin al-Mays, (Beirut : Dar al-Fikir, 1995), hlm. 64. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ayat al-Qur'an*, Dikomentari Shudqi Jamil al-Attar, jld. II, (Beirut : Dar al-Fikir, 2001), hlm. 464., Juga Ibn Rusyd, di dalam, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, juga mempunyai pendapat serupa, bahwa ayat al-Maidah yang membolehkan pernikahan wanita janda muslimah dengan laki-laki ahli kitab sebagai pengkhususan dari lafaz umum yang digunakan ayat 221 surat al-Baqarah yang melarang pernikahan dengan laki-laki atau wanita musyrik.

menyangkut beberapa Sahabat Nabi yang menikahi perempuan Kristen (Nasrani) dan Yahudi, antara lain; Huzaifah, Thalhah, . Khalifah Umar sempat marah dan berang mendengar kabar pernikahan tersebut. Sikap Umar yang seperti itu sebenarnya bukan untuk mengharamkan pernikahan mereka, melainkan hanya khawatir bila sewaktu-waktu para sahabat tersebut membelot dan masuk dalam komunitas non muslim. Huzaifah dan Thalhah adalah merupakan dua tokoh yang menonjol pada zamannya, sehingga Umar wajar bila mengingatkan mereka berdua.

Selain kajian laki-laki muslim diperkenankan menikahi perempuan Kitabiyat, terlihat hal yang lebih serius lagi kajiannya adalah menyangkut persoalan sebaliknya, yaitu ketentuan mengenai perempuan muslimah dinikahi dengan laki-laki Ahli kitab. Mengenai hal ini akan dibahas sebagai berikut;

Menyangkut ketentuan hukum menikahkan perempuan muslimah dengan laki-laki Ahli kitab dipahami sebagai suatu peristiwa yang tidak diatur secara tekstual. Tidak ada teks Alqur'an, hadis, atau kitab fiqh yang secara tegas mengatakan hal itu boleh dilakukan di satu sisi, namun tidak ada pula teks Alqur'an, hadis, atau kitab fiqh yang secara tegas melarangnya pada sisi yang lain. Karenanya hal ini akan menjadi kajian yang menarik untuk dicermati.

Memang ada larangan yang dinyatakan sebagai hadis, karena dinisbahkan kepada Rasul SAW., dikatakan Beliau bersabda; Kami menikahi wanita-wanita Ahli kitab, dan laki-laki Ahli kitab tidak boleh menikahi

wanita-wanita kami (muslimah). Demikian juga dengan pesan Umar Ibn Khattab, dia mengatakan; Seorang muslim boleh menikahi wanita Nasrani, akan tetapi laki-laki Nasrani tidak boleh menikahi wanita muslimah.²⁷ Sepintas hal ini memang melarang wanita muslimah menikah dengan laki-laki Ahli kitab.

Ternyata setelah sabda Rasul yang dinyatakan sebagai hadis tersebut diteliti maka Shudqi Jamil al-Aththar mengomentarnya sebagai hadis yang maukuf, yaitu hadis yang terputus sanadnya hingga Jabir, sebagaimana dijelaskan oleh al-Imam al-Syafi'I dalam kitabnya al-Um.²⁸ Demikian juga dengan pesan Umar ibn Khattab hanyalah merupakan ungkapan kekhawatiran bila wanita-wanita muslim dinikahi laki-laki non muslim lalu mereka akan pindah agama, sedang pada waktu itu Islam masih sangat membutuhkan umat dalam kualitas dan kuantitas yang memadai.

Akhirnya disimpulkan bahwa persoalan pernikahan laki-laki non muslim dengan wanita muslimah adalah merupakan wilayah ijtihadi, dan hal ini sangat terikat dengan konteks tertentu pada saat hadis dan pesan itu disampaikan, salah satunya adalah menyangkut kepentingan dakwah islamiyah saat itu membutuhkan demikian sehingga persoalan menikah antar penganut agama waktu itu dinyatakan sebagai suatu yang dilarang.

Mengingat hal ini dipahami sebagai wilayah ijtihadi

²⁷ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, ... hlm.465.

²⁸ Ibid.

maka amat dimungkinkan untuk mencetuskan pendapat baru, yaitu pernikahan beda agama secara lebih luas dapat dilaksanakan, dengan tanpa memandang apa agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai tersebut, dan dengan tanpa memperhatikan laki-laki dan perempuan dari pihak agama dan kepercayaan mana pun juga. Dengan demikian pendapat ini terlihat membolehkan perkawinan beda agama secara umum.

Pemikiran seperti ini didasarkan kepada semangat yang dibawa oleh Alqur'an itu sendiri, yaitu;

Pertama; Bahwa pluralitas agama merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindarkan. Tuhan menyebut agama-agama samawi dan mereka membawa ajaran amal saleh sebagai orang yang akan bersama-Nya di surga nanti (Q.S. al-Baqarah ayat 62). Bahkan Tuhan juga secara eksplisit menyebutkan agar perbedaan jenis kelamin dan suku sebagai tanda agar satu dengan yang lainnya saling mengenal (Q.S. al-Hujrat ayat 13). Bahkan perkawinan beda agama dapat dijadikan ruang sebagai sarana antar penganut agama saling berkenalan secara lebih dekat.

Kedua; Tujuan dari dilangsungkannya pernikahan adalah untuk membangun tali kasih (*al-mawaddah*), dan tali sayang (*al-rahmah*) (Q.S. al-Rum ayat 20-23). Di tengah rentannya hubungan antar agama saat ini, pernikahan beda agama justru dapat dijadikan wahana untuk membangun toleransi dan kesepahaman antar masing-masing pemeluk agama. Berangkat dari tali kasih dan tali sayang tersebut kita mulai merajut kerukunan dan kedamaian.

Ketiga; Semangat yang dibawa Islam adalah pembebasan, bukan belenggu, dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh al-Qur'an sejak larangan pernikahan dengan orang musyrik, lalu membuka jalan dengan ahli kitab adalah merupakan sebuah tahapan pembebasan secara evolutif, dan pada saatnya kita harus melihat agama lain bukan sebagai kelas dua, dan bukan pula kategori *al-zimmah* dalam arti menekan mereka, melainkan sebagai warga negara. Fahmi Huwaydi²⁹ (1999) sudah memulai langkah baru tersebut dengan sebuah manifestonya (*muwathinun la zimmiyun*)

Perkawinan beda agama ini mereka sampaikan bukan hanya dalam wacana semata tetapi juga telah dipraktikkan secara langsung langsung, misalnya perkawinan Nurcholish (27 tahun) dengan Mei (24 tahun) dua pekan lalu. Perkawinan tersebut dilakukan dalam "dua metode." Ijab kabul secara Islam dengan mas kawin 8,8 gram emas dilakukan di Islamic Study Center Paramadina, Jaksel. Dr. Kautsar Azhari Noer bertindak sebagai wali Mei sekaligus yang menikahkan kedua mempelai secara Islam, sedangkan Ulil Abshar-Abdalla sebagai saksi. Sementara, perestuan secara Konghucu dilakukan di ruangan *lithan* Sekretariat Matakini di Sunter Jakarta Utara.

²⁹ Fahmi Huwaydi adalah pemikir muslim dan kolumnis kondang di Harian al-Ahram dan Jurnal Kebudayaan, *Wijah Nazar*, (Kairo ; Mesir),. Ia menulis sejumlah buku, antara lain; al-Tadayyun al-Manqush, al-Islam wa al-Dimoqrathiyah, al-Maqalat al-Mahzurah, al-Qur'an wa al-Sulthan, Muwathinun la Zimmiyun, dan lain-lain.

Demikian kerasnya pendirian Ahmad Nurcholish untuk tetap melakukan perkawinannya dengan Ang Mei Yong, seorang perempuan Konghucu, khawatir memantik reaksi keras dari pengelola Masjid Al-Azhar, Jakarta. Mengingat status Nurcholish selama ini sebagai pengurus teras di Youth Islamic Studi Club (YISC) Al-Azhar akan memancing keberatan dari pihak masjid bilamana Nurcholish bersikukuh menikahi Ang Mei Yong, pemuda Konghucu. Sebab, seperti dikatakan Heru Widiyanto, Ketua Umum YISC, "Misi dakwah YISC tak bisa melawan *mainstream* pemikiran yang ada di masyarakat". Pekan lalu Nurcholish mengajukan surat pengunduran dari kepengurusan YISC, untuk menghindari kontroversi lebih jauh. Nurcholish pernah *nyantri* di Pesantren al-Faqih dan dia adalah putra dari seorang guru agama di sebuah desa di Grobogan.³⁰

³⁰ *Majalah Gatra*, 21 Juni 2003, h. 18-19.

BAB V

PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. LATAR BELAKANG LAHIRNYA COUNTER LEGAL DRAFT

Beberapa waktu lalu, gerakan formalisasi syari'at Islam menguasai opini publik Indonesia. Tujuannya jelas, mencantumkan kembali Piagam Jakarta ke dalam konstitusi dan memberlakukan syari'at Islam secara *kaffah* (menyeluruh) melalui Peraturan Daerah (PERDA) di berbagai Daerah. Tuntutan ini selain tidak sejalan dengan sistem hukum Nasional, juga akan membuat diskriminasi terhadap warga non muslim. Dengan kata lain, tuntutan syari'at Islam secara *kaffah* bisa saja akan mengoyakkan sendi-sendi pluralisme dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, pengkajian serius dan kritis terhadap syari'at Islam

kiranya perlu dilakukan kembali untuk mengadaptasikan syari'at Islam itu dengan kehidupan demokrasi saat ini.

Di luar tuntutan syari'at, sebetulnya sejak Orde Baru, umat Islam selalu bersama Pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama dan Mahkamah Agung, dan telah memiliki rumusan tersendiri tentang syari'at Islam. Rumusan ini disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dalam bentuk legalnya dijustifikasi oleh Presiden Soeharto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Kala itu KHI mencakup tiga bidang hukum Islam yang terakumulasi ke dalam 229 pasal, yakni Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Tiga bidang tersebut dipandang telah memadai, karena pembentukan KHI saat itu dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan yustisial Peradilan Agama yang secara khusus diper-siapkan untuk menangani perkara umat Islam dalam tiga hal tersebut.

Dalam kenyataan yuridis, KHI adalah satu-satunya materi hukum Islam yang dijustifikasi oleh Negara (menjadi hukum positif meskipun landasannya tidak cukup kuat), tetapi dalam bentuk aplikasinya di lapangan KHI tampak sangat efektif digunakan oleh para Hakim agama, Pejabat KUA, dan sebagian masyarakat. Dalam berbagai keputusan Pengadilan Agama, Hakim agama selalu menjadikan KHI sebagai sumber dan landasan hukum. Efektifitas ini bisa dipahami karena KHI berbahasa Indonesia (bahasa ibu), dan menggunakan bahasa yang jelas dan pasti untuk sebuah keputusan hukum. Jelas,

ini berbeda jauh dengan kitab kuning, selain Cuma bisa dipahami oleh orang yang bisa berbahasa Arab yang baik, juga materi hukum kitab kuning selalu menyediakan banyak alternatif hukum yang membuat para hakim merasa tidak pasti.¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai landasan hukum yang masih dinyatakan berlakunya sampai saat ini dalam sistem hukum Indonesia, pada kenyataannya banyak menjadi acuan para hakim agama, Kantor Urusan Agama, dan sebagian umat Islam. Penelitian Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama pada tahun 2001 menemukan bahwa hampir 100 persen secara implisit dan 71 persen secara eksplisit hakim pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama menjadikan KHI sebagai landasan hukum dalam keputusannya.

Dengan kenyataan ini, Departemen Agama RI. Melalui Direktorat Pembinaan Peradilan Agama sebelum hijrah ke Mahkamah Agung pernah mengupayakan KHI menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Keluarga Islam. Upaya ini dilakukan selain untuk meningkatkan status hukum KHI, juga untuk melengkapi cakupan materi hukum Islam yang ada selama ini, tidak sekedar terbatas pada tiga bidang hukum perdata itu saja (Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), melainkan menjadi lebih luas dari itu. Upaya ini dalam

¹ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Departemen Agama RI., 2004), hlm.1-2.

konteks lain bisa menjadi alternatif dari kebutuhan pilihan hukum untuk menerapkan syari'at Islam ke dalam tubuh Negara.

Sehubungan dengan dinamika masyarakat yang cepat, dan adanya keinginan masyarakat untuk menjadikan KHI sebagai bagian dari hukum positif Indonesia, maka Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama yang dipimpin oleh Dr Siti Musdah Mulia, MA, APU, telah diberi kepercayaan oleh Pemerintah lewat Departemen Agama RI. untuk mencoba membuat Rancangan Naskah akademik Counter Legal Draft yang direncanakan sebagai pengganti hukum materil Islam yang berlaku di Pengadilan Agama selama ini. Dengan harapan akan ada hukum materil Islam yang lebih komprehensif, lengkap, dan sesuai dengan kondisi kekinian umat islam Indonesia.

Ketua Tim PUG Departemen Agama DR. Siti Musdah Mulia mengatakan, latar belakang peluncuran CLD ini adalah karena adanya rencana Pemerintah meningkatkan status hukum KHI menjadi undang-undang. "Ketika diajukan draf RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan tersebut, saya menolak keras. Alasan saya, bagaimana dengan konteks keindonesiaan kita yang plural ?", tentu saja aspek religiusitas bangsa yang paling rentan terhadap hal ini, kata Musdah Mulia yang memperoleh gelar doktornya dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang Universitas Islam Negeri Jakarta) dalam bidang pemikiran politik Islam.

Musdah menjelaskan, dia dan timnya menyusun CLD tersebut setelah Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama yang sekarang dialihkan di bawah Mahkamah Agung berupaya mencari masukan untuk peningkatan status hukum KHI serta memperbaiki isi KHI antara lain dengan memperberat sanksi yang ada pada sejumlah pasal.

Kerisauan lain yang mengusik ibu tiga anak itu adalah kenyataan setelah era otonomi daerah, banyak Daerah yang ingin memformalkan syariat Islam. "Setelah saya teliti, ternyata mereka tidak memiliki konsep yang jelas. Karena itu, saya menawarkan sebuah konsep sebagai alternatif melalui Counter Legal Draft ini," papar Musdah.

Kajian, penelitian dan perumusan ulang terhadap materi hukum KHI di dalam counter legal draft (CLD) yang dimaksudkan sebagai alternatif draf hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan lima perspektif, yaitu kemaslahatan (kebaikan) umat, keadilan dan kesetaraan jender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi.

Tim kelompok kerja PUG Departemen Agama yang diberi amanah itu terdiri dari Tim kajian sebanyak 11 orang, dan kontributor sebanyak 16 orang yang diketuai oleh Dr. Siti Musdah Mulia, MA., APU telah bekerja secara sigap, dan gigih untuk melaksanakan tugasnya, pada akhirnya mereka telah membuat draft awal RUU dimaksud yang terdiri dari 149 pasal, dalam 23 bab.

B. PERKAWINAN BEDA AGAMA MENU- RUT COUNTER LEGAL DRAFT

Salah satu hal yang dipandang krusial dalam Counter Legal Draft adalah menyangkut perkawinan berbeda agama. Hal ini dipandang krusial bukan hanya karena kebolehananya sedang pada masa sebelumnya dilarang, tetapi juga karena Counter Legal Draft ini mengakui eksistensinya, memberikan pengaturan dan melindunginya. Hal ini dapat dipahami dari cakupan pasal-pasal berikut ini;

Pasal 54

- (1) Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam di-
bolehkan
- (2) Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dilaku-
kan berdasarkan prinsip saling menghargai dan men-
junjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran
agama dan keyakinan masing-masing.
- (3) Sebelum perkawinan dilangsungkan, Pemerintah
berkewajiban memberi penjelasan kepada kedua
calon suami atau isteri mengenai perkawinan orang
Islam dengan bukan Islam sehingga masing-masing
menyadari segala kemungkinan yang akan terjadi
akibat perkawinan tersebut.

Pasal 55

- (1) Dalam perkawinan orang Islam dengan bukan Islam,
anak berhak untuk memilih dan memeluk suatu
agama secara bebas.
- (2) Dalam hal anak belum bisa menentukan pilihan

agamanya, maka agama anak untuk sementara di-
tentukan oleh kesepakatan kedua orang tuanya.²

Counter Legal Draft dengan warna seperti ini
tidaklah muncul tiba-tiba saja. Kehadirannya dimun-
culkan setelah terlebih dahulu mengamati kondisi real
umat Islam Indonesia Indonesia di tengah kemajemu-
kan bangsa, dinamika sosial yang ada, bahkan prangkat
hukum yang tersedia saat ini. Di relung relung hal itu
Counter Legal Draft mengambil tempat dengan mengem-
ban nuansa kemanusiaan, keagamaan, dan kekinian. Pada
gilirannya perkawinan beda agama ada pada Hukum
Islam Indonesia yang direncanakan itu telah disedia-
kan tempatnya.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang ada saat
ini, terutama bidang perkawinan

Dengan memperhatikan prangkat hukum Islam
bidang perkawinan saat ini, para Perumus RUU Pem-
baharuan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi
Hukum Islam mengemukakan bahwa ada banyak aspek
dalam Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam yang
ada selama ini dipandang menyimpan problematika sosial.
Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika
masyarakat yang antara lain membawa kepada perubahan
pola interaksi manusia, sejumlah problem sosial muncul.
Problem-perproblem ini pada umumnya tidak terwadahi
secara memadai dalam KHI. Problem sosial yang

² Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI,
hlm. 53

dimaksud adalah persoalan ketidakadilan, ketidakmanusiawian, dan diskriminasi yang ditemukan terutama dalam materi pokok KHI, yaitu Hukum Perkawinan.

Menyangkut hukum perkawinan harus fair diakui bahwa dalam KHI terdapat beberapa pasal yang problematik dari sudut pandang keadilan relasi laki-laki dan perempuan, secara umum hal itu dikelompokkan kepada 8 (delapan) aspek.³ Salah satu di antaranya adalah

³ Kedelapan aspek tersebut adalah sebagai berikut; *Pertama*, Berkenaan dengan Usia Menikah. Lama : Usia menikah ditentukan 21 tahun. Bila calon mempelai belum mencapai umur tersebut maka terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, untuk laki-laki antara 19 tahun s/d. 21 tahun, dan perempuan 16 s/d. 21 tahun mesti memperoleh izin dari orang tua, atau wali bila orang tua tidak ada atau tidak mungkin dimintakan izinnya, bila calon mempelai masih di bawah umur 19 tahun untuk laki-laki dan di bawah 16 tahun untuk perempuan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan. (Pasal 15 KHI, dan pasal 6, dan 7 UU No.1/1974). Baru: Masing-masing calon mempelai sudah berusia 19 tahun, dan bila mereka sudah 21 tahun, berakal sehat, dan cakap maka dapat menikahkannya sendiri. (Pasal 7). *Kedua*, a). Wali Nikah. Lama : Laki-laki adalah pemilik hak mutlak wali nikah. Dengan hal ini laki-laki berhak menikahkannya dan orang lain. (Pasal 20, dan 21 KHI). Baru : Laki-laki dan perempuan sama-sama dapat menikahkannya, demikian juga untuk menikahkannya orang lain (Pasal 6, dan 7). *Ketiga*, Saksi Nikah. Lama : Saksi Nikah adalah hak mutlak laki-laki. (Pasal 25 KHI). Baru : Perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hak untuk menjadi saksi. (Pasal 11). *Keempat*, Kedudukan Suami-isteri dalam Perkawinan. Lama : Suami ditentukan sebagai kepala keluarga, dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Suami

dilarangnya Nikah beda Agama, sekarang larangan itu dibatalkan, lalu diakomodasi dan diperbolehkan.

Selama ini, Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi sepasang pemuda dan pemudi yang hendak melangsungkan suatu perkawinan. Artinya, orang Islam baik laki-laki maupun perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang non Islam. Pandangan seperti ini tentu saja bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam, yaitu, pluralisme. Dengan berlandas tumpu pada nalar pluralisme itu, maka tidak tepat menjadikan perbedaan agama (*ikhtilaf al-din*) sebagai penghalang (*mani'*) bagi dilangsungkannya suatu perkawinan beda agama.

dan isteri dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. (Pasal 31 UU, dan Pasal 79 KHI). Baru : Ketentuan tersebut di atas dihilangkan. Suami dan isteri dinyatakan memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang setara. (Pasal 49). *Kelima*, Nuzuz. Lama : Pihak yang mungkin akan nuzuz hanya ditentukan perempuan saja. (Pasal 84 KHI). Baru : Laki-laki dan perempuan yang melalaikan kewajibannya dinyatakan sebagai pihak yang nuzuz. (Pasal 53). *Keenam*, Mahar. Lama : Pihak laki-laki wajib memberikan mahar kepada isterinya secara penuh, bila suami mentalak isterinya *qabla al-dukhul* maka mahar dibayar setengah, dan bila suami wafat *qabla al-dukhul* maka mahar dibayar penuh, bila mahar belum ditentukan maka berlaku mahar *mitsil*. (Pasal 30-38 KHI). Baru: Mahar harus ditunaikan calon suami dan isteri sesuai dengan kesepakatan, kemampuan mereka, dan budaya setempat. (Pasal 16). *Ketujuh*, Poligami. Lama : Bagi laki-laki tertentu yang membutuhkan, memenuhi syarat, dan memungkinkan masih diberi kesempatan untuk melakukan poligami kendati

Counter Legal Draft yang baru ini sengaja telah disusun dengan memperhatikan 6 (enam) visi dan landasan ke depan, sebagai berikut;

1. Pluralisme (*al-ta'addudiyah*)

Tak terbantahkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat plural. Pluralitas ini terjadi bukan hanya dari sudut etnis, ras, budaya, dan bahasa, melainkan juga agama. Sehingga kemajemukan di Indonesia tidak mungkin bisa dihindari. Keberagaman telah menyusup dan menyangkut dalam pelbagai ruang kehidupan. Tidak saja dalam ruang lingkup keluarga besar seperti masyarakat negara, bahkan dalam lingkup keluarga, pluralitas juga bisa berlangsung. Setiap orang senantiasa berada dalam dunia pluralitas.

pun sifatnya selektif dan terkendali. (Pasal 4, dan 5 UU No.1/1974, Pasal 55-59 KHI). Baru : Tidak dimungkinkan lagi poligami (Pasal 3). Kedelapan, Perkawinan Beda Agama. Lama: Perkawinan berbeda agama dilarang dengan tegas, namun terlihat inkonsistensi dalam larangan itu, terutama : 1). Perkawinan itu tidak terpantau oleh petugas karena tempat pendaftaran pernikahan mereka bukan di KUA, 2). Murtaf tidak dijadikan sebagai penyebab fasid nikah secara otomatis. (Pasal 40, dan 116 KHI). Baru : Perkawinan beda agama dinyatakan boleh secara hukum, anak memiliki kebebasan beragama, sedang bagi anak yang masih kecil akan beragama sesuai kesepakatan suami isteri. (Pasal 54, dan 55)., Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, hlm. 17-19., Juga, Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Dirbinbapera Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI., 1992/ 1993), hlm.13-74.

Menghadapi pluralitas tersebut, yang dibutuhkan tentu saja bukan menjauhkan diri dari kenyataan pluralisme tersebut, tetapi pada bagaimana cara dan mekanisme yang bisa diambil di dalam menyikapi pluralitas itu. Sikap antipati terhadap pluralitas, di samping bukan merupakan tindakan yang cukup tepat, juga akan berdampak kontraproduktif bagi tatanan kehidupan manusia yang damai.

Di samping adanya 5 (lima) visi dan landasan lainnya, maka visi dan landasan ini dipahami sebagai hal yang paling relevan menjadi alasan tentang diakomodasinya perkawinan berbeda agama. Islam sebagai agama dipahami mengemban visi dan landasan pluralisme, demikian juga Indonesia sebagai suatu bangsa dan kenyataan real kehidupan umat beragama di Indonesia sampai sekarang ini. Dengan hal ini secara tegas perkawinan beda agama diberi tempat di Indonesia ini.

2. Nasionalitas (*Muwathanah*)

Telah maklum bahwa sebagai sebuah negara, Indonesia dibangun bukan oleh satu komunitas agama saja, Indonesia merekrut anggotanya bukan didasarkan pada kriteria keagamaan, tetapi pada nasionalitas. Dengan perkataan lain yang mengendalikan seluruh warga negara Indonesia bukanlah basis keagamaan, melainkan basis nasionalitas (*muwathanah*). Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil jerih payah seluruh warga bangsa, bukan hanya masyarakat Islam melainkan juga non muslim, bukan hanya masyarakat Jawa melainkan juga masyarakat luar Jawa. Dengan nalar demikian, Indonesia tidak

mengenai adanya warga negara kelas dua. Umat Islam Indonesia tidak bisa dikatakan sebagai zimmi atau ahlu al-zimmah dalam pengertian Fiqh politik klasik.

Sejalan dengan hal itu, menjadikan nasionalitas sebagai poros dalam perumusan hukum Islam khas Indonesia adalah niscaya. Artinya, kenyataan nasionalitas Indonesia mestinya merupakan batu pijak dari hukum Islam. Ini penting dilakukan, sebab sebagai agama mayoritas, Islam (dengan segala urusan yang berkaitan dengannya) tidak pernah menjadi urusan umat Islam sendiri. Apa yang terjadi pada Islam dan umatnya kerap membawa dampak yang besar buat orang lain (al-Akhar). Tentu upaya ini tidak gampang dilakukan di tengah kecenderungan untuk menghidupkan secara terus menerus hukum (fikih) Islam klasik, tetaplah harus ditubikan bahwa realitas pluralisme merupakan faktor determinan di dalam memformat hukum Islam Indonesia. Penafian terhadap realitas tersebut hanya akan menyebabkan hukum Islam yang dibentuk akan mengalami "miskram" atau keguguran sejak awal.

3. Penegakan HAM (*Iqamat al-Huquq al-Insaniyah*)

Hak asasi manusia dimaksudkan sebagai hak-hak yang dimiliki manusia karena eksistensi kemanusiaannya hal itu terberikan kepadanya. Hak asasi mengungkapkan segi-segi kemanusiaan yang perlu dilindungi dan dijamin dalam rangka memartabatkan dan menghormati eksistensi manusia secara utuh. Oleh karena manusia dengan martabatnya merupakan ciptaan Allah, maka dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia dimiliki

manusia karena diberikan Allah sendiri. Dengan demikian, hak asasi manusia secara otomatis akan dimiliki oleh setiap insan yang lahir di bumi ini.

Islam adalah agama yang memiliki komitmen dan perhatian cukup kuat bagi tegaknya hak asasi manusia di tengah masyarakat. Dalam sejarahnya yang awal, Islam hadir justeru untuk menegakkan hak asasi manusia, terutama hak kaum mustad'afin, yang banyak dirampas oleh para penguasa. Misalnya, Islam datang untuk mengembalikan hak-hak kaum perempuan, para budak, dan kaum miskin. Mereka inilah kelompok-kelompok yang rentan kehilangan haknya yang paling asasi sekalipun.

Dalam Islam, ada sejumlah hak asasi manusia yang harus diusahakan pemenuhannya, baik oleh diri sendiri maupun negara. Masing-masing adalah; hak hidup (*hifz al-nafs aw al-hayat*), hak kebebasan beragama (*hifz al-din*), hak kebebasan berpikir (*hifz al-'aql*), hak property (*hifz al-mal*), hak untuk mempertahankan nama baik (*hifz al-irdh*), dan hak untuk memiliki garis keturunan (*hifz al-nasal*). Menurut al-Ghazali, pada komitmen untuk melindungi hak-hak kemanusiaan inilah seluruh ketentuan hukum dalam Islam diacukan.

4. Demokratis

Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang percaya pada sebuah gagasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan menyangkut urusan publik, secara mendasar bisa dikatakan paralel dengan prinsip

prinsip dasar ajaran Islam. Artinya, pada tataran prinsip tersebut antara Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan.

Sejumlah konsep ajaran Islam yang dipandang sejalan dengan prinsip demokrasi adalah; Pertama, al-Musawah (egalitarianism). Bahwa manusia memiliki derajat dan posisi yang setara dihadapan Allah. Kedua, al-Hurriyah (kemerdekaan). Ketiga, al-ukhuwah (persaudaraan). Keempat al-'adalah (keadilan) yang berintikan pada pemenuhan hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat negara. Kelima, al-sura (musyawarah). Bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi di dalam urusan publik yang menyangkut kepentingan bersama. Kiranya mekanisme penyusunan sebuah Kompilasi hukum Islam harus bersendikan kelima pokok ajaran tersebut.

5. Kemaslahatan (*al-Maslahah*)

Kemashlahatan (*al-mashlahat*). Sesungguhnya syari'at (hukum) Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal (*jalb al-mashalih*) dan menolak segala bentuk kemafsadatan (*dar'u al-mafasid*). Ibn al-Qoyyim al-Jauziyah, seorang tokoh Islam bermazhab Hambali, menyimpulkan bahwa syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemaslahatan (*al-mashlahat*), keadilan (*al-'adl*), kerahmatan, *al-rahmat*), dan kebijakan (*al-hikmah*). Prinsip-prinsip ini haruslah menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Ia

harus senantiasa ada dalam pikiran para Ahli Fiqh ketika memutuskan suatu kasus hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam.

Persoalannya, Jika acuan hukum adalah kemaslahatan, maka siapa yang berhak mendefinisikan dan yang memiliki otoritas untuk merumuskannya. Untuk menjawabnya, perlu kiranya dibedakan antara kemaslahatan yang bersifat individual - subjektif dan kemashlahatan yang bersifat sosial - objektif. Yang pertama adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang perorang yang terpisah dengan kepentingan orang lain. Tentu saja sebagai penentu kemaslahatan yang pertama ini adalah yang bersangkutan itu sendiri, seperti dalam kasus poligami (perempuanlah penentu kemaslahatan dan keadilan).

Sedangkan jenis kemaslahatan kedua adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam hal ini, otoritas yang memberikan penilaian adalah orang banyak juga melalui mekanisme syura untuk mencapai consensus (*ijmak*). Sesuatu yang telah menjadi consensus dari prosen pendefinisian mashlahat melalui musyawarah itulah hukum tertinggi yang mengikat kita. Di sinilah pemecahan masalah bersama cukup menentukan. Al-Qur'an mengatakan, urusan mereka di musyawarahkan (dibicarakan dan diputuskan) bersama di antara mereka sendiri (Q.S. al-Sura ayat 38).

6. Kesetaraan Gender (al-Musawah al-Jinsiyah)

Gender dan seks merupakan dua entitas yang berbeda. Jika gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, maka seks secara umum dipakai untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis. Artinya, gender bukan kategori biologis yang berkaitan dengan hitungan kromosom, pola genetik, struktur genital, melainkan merupakan konstruksi sosial dan budaya. Sementara seks merupakan kodrat Tuhan yang bersifat permanen.

Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang perlu dipersoalkan. Tidak mengapa karena kodratnya, perempuan harus melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Problem baru muncul tatkala jenis kelamin tersebut melahirkan ketidakadilan perlakuan sosial antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan diposisikan sebagai makhluk yang hanya boleh bekerja dalam dunia domestik dan tidak dalam dunia publik, karena dunia publik merupakan area khusus bagi laki-laki. Perempuan tidak memiliki kewenangan untuk menjadi pemimpin ditingkat keluarga maupun masyarakat.

Di sinilah letak pentingnya memisahkan seks dan gender secara proporsional. Dari sudut gender, relasi antara laki-laki dan perempuan mesti diletakkan dalam konteks kesetaraan dan keadilan. Sebab, ketidakadilan gender di samping bertentangan dengan spirit Islam, juga hanya akan memarginalkan dan mendehumanisasi perempuan. Islam dengan sangat tegas telah mengatakan

bahwa laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Yang membedakan di antara mereka hanyalah kadar ketakwaannya saja. Alqur'an tidak menekankan superioritas dan inferioritas atas dasar jenis kelamin.

Hukum Islam mutlak memegang prinsip ini, sebab kesetaraan gender merupakan unit inti dalam relasi keadilan sosial. Tanpa kesetaraan gender tidak mungkin keadilan sosial dapat tercipta. Di sinilah persoalan struktur sosial hukum Islam kita karena hukum Islam yang kita pahami, yakini, dan amalkan sehari-hari dilahirkan oleh masyarakat dan budaya patriarkhis, dimana laki-laki selalu menjadi pusat kuasa, dan misoginis (kebencian terhadap perempuan) sering dianggap wajar dalam penafsiran. Adalah benar belaka bahwa merekonstruksi hukum Islam (fiqh) dewasa ini tidak cukup sekedar melakukan tafsir ulang tetapi harus melalui proses dekonstruksi (pembongkaran) terhadap bebatuan ideologi yang melilitnya berabad-abad.⁴

C. TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA COUNTER LEGAL DRAFT

Menteri Agama yang pada waktu itu dijabat oleh Prof Dr H Said Agil Husin Al Munawar MA, ketika membuka acara peluncuran dan diskusi "Counter Legal Draft Atas Kompilasi Hukum Islam" di Jakarta,

⁴ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, hlm.25-30

Senin (4/10) pada sambutan tertulisnya mengatakan, menghargai apa yang dihasilkan Tim Pengkajian Kompilasi Hukum Islam dari Pokja PUG Departemen Agama karena banyak tawaran baru dan menarik dari draf tandingan ini dan karena itu perlu dikaji secara kritis, bukan ditolak atau diterima begitu saja.

Said Agil juga menyebutkan perubahan masyarakat yang begitu cepat belakangan ini akibat perkembangan global ikut mengubah interpretasi keagamaan. Masyarakat yang demokratis lebih mengedepankan interpretasi yang demokratis daripada interpretasi yang otoritarian. "Di sinilah letak pentingnya membaca kembali KHI," kata Menteri.

Diskusi ini dilaksanakan dengan mengundang sejumlah tokoh masyarakat baik sebagai nara sumber maupun peserta aktif merupakan upaya menampung aspirasi masyarakat. "Counter legal draft ini bukan tawaran mati," kata Musdah.

Dia menyadari, berat sekali meyakinkan publik mengenai alasan mengapa diperlukan sebuah CLD terhadap KHI yang sudah ada. Tetapi, Musdah tidak berkecil hati. Dia menganalogikan upaya ini seperti pemilihan presiden langsung oleh rakyat yang sampai lima tahun lalu pun tidak terbayang akan mungkin dilakukan di Indonesia.

"Nyatanya pemilihan presiden langsung berjalan baik dan tidak ada yang 'mati' karena itu. Buat saya yang paling penting adalah menunjukkan KHI bisa

diperbarui sesuai perubahan zaman, KHI bukan sesuatu yang sakral," papar Musdah.

Pengantar buku Pembaruan Hukum Islam, "Counter Legal Draft" Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, tawaran pembaruan pada sejumlah pasal di dalam KHI bukan hanya dari basis materinya yang terdapat di dalam pasal-pasal KHI, tetapi juga dari pangkal paradigmanya. Karena itu, tawaran ini memuat perubahan batang tubuh KHI selain menyertakan juga bangunan metodologi yang menjadi acuan kerja pembaruan.

Untuk menyusun CLD ini, tim mengundang banyak pakar yang menyusun argumen teologis, sosiologis, dan politis sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa perubahan KHI bukan hanya perlu melainkan mendesak. Pendapat para pakar tersebut telah dilakukan uji shahih di dalam berbagai forum diskusi.

Tim juga menurunkan peneliti untuk mendapatkan informasi dan masukan langsung dari berbagai kalangan masyarakat, selain mencari tahu berbagai tradisi dan kearifan lokal yang belum terakomodasi di dalam KHI. Daerah-daerah yang diteliti adalah Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Diskusi pada tanggal 4 Oktober 2004 yang mengiringi peluncuran CLD diisi oleh beberapa tokoh, di antaranya;

1. Abdul Moqsith Ghazali dari Tim Pembaruan KHI; pimpinan Pondok Pesantren Dar el-Tauhid Cirebon
2. KH Husein Muhammad; guru besar hukum Islam Universitas Indonesia

3. Prof Dr HM Tahir Azhary SH; Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
4. Prof Dr H Hasanuddin AF,
5. Ulil Abshar-Abdalla bertindak sebagai moderator dari Koordinator Jaringan Islam Liberal.
6. Ratna Batara Munti Ketua Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta
7. Rita Serena Kolibonso, dari aliansi advokasi CLD dengan nara sumber direktur organisasi non pemerintah Mitra Perempuan
8. Marzuki Wahid, anggota tim pembaru KHI
9. Drs H Andi Syamsu Alam, Ketua Muda Mahkamah Agung bidang Lingkungan Peradilan Agama
10. Dan lain-lain.

Secara umum tanggapan ini terdiri dari dua bentuk, yaitu: 1). Tanggapan yang mendukung dan sependapat dengannya. 2). Tanggapan yang menolak. Untuk lebih jelasnya hal ini terlihat seperti dikemukakan berikut ini;

- 1) Tanggapan yang mendukung dan sependapat dengannya

Tanggapan jenis ini tidak banyak dikemukakan. Paham lama yang telah berurat berakar di Indonesia ini adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh menikah beda agama (Islam dengan non muslim), inilah pendapat yang dianut oleh mayoritas penduduk bangsa ini, tidak hanya terbatas pada pendapat orang Islam semata, bahkan pendapat semua penganut agama yang ada di Indonesia ini. Meskipun suaranya nyaring,

kebolehan perkawinan beda agama adalah merupakan pemikiran baru dan pendapat minoritas anak bangsa sampai saat ini, karena pendapat ini disuarakan oleh orang-orang terkemuka, dan orang-orang terpelajar maka pendapat itu terlihat demikian kontras. Meskipun perkawinan beda agama memiliki gaung yang kuat, tetapi hal itu hanya lahir dari segelintir orang dan kelompok minoritas di Indonesia ini. Dengan demikian pengikut pendapat ini hanyalah memiliki jumlah yang kecil.

Sejalan dengan hal tersebut, dukungan terhadap perkawinan berbeda agama ini dipahami hanyalah lahir dari segelintir orang, di antaranya adalah dari Jaringan Islam Liberal. Dalam hal ini dikemukakan langsung oleh kordinator JIL Ulil Abshar Abdallah, Sementara Ulil Abshar-Abdalla sebagai pemandu diskusi memberi masukan bahwa di dalam Islam klasik banyak sekali pendapat yang kontradiktif karena fiqih merupakan pendapat pribadi dari para ahli fikih. Ketika fikih akan dijadikan hukum positif sebagai hukum negara, maka berbagai pendapat di dalam negara itu harus juga didengar. Sebagai pemutus akhir perbedaan pendapat di kalangan ulama di sebuah negara moderen adalah pada Dewan Perwakilan Rakyat

Ulil Abshar Abdallah mengatakan; tentang perkawinan beda agama (lebih khusus dalam kapling Islam menikah dengan non muslim) maka JIL melihat hal ini sebagai sesuatu yang mubah, yaitu dapat saja dilakukan bila hal itu dikehendaki. Mereka memahami teks-teks keagamaan dengan cermat, dan mendekati hal itu dengan penalaran versi mereka, akhirnya mereka

menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama itu dapat dan boleh dilaksanakan.

Misalnya Ulil Abshar Abdallah mengatakan; Larangan kawin beda agama adalah bersifat kontekstual. Pada zaman Nabi, motivasi larangan kawin beda agama itu lebih dipengaruhi oleh kondisi umat Islam, waktu itu umat Islam masih sedikit, dan lemah, dan sedang berusaha memperbanyak dan memperkuat umat, jika waktu itu perkawinan beda agama diperkenankan bisa-bisa umat Islam akan habis ditelan orang kafir (non muslim) ditengah pengaruh mereka yang masih dominan. Nah, saat ini Islam sudah semilyar lebih, kenapa harus takut kawin dengan yang di luar Islam. Kala itu, Islam sendiri sebenarnya sudah mencapai kemajuan, membolehkan laki-laki muslim kawin dengan wanita ahli kitab. Ahli kitab hingga saat ini masih ada. Malah, agama-agama selain Nasrani dan Yahudi pun bisa disebut ahli kitab. Kawin beda agama hambatannya bukan persoalan teologis, melainkan sosial.⁵

2) Tanggapan yang menolak

Demikian banyak pihak yang hadir dalam diskusi peluncuran CLD tersebut, terlihat pada umumnya mereka tidak menyetujui banyak hal dari padanya, di antaranya penolakan terhadap perkawinan beda agama. Lebih lanjut hal ini dapat dilihat sebagai berikut;

⁵ <http://www.dilibary.net/images/topics/debat-ulil-thian.pdf>.

Abdul Moqsith dalam diskusi memberikan komentar yang terlihat lunak dan bijak menyebutkan; Beberapa tawaran dalam CLD kelihatan bertentangan dengan isi Al Quran, tetapi tim pembaruan mengambil sikap untuk membaca Al Quran dan hadis bukan dari narasinya tetapi dari substansinya dan dengan memegang kaidah mendahulukan kebaikan bersama, keadilan, demokrasi, dan kebijakan.

Prof. Dr. H.M. Tahir Azhary, SH., menyentak forum dengan memulai tanggapan yang cukup tajam, dimana dia menyimpulkan tidak sependapat dengan hampir semua usulan di dalam CLD tersebut. Dalam banyak hal apa yang ada dalam hukum perkawinan itu adalah merupakan konsensus alim ulama dan pakar hukum Islam sebagai yang dinyatakan sebagai rukun pernikahan.

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, Menyoroti antara lain; mengenai keadilan yang disebutkan sebagai keadilan bukan berarti sama persis, tetapi harus dipahami dalam arti adanya keseimbangan dan proporsionalitas.

Dr. Aida Vitayala Hubeis dari Institut Pertanian Bogor yang banyak meneliti mengenai perempuan dalam pembangunan mempertanyakan apa yang dimaksud dengan "tidak sama persis". Aida mengatakan, yang membedakan antara perempuan dan laki-laki adalah keadaan biologisnya, yaitu bisa mengandung dan menyusui. Dengan demikian, dalam hal kemampuan dan kreativitas sebagai manusia yang berakal tidak ada beda sama sekali antara laki-laki dan perempuan." Tetapi perbedaan biologis itu sering dipakai orang untuk

membedakan keduanya di era moderen dan 'kekinian' ini, tetapi malah dengan hal ini, justeru tertinggal, jalan di tempat," papar Aida. Adalah lebih adil bila tugas-tugas domestik juga dilakukan laki-laki dan perempuan, dan perempuan pun boleh ada di ruang publik.

KH Husein Muhammad mengatakan, apa yang ditawarkan CLD berbeda dengan arus besar fikih yang dipakai di Indonesia. Karena itu, dia berangkat dari pernyataan Menteri Agama dalam sambutan pembukaannya mengenai apakah yang akan dipakai adalah suara mayoritas atau suara minoritas. Menurut KH Husein, ada banyak kejadian di mana suara satu orang bisa mengalahkan suara orang banyak karena kredibilitas yang dimiliki oleh satu orang tersebut. Salah satu contoh menurut dia, para sahabat lebih mendahulukan pendapat Abu Bakar yang merupakan sahabat Nabi SWA daripada suara banyak orang karena kredibilitas Abu Bakar.

Dia juga berpendapat bahwa apa yang kita terima saat ini adalah ajaran agama dalam bentuk teks, berbeda dari zaman ketika Nabi masih hidup. "Teks bisa diinterpretasi karena itu Al Quran mengandung sejumlah dimensi pemaknaan dan yang memberi makna pada teks adalah manusia," tutur KH Husein.

Di dalam buku Pembaruan Hukum Islam tim menyebutkan beberapa persoalan dengan KHI. Dari sisi metodologis, KHI dianggap tidak digali sepenuhnya dari kenyataan empiris Indonesia melainkan mengambil begitu saja dari penjelasan normatif tafsir keagamaan

klasik dan kurang mempertimbangkan kemaslahatan umat Islam Indonesia. Dari sisi lingkup sosial, KHI dipandang masih mengandung persoalan ketidakadilan dan diskriminasi.

Dalam hukum perkawinan, menurut Pembaruan Hukum Islam, KHI memiliki beberapa pasal yang kurang mendukung semangat keadilan dalam relasi perempuan dan laki-laki, yaitu antara lain batas usia pernikahan, wali nikah, hak dan kewajiban suami dan istri, nusyuz, poligami, dan *nikah beda agama*.

Di luar forum resmi diskusi yang dilakukan pada hari senin tanggal 4 Oktober 2004 itu sebenarnya masih banyak tanggapan lain yang bermunculan, bahkan sampai saat ini. Di antaranya dapat dikemukakan, sebagai berikut;

Irfan S. Awwas dari Majelis Mujahidin pada hari Senin, 25 Oktober 2004, mengemukakan sebagai berikut;

"Draf Kompilasi Hukum Islam Versi Depag. Adalah Menolak Syari'at"

"Dan di antara manusia ada yang mempergunakan kata-kata hampa tanpa ilmu untuk menyesatkan orang dari jalan Allah dan menjadikan jalan Allah itu senda gurau. Mereka akan menderita azab yang menghinakan." (Qs. Lukman, 6). Menolak syari'at Islam, menghalangi orang lain untuk menerapkan syari'at Islam, serta mengacaukan makna dan kedudukan syari'at dengan isme-isme jahiliyah yang lahir dari keterbatasan akal manusia. Itulah, antara lain, yang dimaksud dengan

menyimpangkan manusia dari jalan Allah, tanpa ilmu dan menjadikan agama sebagai permainan.

Di Indonesia, para penghalang penerapan syari'at Islam tergabung ke dalam Jaringan fundamentalis sekular. Gerakan fundamentalis sekular, apapun agamanya (kalau ia beragama) punya misi tertentu: yaitu dekonstruksi (menjauhkan) agama dari lembaga negara dan menolak syari'at Islam. Untuk maksud ini, mereka tidak sungkan-sungkan memposisikan agama sebagai alat pemicu konflik horizontal.

Meski secara kuantitas mereka minoritas, dan secara kualitas keilmuan biasa-biasa saja, namun karena mendapat dukungan media massa yang luas, juga mendapat santunan sosial dan finansial dari lembaga-lembaga pendonor semacam The Asia Foundation, mengakibatkan suara mereka nyaring terdengar di mana-mana. Membuat mereka berani tampil lebih percaya diri, menggunakan berbagai predikat: pejuang demokrasi, hak asasi, liberalis, pluralis, inklusifis, kesetaraan gender, dan lain sebagainya. Stigmatisasi terorisme terhadap para mujahid penegak syari'at Islam, yang dipropagandakan Amerika, Australia, Filipina, dan Singapura, berpengaruh cukup besar terhadap berkembangnya aktivitas mereka. Stamina intelektual mereka bergairah setelah diinjeksi melalui isu demokratisasi, pluralisme dan HAM. Termasuk meluasnya dekadensi moral, kemungkaran intelektual, maupun penyimpangan pemikiran Islam yang mereka sosialisasikan melalui jaringan kerja kelompok liberal Islam dan para pengusung kesetaraan gender. Adalah Dr.Siti

Muhdah Mulia, 46 th, dosen pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, mencoba mensosialisasikan penyimpangan ini melalui tangan kekuasaan. Sebagai ketua tim penyusunan draf yang diberi label: "Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (KHI)" Departemen Agama ia menawarkan rumusan baru fiqih Islam yang diselaraskan dengan karakteristik demokrasi dan pluralisme. Tim ini sengaja dibentuk dengan maksud, melakukan pembaruan terhadap hukum Islam yang dianggapnya out of date, terutama dalam tiga bidang kehidupan, yakni perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dalam tiga bidang kehidupan di atas, mereka mengaku menemukan banyak ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan. Lalu, seperti biasanya, mereka pun menuduh kelompok Islam fundamentalis telah melakukan kesalahan epistemologis, karena hanya berorientasi pada teks Alqur'an dan sunnah tanpa memandang konteks masyarakat setempat. Dari cara pandang seperti itu, maka lahirlah Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam itu. Menyangkut masalah perkawinan mereka mengatakan bahwa: ... Perkawinan beda agama boleh (pasal 54)... Lahirnya draf ini, bukan saja berangkat dari interpretasi yang salah terhadap syari'at Islam. Tetapi juga, merupakan hasil dari manipulasi agama dan pem-bodohan intelektual dengan bersikap tidak jujur dan diskriminatif. Sebagaimana diakui dalam wawancara Siti Muhdah dengan Majalah Tempo, edisi 11-17 Oktober 2004, bahwa dalam proses penyusunan KHI dia mengakomodir orang-orang yang peduli dengan demokrasi dan keadilan gender, yang

notabene menjadikan agama sebagai alat justifikasi terhadap pikirannya sendiri yang tidak memiliki dasar apapun kecuali kemauan hawa nafsunya. Sebaliknya, menyingkirkan dan tidak hendak mempertimbangkan aspirasi pihak-pihak yang memiliki komitmen terhadap wahyu Ilahi. Membaca draf ini jelas menyesatkan. Oleh karena itu, Majelis Mujahidin Indonesia, sebuah institusi penegak syari'at Islam, - yang sering dikesankan sebagai Islam radikal: anti dialog, emosional, dan berwawasan sempit - sebenarnya telah melayangkan surat tantangan debat kepada tim kesetaraan gender ini. Namun, hingga sekarang belum mendapatkan jawaban. Sembari menunggu respons dari tim penyusun yang sebagian besar adalah kontributor Jaringan Islam Leberal (JIL), maka tulisan ini dimaksudkan sebagai prolog untuk suatu dialog yang lebih fair, ilmiah, dan konprehensif. Salah Memahami Dalil Kesalahan mendasar dari tim penyusun Counter-Legal Draft KHI, selain interpretasi yang menyesatkan, adalah landasan dan *nuqthah inthilaqiyah* (titik berangkatnya) yang juga salah; sehingga seluruh perubahan terhadap nas Al-qur'an yang mereka usulkan, adalah *bathil*. Menggunakan pendekatan kontekstual terhadap hal-hal yang bersifat qath'i (permanen) tentu saja akan menghasilkan penyimpangan syar'i. Apalagi mengkoreksi ketetapan Allah dengan hasil ijtihadiyah, jelas suatu kekafiran berfikir. Dalam hal ini, mereka menggunakan kaidah usul fiqh: *Alhukmu yaduru ma'al illat* (hukum bisa berubah karena perubahan illat (sebabnya). Dalam hal-hal yang bersifat ijtihadiyah, yaitu menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan

baru yang berkembang di masyarakat, yang belum ada ketentuannya di dalam Alqur'an dan hadits, para mujtahid sepanjang zaman, berpegang pada dalil ini. Nah, disinilah kekeliruan tim penyusun Pengarus-utamaan Gender (PUG), yang dipimpin oleh Siti Musdah itu. Karena mereka menggunakan kaidah ini sebagai justifikasi atas pemikirannya yang mengingkari prinsip agama.

Selain itu, mereka hanya memahami kaidah ini dari segi bahasa saja, tetapi tidak mempertimbangkan hakikat penerapannya. Lebih celaka lagi, mereka mengambil sebagian dari kaidah usul fiqh dan menafikan kaidah lainnya. Sebab ada kaidah lain, yang dinisbahkan kepada Umar bin Khathab ra. yang berbunyi: *Al-Ijtihadu la yanqudhu bil ijtihadi* (Ijtihad seorang mujtahid tidak bisa membatalkan ijtihad mujtahid lainnya). Sedangkan persoalan yang dibahas di dalam draf Kompilasi Hukum Islam versi Depag itu menyangkut ketetapan Allah yang tertera di dalam Qur'an dan sunnah Nabi.⁶

Tanggapan senada, secara resmi dari Majelis Mujahidin Indonesia berikutnya juga mereka layangkan pada tanggal 10 August, 2006, dengan redaksi yang berbeda, namun maksudnya sejalan dengan ungkapan di atas.

Secara langsung sebenarnya penulis sendiri telah melihat bagaimana kerasnya reaksi masyarakat untuk menolak CLD Departemen Agama tersebut, sewaktu pada awal tahun 2005 penulis melakukan persentase CLD tersebut dalam rangka sosialisasi dan memperoleh

⁶ <http://majelis.mujahidin.or.id/new>

masuk dari masyarakat di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Setelah poin demi poin CLD tersebut disajikan, terutama bidang perkawinan, di antaranya menyangkut perkawinan berbeda agama, ternyata hampir semua peserta muzakarah memperlihatkan sikap menolak CLD tersebut, karena dipahami terlalu maju dan telah menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya. Lalu diharapkan MUI supaya merekomendasikan penyempurnaan CLD tersebut berikutnya.

Penulis melihat, sesungguhnya perkawinan beda agama dan beberapa poin krusial lainnya dalam CLD tersebut banyak diilhami oleh pemikiran JIL yang sudah berkembang terlebih dahulu. Sejak tahun 2001 Ulil Abshar Abdalla telah mempublikasikan pemikirannya tentang kebolehan perkawinan beda agama itu, dia mengatakan: "Semua agama sama. Semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi, Islam bukan yang paling benar, dan logika yang dikembangkan Ulil tentang agama ini berimbas pada masalah hukum perkawinan antar-agama, yang akhirnya dia menyimpulkan bahwa "Larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan lelaki non-Islam, sudah tidak relevan lagi."

Melihat kenyataan ini, meskipun MUI telah pernah memfatwakan perkawinan beda agama antara orang Islam dengan non muslim sebelumnya telah pernah dikeluarkan (pada tanggal 1 Juni 1980), karena non muslim yang ada di Indonesia ini tidak dapat dipahami sebagai ahli kitab secara mutlak maka untuk merespon hal tersebut sebagai tanggapan atas bertambahnya per-

hatian masyarakat terhadap terjadi pernikahan antar agama, dan munculnya pendapat baru tentang hal itu, akhirnya MUI memfatwakan kembali, dan menetapkan hukum keharamannya.⁷

Demikian seriusnya perbaikan dan penyempurnaan yang diharapkan dalam naskah rancangan Pembaharuan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam tersebut untuk dapat diterima masyarakat, kemudian dimajukan ke DPR, disidangkan, dan akhirnya untuk dapat diundangkan ternyata terpaksa menyita waktu yang cukup panjang. Dua tahun sudah hal itu sejak pertama kali diluncurkan secara resmi ke publik pada tanggal 4 Oktober 2004 untuk mendapat tanggapan dan masukan dari berbagai pihak, ternyata sampai saat ini belum jelas lagi bagaimana tindak lanjutnya untuk dapat kita nikmati sebagai hukum materil dan hukum terapan Islam Indonesia yang sangat diharapkan kehadirannya. Tidak lain hal ini adalah karena banyak, tajam dan kerasnya tanggapan dan masukan yang muncul dari lapisan masyarakat yang ada. Hal ini jelas harus menjadi perhatian selanjutnya untuk benar-benar dapat menemukan format hukum Islam yang sesuai dengan kondisi umat Islam Indonesia saat ini.

⁷ GATRA, 21 Desember 2002.

DAFTAR BACAAN

- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi hukum Islam Dalam Tata hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 1415 H./ 1994 M.)
- Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat al-Qur'an*, dikomentari Shudqi Jamil al-Attar, Jld. II, (Beirut : Dar al-Fikr, 2001)
- Abul al-A'la al-Maududi, *al-Islam fi Muwajahah al-Tahaddiyah al-Mu'assharah*, (Kuwait : Dar al-Qalam, 1983)
- Acthur P. Crabtree, *You and the Law*, (New York : Halt Rinehart and Wiston Inc., t.t.)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 1995 M.)
- Al-Budyapranata pr., *Membangun Keluarga Kristiani*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986 M.)
- Al-Syuyuti, *Tafsir al-Durr al-Mansur fi Tafsir al-Ma'sur*, juz 3 (Beirut : Dar al-Fikr, Cet. Ke-1, 1403/1983 M.)
- al-Zamkhasari al-Khawarizmi, *al-Kassaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa al-'Uyun al-'Aqawil*, Juz.1, (Mesir : Musthafa al Bab al Halb wa Syurakah, 1396 H./1972M.)

- Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 1417 H./ 1996 M.)
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986)
- Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Cet. Ke-1, Gema Insani Press, 1996 M.
- Departemen Agama RI. *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta : al-Hikmah & Direktorat Badan Pembinaan Peradilan Agama Islam, No.5 Tahun III, 1992)
- _____, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1978 M)
- _____, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 1989)
- _____, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirbinbapera Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI., 1992/ 1993)
- Fahmi Huwaydi, *Muwathunun la Zimmiiyun*, (Kairo : Dar el-Zorouk, Cet. Ke-3, 1999)
- G. Puja, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu (Didasarkan Manusmriti)*, (Jakarta: Dirjen Bimas Hindu & Budha Depag., 1974 M.)
- GATRA, 21 Desember 2002.
- Gde Djaksa, *Hubungan Perkawinan Menurut Hukum*

- Hindu Dengan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1/1974, (Jakarta : Skripsi pada Fakultas Hukum UI, 1976 M.)
- H.J.Palang Agama et. All, *Peranan Agama Katolik Dalam Meningkatkan Program Kependudukan Dan Keluarga Berencana Melalui Nasehat Perkawinan*, (Jakarta : Unit Kependudukan dan Keluarga Berencana Departemen Agama RI. Dan Biro Penerangan dan Motivasi BKKBN, 1983 M.)
- Harifuddin Cadiwu, *Konsep Kufr Dalam al-Qur'an* (Jakarta : Bulan Bintang, 1991)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990 M.)
- Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*
- Imam Muhammad al-Razi Fakhr al-Din ibn al-'Allamah Dhiya'u al-Din Umar, *Tafsir al-Fakhr al-Razi al-Musytahar bi al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, dikomentari oleh Syaikh Khalil Muhyiddin al-Mays, jilid V, (Bairut : Dar al-Fikir, 1995)
- Ismail Ibnu Kasir al-Qursy al-Damsyqy, *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*, juz. 1, dan 2, (Mesir : Dar al-Fikr, t.t.)
- J.L. CH. Abineno, *Manusia, Suami & Isteri, Perkawinan & Keluarga*, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1982)
- J.Verkuyl, *Etika Kristen (Seksuil)*, (Jakarta : Gunung Mulia, Cet. Ke-8, 1984)
- Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli, *Hasyiyatani*, Juz.3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)

- Krishnanda W. Mukti, *Nasehat Perkawinan Agama Budha dan Pendidikan Kependudukan Keluarga Berencana Dalam Agama Budha*, (Jakarta: Departemen Agama RI., dan BKKBN, 1983)
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Pustaka Kartini, Cet. Ke-1, 1990 M.)
- Masrani Basran, *Kompilasi Hukum Islam* (Makalah) yang disajikan pada Orientasi Kompilasi Hukum Islam pada tanggal 22 s/d/ 26 Agustus 1995 di Medan
- Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : INIS, 1993)
- Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jld. VI, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, tt.)
- Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami' al-ahkam al-Qur'an*, Juz.3, dan 6, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.)
- _____, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz.1, (Mesir : Dar al-Fikr, t.t.)
- P. A. Heuken, *Persiapan Perkawinan*, (Jakarta : Obor, 1981 M.)
- P. J. B. Martisidjoto Sj., *Perkawinan Gerejani*, Paper disajikan dalam pertemuan ketakisse Kaj., tanggal 19-8-1985.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 1995 M.)
- Panji Masyarakat, nomor, 710, 1412 H./1992 M.

- Purwahadi Wardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katholik Implikasinya Dalam Kawin Campur*, (Yogyakarta : Kanisius, Cet. Ke 2, 1991 M.)
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali Press, Cet. Ke1, 1991 M.)
- S. Gautama, *Hukum Antar Golongan (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Ichtiar Baru – Vanhoeve, Cet. Ke-5, 1980 M.)
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, t.t.)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1991 M.)
- Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Departemen Agama RI., 2004)
- Tim Penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina & The Asia Foundation, 2004)
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonedia, Inggeris*, (Semarang, Indonesia: Aneka Ilmu, 1977 M.)